

**MANAJEMEN PRABENCANA MELALUI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT SIAGA BENCANA BERBASIS KOMUNITAS
DI KABUPATEN SLEMAN**



Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan Ilmu Administrasi

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2013

i

commit to user

HALAMAN PERSETUJUAN

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Skripsi

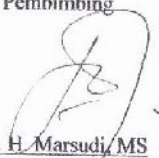
Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret

Surakarta



Pembimbing


Drs. H. Marsudi, MS

NIP 19550823 198303 1 001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Ini Telah Diuji dan Disahkan Oleh Panitia Ujian Skripsi
Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Pada Hari : Rabu

Tanggal : 6 Maret 2018

Panitia Penguji Skripsi :

1. Ketua : Dra. Sri Yuliani, M.Si
(NIP. 19630730 199003 2 002)
2. Sekretaris : Drs. Suryatmojo, M.Si
(NIP. 19530812 198601 1 001)
3. Penguji : Drs. H. Marsudi, MS
(NIP. 19550823 198503 1 001)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret

Surakarta



Prof. Drs. H. Pawito, Ph.D

NIP. 19540805 198503 1 002

MOTTO

Man Jadda Wa Jadda Man Shabara Zhafira

(Barang Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkannya, dan Barang Siapa bersabar dialah yang akan beruntung)

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

(QS. Al-Insyirah ayat 5-6)

Kebaikan tidak bernilai selama diucapkan,
akan tetapi bernilai sesudah dikerjakan

(Penulis)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan setulus hati dan mengucapkan syukur kepada Allah SWT karya ini
kupersembahkan kepada:



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan karunia dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Manajemen Prabencana Melalui Pemberdayaan Masyarakat Siaga Bencana Berbasis Komunitas di Kabupaten Sleman”**. Penyusunan skripsi ini diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Sosial pada Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Drs. H. Marsudi, MS selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, bantuan, arahan dan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Drs. H. Sakur, SU selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan dukungan dan arahan kepada penulis selama masa studi.
3. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan.
4. Drs. H. Urip Bahagia selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman yang telah memberikan ijin penelitian.

5. Makwan, S.TP, MT selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sleman yang membantu memberikan informasi sebagai data pembuatan skripsi ini.
6. Ahmadi selaku Sekretaris Posko Taruna Siaga Bencana (Tagana) Sleman yang telah membantu memberikan informasi sebagai validitas data dalam pembuatan skripsi ini.
7. Masyarakat Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman yang telah memberikan informasi tambahan sebagai validitas data skripsi.
8. Keluargaku yang telah memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan.
9. Teman-teman Jurusan Ilmu Administrasi FISIP UNS angkatan 2009 yang telah memberikan dukungan.
10. Seluruh sahabat dan teman-teman yang juga telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan, karena keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis berharap kesediaan pembaca untuk memberikan kritik dan saran dalam menyempurnakan skripsi ini ke depannya. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi karya yang memberi dampak positif bagi semua pihak.

Surakarta, Maret 2013

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR	14
A. Manajemen Bencana	14
B. Manajemen Prabencana.....	24
C. Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas	31
D. Masyarakat Siaga Bencana.....	50
E. Kerangka Pikir.....	56
BAB III. METODE PENELITIAN.....	59
A. Jenis Penelitian	59
B. Lokasi Penelitian	59
C. Sumber Data	61
D. Teknik Pengumpulan Data	61

E. Teknik Penentuan Informan.....	63
F. Validitas Data	64
G. Teknik Analisis Data	65
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	66
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	66
1. Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman	67
a. Sejarah Singkat Pembentukan BPBD Sleman.....	67
b. Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Sleman.....	68
c. Struktur Organisasi BPBD Sleman	69
d. Sarana/Prasarana BPBD Sleman.....	76
2. Gambaran Umum Taruna Siaga Bencana (Tagana) Sleman.....	78
a. Profil Tagana Sleman	78
b. Struktur Organisasi Tagana Sleman	79
3. Gambaran Umum Desa Argomulyo.....	82
a. Keadaan Geografis	82
b. Keadaan Demografis.....	83
B. Manajemen Prabencana Melalui Pemberdayaan Masyarakat Siaga Bencana Berbasis Komunitas di Kabupaten Sleman	85
1. Manajemen Prabencana di Kabupaten Sleman	85
2. Pemberdayaan Masyarakat Siaga Bencana Berbasis Komunitas di Kabupaten Sleman.....	107
3. Terbentuknya Masyarakat Siaga Bencana di Sleman	137
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	146
A. Kesimpulan	146
B. Saran.....	150
DAFTAR PUSTAKA	152
LAMPIRAN.....	156

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Daerah Zona Ancaman Merapi....	3
Tabel 1.2 Mitigasi Non Fisik Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sleman..	7
Tabel 4.1 Sarana/Prasarana BPBD Sleman.....	76
Tabel 4.2 Mata Pencaharian Penduduk Desa Argomulyo	84
Tabel 4.3 Kelembagaan Manajemen Prabencana di Sleman	88
Tabel 4.4 Mekanisme Penyebarluasan Sistem Peringatan Dini	96
Tabel 4.5 Kerjasama Pengadaan Fasilitas Publik	103
Tabel 4.6 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Siaga Bencana Kabupaten Sleman	109
Tabel 4.7 Informasi Bantuan Lingkungan Desa Argomulyo	116
Tabel 4.8 Matriks Pemberdayaan Masyarakat Siaga Bencana Berbasis Komunitas di Kabupaten Sleman.....	134

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	58
Gambar 3.1 Skema Model Analisis Interaktif.....	66
Gambar 4.1 Stuktur Organisasi BPBD Sleman	77
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Tagana Sleman	81
Gambar 4.3 Simulasi/Gladi Lapang Merapi	128



ABSTRAK

Efa Apriyani. D0109026. Skripsi. Manajemen Prabencana Melalui Pemberdayaan Masyarakat Siaga Bencana Berbasis Komunitas di Kabupaten Sleman. Jurusan Ilmu Administrasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Indonesia memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana. Selama ini penanganan bencana lebih banyak diutamakan pada kegiatan tanggap darurat dan kegiatan pascabencana, sedangkan kegiatan prabencana yang merupakan langkah untuk mengantisipasi risiko bencana terjadinya bencana terkadang dikesampingkan. Sleman sebagai salah satu daerah yang rawan terhadap bencana, mulai tahun 2011 sampai saat ini telah berfokus pada kegiatan prabencana. Manajemen prabencana yang sedang ditingkatkan di Sleman adalah melibatkan masyarakat tidak sebagai subjek melainkan menjadi objek dengan langkah pemberdayaan masyarakat yang juga melibatkan komunitas di Sleman. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan manajemen prabencana melalui pemberdayaan masyarakat siaga bencana berbasis komunitas di Kabupaten Sleman.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan informan utama dari BPBD Sleman. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Validitas data menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data menyesuaikan jenis penelitiannya yaitu menggunakan teknik analisis interaktif.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pada tahun 2012 terdapat 32 dukuh di Kabupaten Sleman yang telah melakukan pemberdayaan masyarakat siaga bencana berbasis komunitas dengan bantuan 37 komunitas. Pemerintah Kabupaten Sleman bekerjasama dengan komunitas peduli bencana dalam melakukan kegiatan pemberdayaan untuk melatih dan mendidik masyarakat menjadi masyarakat yang berpengetahuan bencana dan bersikap antisipasi terhadap bencana. Manajemen prabencana dalam penelitian ini menggunakan lima prioritas aksi dari *Hyogo Framework for Action* (HFA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas di Kabupaten Sleman telah memenuhi kriteria keberhasilan pemberdayaan yaitu mendahulukan kepentingan umum, kesamaan nilai, layanan masyarakat, komunikasi, informasi, rintangan (penyelesaian), jaringan kerja, organisasi, keahlian, keselarasan. Pencapaian manajemen prabencana melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat siaga bencana berbasis komunitas yang dilakukan di Sleman, antara lain adalah pelatihan pengurangan risiko bencana; pembelajaran komunikasi dan kerjasama dalam pelatihan pengurangan risiko bencana, simulasi/gladi lapang, sosialisasi, dan bakti sosial; membuat sistem peringatan dini dan peta ancaman bencana.

Kata Kunci: Pemberdayaan. Masyarakat Siaga Bencana. Komunitas. Sleman

ABSTRACT

Efa Apriyani. D0109026. Thesis. Pre-Disaster Management Through Community Disaster Preparedness Empowerment with Community-Based in Sleman District. Department of Administration. Faculty of Social and Political Sciences. Sebelas Maret University. Surakarta

Indonesia has a severe impact on the occurrence of disaster. For this time, the disaster handling is priority on emergency response and post-disaster activities, while activities pre-disaster, which a step in anticipation of disaster, risk reduction is sometimes, overlooked. Sleman as one of the areas that are prone to disasters, from 2011 to date have focused on activities pre-disaster. Management pre-disaster being increased in Sleman is not only involving the subject but also an object with community empowerment and communities in Sleman. This research purposes to describe pre-disaster management through community disaster preparedness empowerment with community-based in Sleman District.

This research is qualitative research using the key informant of BPBD Sleman. The collecting data used interviews and documentation. The technique of determining informant used purposive and snowball sampling. Beside validity of data used triangulation of sources. Then, data analysis techniques used interactive analysis techniques.

The results of this study stated that in 2012 there were 32 hamlets in Sleman District that has done the community development, community-based disaster preparedness with the help of 37 communities. Sleman District Government in collaboration with community care disaster in empowerment activities to train and educate people into society and be knowledgeable of disaster anticipation of disaster. Pre-disaster management in this study uses the five priorities for action of Hyogo Framework for Action (HFA). The results showed that, based on community empowerment in Sleman district has been fulfilled the criteria of success empowering that are: the public interest, equal value, public services, communication, information, obstacles (settlement), networks, organization, expertise, harmonization. Achievement pre-disaster management through community empowerment, community-based disaster preparedness that has been done in Sleman such as disaster risk reduction training; learning communication and cooperation in disaster risk reduction training, simulation/rehearsal air, socializing, and social events; make early warning system and map the threat of disaster.

Keywords: Empowerment, Community Disaster Preparedness, Community, Sleman

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mencermati kondisi geografis, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana yang disebabkan oleh faktor alam. Hampir beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami banyak bencana besar yang menimpa di beberapa daerah, seperti gempa bumi dan tsunami yang melanda wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara pada tahun 2004 dan erupsi Gunung Merapi tahun 2010 lalu yang menunjukkan bahwa bencana yang akan terjadi siap mengancam semua sendi kehidupan. Dampak bencana seringkali menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda maupun beban psikologis bagi para korban.

Melihat banyaknya bencana yang telah terjadi di Indonesia selama ini, sudah seharusnya pemerintah dan masyarakat siap siaga pada ancaman bencana yang dapat terjadi kapan saja. Pemerintah sudah sewajarnya menyiapkan perencanaan dalam rangka pengurangan risiko bencana melalui berbagai upaya penanggulangan bencana. Segala upaya penanggulangan bencana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dimana dalam pasal 1 ketentuan umumnya disebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang

meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Lebih lanjut lagi dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dijelaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap yang meliputi: a. prabencana; b. saat tanggap darurat; dan c. pascabencana. Ketiga tahap tersebut merupakan serangkaian tahap manajemen bencana.

Tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana merupakan semua tahapan yang penting dalam kegiatan manajemen bencana. Namun, selama ini penanganan bencana lebih banyak diutamakan pada kegiatan tanggap darurat saat terjadi bencana dan kegiatan pascabencana berupa pemulihan daripada kegiatan prabencana berupa kesiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana. Kegiatan prabencana sebagai proses persiapan kesiapsiagaan terjadinya bencana terkadang dikesampingkan oleh pemerintah, masyarakat, maupun swasta, mereka kurang memikirkan langkah atau kegiatan yang perlu dilakukan dalam menghadapi bencana atau cara meminimalkan dampak bencana. Seluruh elemen masyarakat baru memikirkan ketika bencana telah terjadi, sehingga dampak yang ditimbulkan dari suatu bencana tentu lebih besar. Salah satu bukti nyata yang dapat kita lihat dari terkesampingkannya tahapan prabencana yaitu belum adanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Sleman saat erupsi Gunung Merapi yang terjadi pada Oktober-November 2010 lalu. Sleman yang sebagian besar wilayahnya terkena dampak langsung dari bencana

Merapi karena lokasinya yang tepat di kaki Gunung Merapi, sangat disayangkan Sleman saat itu tidak memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Tabel 1.1

Jumlah dan Kepadatan Penduduk Daerah Zona Ancaman Merapi

(Radius 15 Km dari kawah)

Kecamatan	Kabupaten	Jumlah Desa	Penduduk			Luas (Km2)	Kepadatan /Km ²
			L	P	Total		
Srumbung	Magelang	6	6,992	7,080	14,072	23.6	596.3
Dukun	Magelang	9	10,612	11,268	21,880	26.9	813.4
Sawangan	Magelang	3	5,863	5,959	11,822	13.0	909.4
Selo	Boyolali	7	9,364	9,765	19,129	35.6	539.1
Cepogo	Boyolali	4	5,065	5,026	10,091	13.4	753.1
Musuk	Boyolali	5	7,385	7,665	15,050	19.4	775.8
Kemalang	Klaten	8	10,257	10,897	21,154	38.9	543.8
Ngemplak	Sleman	3	17,682	18,251	35,933	23.5	1,529.1
Turi	Sleman	2	8,372	8,433	16,805	28.7	585.5
Pakem	Sleman	5	16,185	17,076	33,261	43.8	759.4
Cangkringan	Sleman	5	13,059	14,362	27,421	48.0	571.3
TOTAL		57	110, 836	115, 782	226, 618	314.7	720.1

Sumber: PODES 2008, Biro Pusat Statistik (dalam Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Merapi 2011-2013: 8)

Berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik pada tahun 2008 silam telah tergambarkan bahwa Kabupaten Sleman memiliki jumlah daerah dan kepadatan penduduk yang termasuk dalam zona rawan ancaman Merapi. Sewajarnya sebelum erupsi Merapi yang terjadi pada akhir tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Sleman sudah harus mempersiapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai badan yang berwenang mengoordinir terhadap penanggulangan bencana sehingga tahapan prabencana dapat terselenggara dengan baik karena ada lembaga daerah yang mengatur. Akhirnya melihat kondisi Sleman sebagai daerah rentan bencana, Sleman dituntut untuk membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah setelah erupsi Merapi 2010 lalu. Badan tersebut dibentuk sementara dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 34 Tahun 2010 tertanggal 1 Desember 2010 setelah erupsi Merapi terjadi. Kemudian diresmikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 54 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sleman membawa Kabupaten Sleman melangkah lebih maju dengan belajar dari pengalaman. Mulai tahun 2011 sampai dengan saat ini, Sleman tidak hanya berfokus pada rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca Merapi, melainkan Sleman telah memfokuskan kegiatan-kegiatan prabencana guna menghadapi

segala ancaman bencana tidak hanya ancaman Merapi saja. Kegiatan pada tahap prabencana sekarang ini telah mendapat perhatian serius oleh pemerintah Sleman, karena kegiatan tersebut sangat penting sebagai perencanaan untuk menghadapi bencana alam selanjutnya yang masih potensial terjadi. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sleman-lah yang memiliki peran utama dalam kegiatan tersebut. Dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 54 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sleman mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyelenggarakan mitigasi bencana dan kesiapsiagaan. Seksi Mitigasi Bencana sendiri mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengoordinasikan pencegahan dan mitigasi bencana, serta memiliki fungsi seperti pembinaan pencegahan dan mitigasi bencana; penyelenggaraan analisis, penyusunan, penetapan, dan penginformasian peta rawan bencana; pengembangan dan pemeliharaan sistem peringatan dini bencana; penyelenggaraan dan pengoordinasian upaya pengurangan risiko bencana; dan lain-lain. Sedangkan Seksi Kesiapsiagaan Bencana bertugas menyelenggarakan, membina, dan mengoordinasikan kesiapsiagaan dan peningkatan peran serta masyarakat, yang fungsinya antara lain penyelenggaraan dan pengoordinasian kesiapsiagaan bencana dan peningkatan peran serta masyarakat; pembinaan kesiapsiagaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana; peningkatan kapasitas masyarakat di kawasan rawan bencana melalui gladi lapang, simulasi, wajib

latih, dan sosialisasi penanggulangan bencana. Peran serta masyarakat sendiri telah diatur dalam peraturan bupati tersebut dan untuk mengefektifkan kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sleman sebagai unsur pelaksana bekerja sama dengan berbagai pihak yang diperjelas dalam pasal 22 Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana.

Belajar dari Sleman, saat ini setiap wilayah kabupaten atau kota di seluruh Indonesia mulai diwajibkan mempersiapkan tahapan prabencana dan diharapkan setiap daerah memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta peraturan daerah yang mengaturnya. Sleman sendiri telah mempersiapkan tahapan prabencana melalui pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat siaga bencana. Langkah pemberdayaan ditempuh sebagai paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat dengan menyadari pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal. Masyarakat siaga bencana sendiri merupakan masyarakat yang siap siaga dan selalu antisipasi terhadap ancaman bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Berdasarkan informasi yang didapatkan peneliti dari sebuah media internet, Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman Heru Saptono mengatakan bahwa dalam menerapkan mitigasi bencana, Pemerintah Kabupaten Sleman melaksanakannya melalui pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam upaya adaptasi serta antisipasi terhadap bencana alam (Attamami, 2012 dalam <http://jogja.antaranews.com/>).

**Tabel 1.2 Mitigasi Non Fisik Penanggulangan Bencana
di Kabupaten Sleman**

No	Program mitigasi non fisik	Volume	Lokasi	Hasil
1	Sosialisasi	20 pertemuan /tahun	kecamatan kawasan rawan bencana	Pengetahuan masyarakat tentang bencana semakin terbuka
2	Gladi Lapang	1 gladi /tahun	kecamatan kawasan rawan bencana	Meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan
3	Pelatihan SAR (<i>Search and Rescue</i>)	1 latihan /tahun	kecamatan kawasan rawan bencana	Meningkatkan kemampuan <i>assessor</i> , evakuator dalam menolong masyarakat rawan bencana
4	Dokumen Perencanaan Penanganan Bencana	1 dokumen /tahun	Dinas P3BA	<i>Hazard Map, Protap, Renop</i>
5	Pelatihan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana alam	2 kelas/tahun	Dinas P3BA	Pengetahuan masyarakat tentang bencana semakin komprehensif dan dapat mentransfer ilmu kepada orang lain

Sumber : Dinas P3BA, 2008 (dalam *Rencana Kontingensi Kabupaten Sleman 2009*)

Upaya-upaya penanggulangan bencana melalui kegiatan mitigasi bencana non-fisik (tahap prabencana) dengan melakukan pendekatan pada masyarakat sebenarnya telah disiapkan oleh Dinas P3BA (Pengairan Pertambangan dan Penanggulangan Bencana Alam) dari tahun 2008 seperti yang tergambarkan oleh data yang dimuat dalam Rencana Kontingensi Kabupaten Sleman 2009 silam. Kegiatan seperti sosialisasi dan pelatihan kesiapsiagaan terhadap bencana tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat guna mewujudkan masyarakat yang siaga akan bencana. Namun, kegiatan-kegiatan tersebut belum berjalan secara optimal, hal ini terlihat masih besarnya dampak erupsi Merapi akibat kurang pahamnya masyarakat terhadap upaya pengantisipasi risiko bencana.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menjelaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana (prabencana) meliputi: a. perencanaan penanggulangan bencana; b. pengurangan risiko bencana; c. pencegahan; d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan; e. persyaratan analisis risiko bencana; f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang; g. pendidikan dan pelatihan; dan h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Ada banyak kegiatan yang dapat dilakukan sebelum bencana (prabencana) melalui pemberdayaan masyarakat siaga bencana, di antaranya pendidikan peningkatan kesadaran bencana, latihan penanggulangan bencana, penyiapan teknologi tahan bencana, dan membangun sistem sosial tanggap bencana. Salah satu kegiatan prabencana yang telah dilakukan

Pemerintah Kabupaten Sleman yaitu merintis desa siaga bencana pada tanggal 24 Maret 2012 lalu di Desa Purwobinangun Kecamatan Pakem dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bencana. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh komunitas LAPBA (Linmas Anggota Peduli Bencana Alam) dan dibantu beberapa komunitas lainnya dengan melakukan pemberdayaan masyarakat pada kegiatan pelatihan evakuasi, pengungsian, sampai dengan penanganan dini bencana (Anwar, 2012 dalam <http://www.harianjogja.com/>). Kegiatan pemberdayaan masyarakat siaga bencana lainnya, yaitu terselenggaranya Wajib Latih Penanggulangan Bencana di Kecamatan Cangkringan selama tiga hari (23 April–25 April 2012) dengan peserta dari unsur kecamatan, desa, dukuh, dan komunitas peduli bencana yang berada di hulu sampai hilir Kali Gendol (<http://bpbd.slemankab.go.id/>).

Upaya kegiatan prabencana membutuhkan penguatan kelembagaan, baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta sebagai faktor kunci. Penguatan kelembagaan dalam bentuk kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, perencanaan tindakan gawat darurat, manajemen barak dan pelatihan evakuasi bencana bertujuan mewujudkan masyarakat siaga bencana yang berdaya sehingga dapat meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai penguat kegiatan prabencana tidak lagi berfokus pada lembaga formal saja, sekarang ini lembaga non-formal seperti organisasi-organisasi maupun komunitas-komunitas dari masyarakat mulai diikutsertakan dalam upaya penanggulangan bencana. Masyarakat mulai banyak terlibat pada

tahap kegiatan prabencana untuk membentuk masyarakat siaga bencana, sehingga masyarakat tidak hanya sebagai objek melainkan telah menjadi subjek atau pelaku.

Keterlibatan komunitas masyarakat dalam tahap prabencana tentu akan membantu terselenggaranya kegiatan prabencana dengan baik, dan pentingnya keterlibatan komunitas didukung dengan terselenggaranya konferensi nasional pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas yang berlangsung pada tanggal 5-8 Desember 2011 di Sleman. Konferensi tersebut dihadiri 125 peserta yang berasal dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Timur, Sulawesi Barat, Maluku Utara bahkan Papua (<http://www.slemankab.go.id/>). Hadimya komunitas masyarakat di Sleman dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat siaga bencana merupakan bagian dari manajemen prabencana yang sedang diutamakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. Beberapa komunitas telah ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan prabencana di Sleman untuk menciptakan masyarakat yang siaga akan bencana terutama komunitas peduli bencana. Komunitas peduli bencana Sleman tersebut diantaranya, KSM (Komunitas Siaga Merapi), Djiphatsong (Relawan Pemantau Sungai), RJT (Relawan Jogja Timur), FPB (Forum Peduli Bumi), Sambungroso, AMC (Argo Merapi Community), SKSB (Saluran Komunikasi Sosial Bersama), SAR Linmas (Search and Rescue Perlindungan Masyarakat),

SAR (Search and Rescue) Sleman, PMI (Palang Merah Indonesia), Tagana (Taruna Siaga Bencana) Sleman (<http://bpbd.slemankab.go.id/>). Pemerintah Kabupaten Sleman juga mulai melibatkan komunitas-komunitas lain seperti komunitas ibu-ibu PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), komunitas para petani, komunitas pelajar, dan masih banyak lagi komunitas lainnya.

Keterlibatan komunitas-komunitas tersebut diharapkan masyarakat siaga bencana dapat terbentuk di berbagai kalangan masyarakat di Kabupaten Sleman. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa peran serta masyarakat dapat dilakukan melalui kerjasama BPBD Sleman dengan berbagai pihak termasuk komunitas (organisasi kemasyarakatan) yang telah diatur dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana. Kegiatan pemberdayaan masyarakat siaga bencanapun diupayakan merata di seluruh lapisan masyarakat dengan dimulainya pengenalan masyarakat siaga bencana oleh perwakilan tiap-tiap komunitas. Keberlangsungan dari manajemen prabencana melalui pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas tersebut tidak bisa terlihat secara langsung prosesnya, perlu adanya pengkajian di lapangan karena diperlukan fakta kegiatan pemberdayaan yang dilakukan masyarakat.

Berdasarkan masalah manajemen prabencana yang terkadang terkesampingkan oleh sebagian besar lapisan masyarakat, peneliti menjadi tertarik pada kegiatan pemberdayaan masyarakat siaga bencana terutama dengan sistem berbasis komunitas. Oleh karena itu, peneliti berupaya mengkaji

dan menelaah kembali mengenai manajemen prabencana melalui pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas di Kabupaten Sleman sebagai daerah yang rawan bencana. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan upaya meminimalisir risiko bencana di seluruh wilayah Indonesia dan Sleman khususnya.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana manajemen prabencana melalui pemberdayaan masyarakat siaga bencana berbasis komunitas di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Operasional

Mendeskripsikan manajemen prabencana melalui pemberdayaan masyarakat siaga bencana berbasis komunitas di Kabupaten Sleman.

2. Tujuan Fungsional

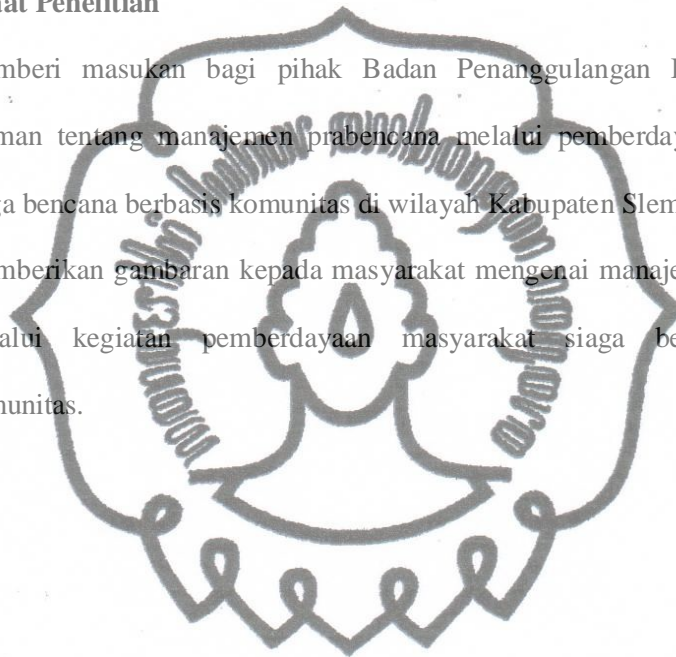
Memberikan sumbangan pemikiran kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Sleman dalam melakukan pemberdayaan masyarakat siaga bencana berbasis komunitas sebagai salah satu bentuk kegiatan manajemen prabencana di Kabupaten Sleman.

3. Tujuan Individual

Sebagai syarat peneliti untuk memenuhi gelar Sarjana pada Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberi masukan bagi pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sleman tentang manajemen prabencana melalui pemberdayaan masyarakat siaga bencana berbasis komunitas di wilayah Kabupaten Sleman.
2. Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai manajemen prabencana melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat siaga bencana berbasis komunitas.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

A. Manajemen Bencana

Penanggulangan bencana selalu melibatkan pembahasan mengenai tahapan prabencana, pada saat bencana, dan pascabencana yang semuanya termasuk dalam sebuah manajemen yaitu manajemen bencana. Dalam konteks tersebut, pengarusutamaan pengurangan risiko bencana harus menjadi prioritas sebagai upaya meminimalkan jatuhnya korban jiwa dan kerugian harta benda yang lebih besar. Paradigma penanggulangan bencana sudah dikembangkan dari yang dahulu berpola responsif tanggap darurat menjadi lebih ditekankan pada upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana, agar tercapai tujuan yaitu menghindari dampak terjadinya bencana. Pada dasarnya manajemen penanggulangan bencana menjadi bagian dari manajemen pembangunan. Penanggulangan bencana harus terkait dengan perubahan sikap dan tingkah laku sasaran pembangunan kesejahteraan sosial, yaitu seluruh masyarakat baik secara individu, kelompok maupun komunitas dan lingkungannya khususnya korban bencana.

Penanggulangan bencana bukan hanya sekedar suatu kegiatan yang bersifat reaktif atau dadakan ketika terjadi bencana, tetapi penanggulangan bencana merupakan bagian dari kegiatan pembangunan yang terkoordinasi yaitu koordinasi sejak perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian dan

pengawasan, serta koordinasi antara pelaksana antar instansi pemerintah dan antara instansi pemerintah dan masyarakat. Manajemen bencana secara teoritis oleh NFPA 1600 *Standard on Disaster/Emergency Management and Business Continuity Programs* (Ramli, 2010: 11) diartikan sebagai upaya sistematis dan komprehensif untuk menanggulangi semua kejadian bencana secara cepat, tepat, dan akurat untuk menekan korban dan kerugian yang ditimbulkannya. Nurjanah dkk (2012: 42) memperjelas bahwa, manajemen bencana (*disaster management*) adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bencana beserta segala aspek yang berkaitan dengan bencana, terutama risiko bencana dan bagaimana menghindari risiko bencana. Dalam mengantisipasi timbulnya bencana diperlukan sistem manajemen bencana melalui perencanaan dan pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia.

Manajemen bencana merupakan proses dinamis tentang bekerjanya fungsi-fungsi manajemen yang kita kenal selama ini misalnya fungsi *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* (Nurjanah dkk, 2012: 42). Manajemen itu sendiri merupakan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui suatu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Gibson, Donnelly, dan Ivancevich (1997: 4) mengartikan manajemen sebagai proses yang dilakukan oleh satu atau lebih individu untuk mengoordinasikan berbagai aktivitas lain untuk mencapai hasil-hasil yang tidak bisa dicapai apabila satu individu bertindak sendiri. Keempat fungsi manajemen yang disebutkan sebelumnya merupakan fungsi

manajemen gagasan George Terry yang digunakan juga dalam tiap pelaksanaan tahapan manajemen bencana (tahap prabencana, tahap saat terjadi bencana, tahap pascabencana):

1. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan (Terry dalam Syafie, Tandjung, & Modeong, 1999: 76). Perencanaan merupakan dasar dari semua fungsi manajemen yang paling mutlak. Perencanaan adalah pedoman dan penuntun arah kegiatan yang dibuat pada saat sekarang dan dilaksanakan pada masa yang akan datang. Perencanaan dibuat sebagai pedoman baku untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian ini meliputi penetapan tugas, pengelompokkan tugas-tugas ke dalam departemen dan alokasi bermacam-macam sumber daya dalam berbagai departemen, fungsi ini biasanya mengikuti perencanaan dan mencerminkan bagaimana organisasi mencoba menyelesaikan rencana itu (Daft, 2002: 9-10). Kegiatan ini membagi pekerjaan diantara anggota kelompok dan membuat ketentuan dalam hubungan yang diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

3. *Actuating* (Pelaksanaan)

Pelaksanaan kerja adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berkenan berusaha untuk mencapai sasaran agar sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi (Terry dalam Syafiie, Tandjung, & Modeong, 1999: 82). Fungsi manajemen yang satu ini akan berjalan baik bila pegawai diberi motivasi untuk meningkatkan prestasinya.

4. *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar (ukuran) (Terry dalam Syafiie, Tandjung, & Modeong, 1999: 86). Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang penting sebagai sarana menemukan umpan balik atas rencana yang telah dilaksanakan.

Kegiatan manajemen bencana sendiri merupakan kegiatan yang tidak berdiri sendiri, akan tetapi terkait dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat baik aspek sosial, ekonomi, budaya maupun aspek lainnya. Manajemen bencana merupakan suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana. Secara garis besar, manajemen bencana

terdiri dari tiga tahapan yaitu prabencana, tanggap bencana, dan pascabencana (membangun kembali masyarakat), seperti yang dikatakan Kerre dan Leornard (2011, vol.3, no.2: 167):

“Disaster management involves dealing with and avoiding risks. Disaster planning and emergency management involves preparing for disaster before it occurs, disaster response and supporting, and rebuilding society after natural or human-made disasters have occurred.”

Sependapat dengan Kerre dan Leornard, Ramli dalam bukunya yang berjudul Pedoman Praktis Manajemen Bencana (2010: 31) menjelaskan, manajemen bencana merupakan suatu proses terencana yang dilakukan untuk mengelola bencana dengan baik dan aman melalui 3 tahapan, yaitu:

1. Prabencana: kesiagaan, peringatan dini, mitigasi
2. Saat bencana: tanggap darurat
3. Pascabencana: rehabilitasi dan rekonstruksi

Arya (2003, dalam Nakagawa dan Shaw vol.22, no.1: 5) membagi manajemen bencana hanya menjadi dua bagian, kegiatan mitigasi dan respon, kegiatan mitigasi yang dimaksud merupakan kegiatan prabencana yang dimaksud oleh ahli lainnya dan Arya mengelompokkan rehabilitasi dan rekonstruksi ke dalam respon:

“Divided disaster management issues into two parts: Mitigation (Risk Analysis, Prevention and Preparedness) and Response (search and rescue, humanitarian assistance and rehabilitation and reconstruction). Risk Analysis includes hazard and vulnerability assessment and risk assessment; Prevention includes both structural and nonstructural measures; and Preparedness includes warning, planning and policy etc.”

Manajemen bencana merupakan proses mengelola bencana tidak bisa hanya dengan cara dadakan atau insidentil, tetapi harus dilakukan secara terencana dengan manajemen yang baik, jauh sebelum suatu bencana terjadi untuk mengatur maka diperlukan asas dan prinsip-prinsip yang mengatur penyelenggaraan tahap prabencana, saat bencana, pascabencana. Berdasarkan penjelasan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa penanggulangan bencana harus didasarkan pada asas-asas utama, sebagai berikut:

a. Kemanusiaan

Asas kemanusiaan termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga undang-undang ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Aspek manajemen bencana memiliki dimensi kemanusiaan yang tinggi. Penerapan manajemen bencana (prabencana, saat bencana, pascabencana) merupakan usaha mulia yang menyangkut aspek kemanusiaan untuk melindungi semua.

b. Keadilan

Asas keadilan merupakan setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali. Asas keadilan dalam penerapan manajemen bencana mengandung arti bahwa dalam penanggulangan bencana tidak boleh ada diskriminasi atau keberpihakan kepada unsur tertentu.

c. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Asas ini memiliki maksud bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Asas ini juga memiliki maksud agar semua pihak harus tunduk kepada perundangan yang berlaku dan taat asas yang ditetapkan (Ramli, 2010: 13).

d. Keseimbangan, keselarasan, dan keserasian

Penanganan bencana harus berasaskan keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam arti apapun program yang dikerjakan untuk mengatasi bencana harus memperhatikan keseimbangan alam, ekologis, sosial, budaya dan lingkungan hidup. Upaya manajemen bencana tidak berarti harus mengorbankan kepentingan yang lain atau aspek kehidupan yang telah dijalankan sehari-hari, namun menempatkannya sebagai kekuatan untuk membangun manajemen bencana (Ramli, 2010: 13).

e. Ketertiban dan kepastian hukum

Bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. Penerapan manajemen bencana harus berjalan secara tertib dan ada peraturan yang mengaturnya.

f. Kebersamaan

Salah satu aspek penting dalam manajemen bencana adalah kebersamaan. Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penanggulangan

bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

g. Kelestarian lingkungan hidup

Manajemen bencana juga harus memperhatikan aspek lingkungan hidup di sekitarnya. Asas ini mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

h. Ilmu pengetahuan dan teknologi

Asas ini memiliki maksud bahwa penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pascabencana.

Selain itu, berdasarkan penjelasan pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dijelaskan bahwa penanggulangan bencana juga didasarkan pada prinsip praktis yang mendukung asas utama, prinsip praktis tersebut yaitu:

a. Cepat dan Tepat

Prinsip cepat dan tepat ini memiliki maksud adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

b. Prioritas

Prioritas berarti apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

c. Koordinasi

Manajemen bencana memerlukan prinsip koordinasi, karena kegiatan penanggulangan bencana harus didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

d. Keterpaduan

Keterpaduan memiliki maksud bahwa kegiatan manajemen bencana (penanggulangan bencana) dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung satu sama lain.

e. Berdaya Guna dan Berhasil Guna

Kegiatan penanggulangan bencana harus berdaya guna dan berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

f. Transparansi

Transparansi berarti bahwa manajemen bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

g. Akuntabilitas

Akuntabilitas hampir memiliki maksud yang sama dengan transparan, bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilakukan secara terbuka dan dapat

dipertanggungjawabkan, namun untuk akuntabilitas pertanggungjawabannya harus secara etik dan hukum.

h. Kemitraan

Kegiatan penanggulangan bencana harus melibatkan berbagai pihak secara seimbang (Nurjanah dkk, 2012: 46).

i. Pemberdayaan

Dalam penanggulangan bencana dilakukan dengan melibatkan korban bencana secara aktif. Korban bencana hendaknya tidak dipandang sebagai obyek semata (Nurjanah dkk, 2012: 46).

j. Non Diskriminasi

Bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik.

k. Non Proletisi

Prinsip ini memiliki maksud bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Pada dasarnya semua asas-asas utama dan prinsip-prinsip praktis tersebut untuk mengatur keseluruhan tahapan dari manajemen bencana, termasuk yang akan digunakan untuk mengatur penyelenggaraan manajemen prabencana dalam penelitian ini.

B. Manajemen Prabencana

Manajemen prabencana merupakan tahapan pada kondisi sebelum terjadinya bencana. Pada tahap prabencana, manajemen risiko bencana dilakukan melalui pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan. Kegiatan dari tahapan manajemen prabencana selama ini kurang mendapat perhatian serius. Padahal, kegiatan tersebut sangat penting sebagai rencana menghadapi bencana alam selanjutnya yang masih potensial terjadi. Titik lemah dalam siklus manajemen bencana adalah pada tahapan prabencana. Kegiatan-kegiatan pada tahap prabencana merupakan satu langkah awal mengantisipasi bencana yang termasuk dalam manajemen penanggulangan bencana. Ada banyak kegiatan yang dapat dilakukan sebelum bencana (prabencana), di antaranya adalah pendidikan peningkatan kesadaran bencana, latihan penanggulangan bencana, penyiapan teknologi tahan bencana, membangun sistem sosial tanggap bencana, dan perumusan kebijakan penanggulangan bencana.

Kegiatan manajemen prabencana secara sederhana dapat diartikan sebagai cara-cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. Adanya manajemen prabencana akan mempermudah mengetahui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dari kegiatan-kegiatan dalam setiap langkah/tahap prabencana. Nurjanah dkk (2012: 47) mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan manajemen risiko bencana meliputi kegiatan pada tahap prabencana (situasi tidak terjadi bencana dan situasi terdapat potensi bencana). Secara umum manajemen

prabencana itu terdiri dari tiga bagian atau tiga tahapan yaitu kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana karena dalam ketiga tahapan tersebut sudah mencakup segala aktivitas yang dapat dilakukan sebelum bencana terjadi. Pendapat tersebut didukung dengan penjelasan Ramli (2010: 31) bahwa ruang lingkup manajemen prabencana berisi tahapan prabencana yang hanya meliputi:

1. Kesiagaan

Kesiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Kesiagaan atau kesiapsiagaan merupakan tahapan yang paling strategis karena sangat menentukan ketahanan anggota masyarakat dalam menghadapi datang suatu bencana.

2. Peringatan dini

Langkah ini diperlukan untuk memberi peringatan kepada masyarakat tentang bencana yang terjadi sebelum kejadian seperti banjir, gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, atau badai. Peringatan dini disampaikan dengan segera kepada semua pihak, khususnya mereka yang potensi terkena bencana akan kemungkinan datangnya suatu bencana di daerahnya masing-masing.

Peringatan didasarkan dari berbagai informasi teknis dan ilmiah yang dimiliki, diolah atau diterima dari pihak berwenang mengenai kemungkinan akan datangnya suatu bencana. Dengan adanya peringatan dini, anggota masyarakat mendapatkan informasi yang relevan sebagai langkah

untuk mempersiapkan diri dengan baik terhadap bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

3. Mitigasi Bencana

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2008, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana atau secara non-fisik. Mitigasi bencana adalah upaya untuk mencegah atau mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat suatu bencana. Mitigasi bencana dilakukan secara terencana dan komprehensif agar upaya penanggulangan bencana berjalan maksimal.

Kesiagaan, peringatan dini, dan mitigasi merupakan langkah-langkah dari perencanaan bencana. Perencanaan penanggulangan bencana ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya yang dalam penyusunannya dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Perencanaan penanggulangan bencana tersebut dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu. Ramli (2010: 33) menyarankan agar penanggulangan bencana dapat berjalan dengan baik dan sesuai rencana diperlukan upaya dan pendekatan dalam mitigasi bencana, yaitu:

a. Pendekatan Teknis

Mitigasi bencana secara teknis dilakukan untuk mengurangi dampak suatu bencana, misalnya membuat rancangan atau desain yang kokoh dari bangunan

sehingga tahan terhadap gempa; membuat material yang tahan terhadap bencana; dan membuat rancangan teknis pengaman seperti tanggul banjir atau tanggul lumpur.

b. Pendekatan Manusia

Pendekatan manusia bertujuan untuk membentuk manusia yang paham dan sadar mengenai bahaya bencana. Perilaku dan cara hidup manusia harus dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan potensi bencana yang dihadapinya.

c. Pendekatan Administrasi

Pemerintah atau pimpinan organisasi dapat melakukan pendekatan administratif dalam manajemen bencana, khususnya di mitigasi seperti:

- 1) penerapan kajian bencana untuk setiap kegiatan dan pembangunan industri berisiko tinggi;
- 2) mengembangkan program pembinaan dan pelatihan bencana di seluruh tingkat masyarakat dan lembaga pendidikan;
- 3) menyiapkan prosedur tanggap darurat dan organisasi tanggap darurat di setiap organisasi baik pemerintahan maupun industri berisiko tinggi.

d. Pendekatan Kultural

Masih adanya anggapan di kalangan masyarakat bahwa bencana itu adalah takdir sehingga harus diterima apa adanya, karena itu pemerintah perlu membuat pengendalian bencana disesuaikan dengan budaya lokal dan tradisi.

Sebaiknya pemerintah daerah setempat mengembangkan budaya lokal dan tradisi untuk membangun kesadaran bencana di tengah masyarakat.

Pendekatan-pendekatan dalam mitigasi bencana akan membantu pemerintah dalam melakukan perencanaan penanggulangan bencana. Kegiatan dalam perencanaan penanggulangan bencana merupakan tindakan agar masyarakat mengerti langkah yang akan dilakukan (tindakan preventif) apabila terjadi bencana. Dengan demikian, paradigma manajemen prabencana berarti penanggulangan bencana difokuskan pada pengenalan daerah rawan ancaman bencana dan pola perilaku individu/masyarakat yang rentan terhadap bencana.

Tingkat ketahanan daerah yang telah mencapai penyelenggaraan prabencana (pengurangan risiko bencana) dapat dianalisis dengan menggunakan *Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters* (www.unisdr.org/we/in/press). HFA ini merupakan hasil *World Conference on Disaster Reduction* pada tanggal 18-22 Januari 2005 di Kobe, Hyogo, Jepang. Penelitian ini mengadopsi lima prioritas aksi dari HFA dengan tujuan untuk membangun ketahanan masyarakat Sleman dan komunitas, karena Kerangka Kerja Aksi Hyogo dan lima area tindakan prioritasnya telah terbukti menjadi panduan yang berguna bagi pemerintah di negara maju dan berkembang dalam mencapai ketahanan terhadap bencana. Dan sebagai upaya pencapaian target strategi nasional 5 tahun ke depan, maka Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB) tahun 2010-2012 yang di dalamnya terdapat prioritas Kerangka Aksi

Hyogo (HFA) yang mengamanatkan bahwa seluruh negara diharapkan dapat menyusun suatu kebijakan khusus untuk pengurangan risiko bencana. Setiap daerah di Indonesia termasuk Sleman disarankan menggunakan HFA dalam memprioritaskan pengurangan risiko bencana karena merupakan prioritas komitmen global yang telah disepakati dunia. Kelima prioritas aksi HFA masing-masing dijabarkan kriteria pencapaiannya untuk melihat keberhasilan dari pengurangan risiko bencana, yaitu:

a. PRIORITAS AKSI I. Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana (PRB) merupakan sebuah prioritas nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat, terdapat kriteria kunci sebagai berikut :

1. Kapasitas sumber daya manusia yang ada bersedia menyusun untuk pemenuhan kebutuhan di masa mendatang saat terjadi bencana.
2. Pengalokasian sumber daya untuk penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, program-program, dan peraturan dalam upaya pengurangan risiko bencana.
3. Partisipasi Masyarakat, secara sistematis melibatkan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana termasuk dalam pengambilan keputusan di dalam proses pemetaan masalah, perencanaan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi, melalui pembentukan jejaring termasuk jejaring relawan, pengelolaan sumber daya yang strategis, penyusunan peraturan hukum dan pendelegasian otoritas.

b. PRIORITAS AKSI II. Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana serta menerapkan sistem peringatan dini, terdiri dari kriteria kunci sebagai berikut :

1. Tersedia sistem-sistem untuk mengembangkan, memperbarui dan menyebarluaskan peta risiko beserta informasi terkait (bahaya dan kerentanan).
2. Sistem kriteria penilaian risiko bencana dan ketahanan di pusat dan di daerah untuk membantu para pengambil keputusan dalam mengkaji dampak bencana.
3. Sistem peringatan dini termasuk petunjuk tindakan yang harus dilakukan pada saat ada peringatan dengan jangkauan ke masyarakat-masyarakat.
4. Penilaian risiko-risiko regional dengan mengumpulkan dan melakukan standarisasi data dan informasi statistik mengenai risiko, dampak dan kerugian bencana.

c. PRIORITAS AKSI III. Memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana pada semua tingkatan masyarakat, dengan kriteria kunci berikut ini:

1. Informasi risiko dan pilihan perlindungan bencana yang relevan dan mudah dipahami terutama untuk masyarakat di daerah berisiko tinggi.

2. Mengembangkan program-program pelatihan dan pembelajaran pengurangan risiko bencana pada sektor tertentu (perencanaan pembangunan).
3. Mempelopori pelatihan-pelatihan berbasis masyarakat dengan penekanan pada aturan-aturan bagi sukarelawan.
4. Strategi kesadaran publik dalam membangun budaya kesiapsiagaan bencana dan meningkatkan keterlibatan masyarakat.

d. PRIORITAS AKSI IV. Mengurangi faktor-faktor penyebab risiko bencana. Terdiri dari kriteria kunci sebagai berikut :

1. Penerapan pendekatan manajemen sumber daya alam dan lingkungan terpadu yang berhubungan dengan upaya pengurangan risiko bencana.
2. Adanya strategi melindungi dan memperkuat fasilitas-fasilitas publik (sekolah, rumah sakit, pembangkit listrik) agar tidak rentan terhadap bencana.
3. Penyusunan pedoman dan perangkat pengawasan pengurangan risiko bencana dalam konteks perencanaan pemanfaatan lahan.

e. PRIORITAS AKSI V: Memperkuat kesiapan menghadapi bencana pada semua tingkatan masyarakat agar respon yang dilakukan lebih efektif. Kriteria kuncinya adalah sebagai berikut:

1. Strategi penguatan kemampuan teknis dan kelembagaan dalam penanggulangan bencana regional, nasional dan lokal, termasuk yang

berhubungan dengan teknologi, pelatihan simulasi dan gladi, sumber daya manusia dan lain-lain.

2. Sistem dialog atau pertukaran informasi dan koordinasi antara lembaga-lembaga yang menangani peringatan dini, pengurangan risiko bencana, tanggap darurat, pembangunan, dan sebagainya pada semua tingkatan.
3. Rencana kesiapsiagaan bencana dan rencana siaga (*contingency*) tersedia dan siap di semua jenjang pemerintahan untuk mengembangkan program tanggap bencana.
4. Dibentuknya mekanisme khusus untuk menggalang partisipasi aktif dan rasa memiliki para pemangku kepentingan terkait termasuk masyarakat.

C. Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas

Dewasa ini, pemberdayaan masyarakat dianggap sebagai sebuah strategi pembangunan yang telah berkembang di seluruh dunia. Konsep pemberdayaan menyadari pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian dalam mengelola sumber daya serta memenuhi kebutuhannya. Seluruh elemen masyarakat perlu memperhatikan bahwa dalam pembangunan masa kini bukan hanya melihat rakyat sebagai objek atau sasaran yang harus diberdayakan, melainkan rakyat lebih ditekankan sebagai pelaksana dari suatu program pemberdayaan. Pemberdayaan bertujuan untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri dengan berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang

saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Gagasan pemberdayaan (*empowerment*) itu sendiri merupakan sentral bagi suatu strategi keadilan sosial dan HAM (Hak Asasi Manusia) serta menjadi pusat gagasan-gagasan kerja masyarakat (Ife dan Tesoriero, 2008: 130). Parsons (1994, dalam Suharto, 2005: 59), mengartikan makna pemberdayaan:

“Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain.”

Secara etimologis pemberdayaan berasal pada kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki kurang atau belum berdaya (Sulistiyani, 2004: 77).

Suwondo, Kana, dan Dirdjosanjoto (2002: 225) memaknai pemberdayaan sebagai suatu strategi dan usaha untuk mengembangkan peran rakyat dalam kegiatan pembangunan lewat kegiatan-kegiatan yang bersifat partisipatif dan demokratis. Pemberdayaan dianggap sebagai salah satu dasar dari pembangunan yang berpusat pada rakyat dengan meyakini pentingnya pembangunan melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan. Peran masyarakat

dalam lembaga kemasyarakatan dimana semua aspirasi mereka disalurkan merupakan wujud nyata dari memberdayakan mereka. Menurut Rappaport (1984, dalam Suharto, 2005: 59) pemberdayaan merupakan suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya.

Pemberdayaan juga dapat bermakna bahwa pembangunan harus didasarkan kepada kebutuhan, keinginan, perencanaan, dan kemampuan rakyat yang akan melaksanakan pembangunan (Korten 1981, dalam Suwondo, Kana, dan Dirdjosanjoto 2002: 225-226). Suharto (2005: 59-60) membuat suatu kesimpulan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan, sebagai proses dijelaskan bahwa pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (baik bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, maupun berpartisipasi dalam kegiatan sosial).

Mardikanto (2010: 21) menjelaskan bahwa secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk

melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan. Kemiskinan dan keterbelakangan merupakan permasalahan dalam pembangunan yang sangat kompleks, diperlukan upaya-upaya perbaikan kemampuan masyarakat dengan proses pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses oleh Hogan (dalam Rukminto Adi, 2008: 84) diartikan sebagai suatu proses yang relatif terus terus berjalan sepanjang usia manusia yang diperoleh dari pengalaman individu tersebut dan bukannya suatu proses yang berhenti pada suatu masa saja.

Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian *community development* (pembangunan masyarakat) dan *community-based development* (pembangunan yang bertumpu pada masyarakat), dan tahap selanjutnya muncul istilah *communit-driven development* yang diterjemahkan sebagai pembangunan yang diarahkan atau diistilahkan pembangunan yang digerakkan masyarakat (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2007: 75). Prijono dan Pranarka (dalam Mardikanto, 2010: 21) mengatakan bahwa dalam konsep pemberdayaan masyarakat, manusia adalah subjek dari dirinya sendiri. Dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia, penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Sementara itu, Sumodiningrat (dalam Mardikanto, 2010: 21) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang masyarakat tersebut miliki.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu bentuk dari konsep pembangunan yang digerakkan oleh masyarakat. Konsep pembangunan yang digerakkan oleh masyarakat didefinisikan sebagai kegiatan pembangunan yang diputuskan sendiri oleh warga komunitas dengan menggunakan sebanyak mungkin sumber daya setempat. Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007: 143) menjelaskan konsep pembangunan yang digerakkan oleh masyarakat ini telah merumuskan langkah-langkah untuk menjaga keberlanjutan prinsipnya dalam suatu kegiatan, dan untuk menjaga efektivitas dari pemberdayaannya, yaitu:

1. Iklim kelembagaan dan kebijakan

Aspek ini mengembangkan iklim yang menunjang pengambilan keputusan komunitas, dalam bentuk pengembangan kebijakan atau kelembagaan.

2. Investasi sesuai kebutuhan

Investasi ini harus sesuai dengan permintaan komunitas, kalau perlu komunitas dapat turut berinvestasi.

3. Mekanisme partisipasi

Mekanisme partisipasi tertuju pada peningkatan partisipasi warga dan keikutsertaan seluruh *stakeholder* dalam kegiatan yang sama.

4. Keikutsertaan sesuai gender dan status sosial

Dalam konsep pemberdayaan masyarakat, sebaiknya pihak yang selama ini termarginalkan diberikan porsi identifikasi dan diikutsertakan berpartisipasi.

5. Investasi pengembangan CBO (*Community-Based Organization*)

Upaya pengembangan kemampuan CBO, misalnya pelatihan yang dimaknai sebagai investasi yang akan menuai hasil dalam jangka panjang, terutama untuk menciptakan kemandirian.

6. Fasilitasi komunitas untuk informasi

Informasi menjadi input penting untuk memperoleh hasil keputusan yang sesuai dengan rumusan masalah yang sebenarnya.

7. Aturan sederhana dan insentif/hadiah yang kuat

Aturan sederhana akan mempermudah pelaksanaan dan insentif akan memberikan stimulus positif bagi *stakeholder* untuk melakukannya.

8. Desain kerja fleksibel

Desain ini harus sesuai dengan perubahan konteks ataupun lingkungan di sekitar kegiatan.

9. *Scaling up*

Hal ini dilakukan dengan melakukan pengelompokkan proyek, diikuti dengan pembentukan jaringan antar-CBO.

10. *Exit strategy*

Perumusan *exit strategy* ini bertujuan untuk mempersiapkan kemandirian menjadi penting sebagai perwujudan perencanaan yang rasional.

Suharto (2005: 67-68) mengatakan untuk pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dicapai dengan melalui penerapan pendekatan

pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan:

1. Pemungkinan, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
2. Penguatan, dimaksudkan sebagai pendekatan untuk memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya.
3. Perlindungan, yaitu dengan melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah.
4. Penyokongan, yaitu memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peran dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan, merupakan berupaya untuk memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Dengan demikian, pembinaan partisipasi atau pemberdayaan masyarakat ini dilakukan pembinaan masyarakat dengan memposisikan masyarakat tidak hanya sebagai objek, akan tetapi juga sebagai subjek sehingga masyarakat akan termotivasi, tumbuh rasa ikut memiliki, dengan jalan meningkatkan kesadaran, kemampuan, keinginan, dan kepedulian untuk mencapai suatu kemandirian masyarakat. Untuk melakukan suatu upaya pemberdayaan, diperlukan pendekatan-pendekatan dalam membentuk pelaksanaan proses dan mempercepat pencapaian tujuan dari suatu pemberdayaan.

Tidak hanya dengan pendekatan-pendekatan seperti yang dijelaskan di atas oleh Suharto, guna mencapai suatu pemberdayaan Ife dan Tesoriero (2008: 147-148) mengusulkan beragam strategi yang secara luas diklasifikasikan dengan judul-judul kebijakan dan perencanaan, aksi sosial dan politik, dan pendidikan dan penyadar-tahuan. Pemberdayaan melalui kebijakan dan perencanaan dicapai dengan mengembangkan atau mengubah struktur-struktur dan lembaga-lembaga untuk mewujudkan akses yang lebih adil kepada sumber daya atau berbagai layanan dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Pemberdayaan dengan aksi sosial dan politik menekankan pentingnya perjuangan dan perubahan politik dalam meningkatkan kekuasaan yang efektif. Pemberdayaan melalui pendidikan dan penyadar-tahuan menekankan pentingnya suatu proses edukatif dalam melengkapi masyarakat untuk meningkatkan keberdayaan mereka, pemberdayaan seperti ini memasukkan gagasan peningkatan kesadaran dan memberikan keterampilan masyarakat untuk bekerja

menuju perubahan yang efektif. Melihat strategi-strategi pemberdayaan yang ada tersebut, pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang akan diteliti merupakan bagian dari suatu strategi pemberdayaan melalui pendidikan dan penyadar-tahuan dimana masyarakat akan diberdayakan dengan diberikan pendidikan dan pelatihan mengenai upaya pengurangan risiko bencana guna mencapai masyarakat siaga bencana.

Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan oleh banyak kalangan, diantaranya pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pers, partai politik, lembaga donor, aktor-aktor masyarakat sipil, atau oleh organisasi masyarakat lokal sendiri seperti komunitas di dalam masyarakat. Birokrasi pemerintah tentu saja sangat strategis dalam melakukan pemberdayaan karena mempunyai banyak keunggulan dan kekuatan yang luar biasa ketimbang unsur-unsur lainnya dengan memiliki dana, aparat yang banyak, kewenangan untuk membuat kerangka legal, kebijakan untuk pemberian layanan publik, dan lain-lain. Peran pemerintah dalam pemberdayaan tentu tidak terlepas dari berbagai kalangan yang ada di dalam masyarakat. Seperti fokus dari pemberdayaan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah peran serta pemerintah yang akan dibantu oleh komunitas yang ada dalam masyarakat dalam melakukan suatu pemberdayaan. Terkait dengan upaya pemberdayaan pada level komunitas, Rothman (1995, dalam Rukminto Adi, 2008: 120) menggambarkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat melalui intervensi (keterlibatan) komunitas ini dapat

dilakukan melalui beberapa model (pendekatan) intervensi, seperti pengembangan masyarakat lokal, perencanaan dan kebijakan, dan aksi sosial.

Komunitas itu sendiri merupakan kelompok-kelompok yang merupakan bagian masyarakat lokal yang membentuk suatu perkumpulan sesuai dengan tujuannya masing-masing. Setiap komunitas memiliki visi dan misi ataupun tujuan yang berbeda dengan komunitas lainnya. Komunitas didefinisikan sebagai kelompok yang dibentuk dan dikelola oleh anggota masyarakat untuk saling menguntungkan mereka seperti yang dikatakan oleh Nakagawa and Shaw (2004, vol.22, no.1: 9), *'a community group is defined as a group formed and maintained by community members for their mutual benefit.'* Community berarti bahwa sekelompok orang-orang berinteraksi secara langsung, dilakukan secara intensif dan dengan berbagai cara (Sudarmo, 2011: 189).

Komunitas sering dinamakan dengan istilah masyarakat setempat. Masyarakat setempat merupakan anggota-anggota dari suatu kelompok, baik kelompok itu besar atau kecil yang hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang utama. Menurut Sudarmo (2011: 189), komunitas-komunitas merupakan bagian dari *good governance* sebab mereka bisa menangani masalah-masalah tertentu yang tidak bisa diatasi oleh individu yang bertindak sendirian oleh pasar (*market*) dan pemerintah (*state*). Lebih lanjut Sudarmo (2011: 190) mengatakan bahwa komunitas dapat memberikan sebuah kontribusi penting bagi *governance* termasuk media pemecah konflik dimana kontrak-kontrak pasar dan

sangsi-sangsi resmi pemerintah gagal karena informasi yang penting untuk merancang dan menegakkan pertukaran dan perintah tidak bisa secara efektif digunakan oleh *state* atau pihak lain diluar komunitas.

Japan International Cooperation Agency (JICA 2002, dalam Nakagawa dan Shaw, 2004, vol.22, no.1: 5) menyatakan bahwa suatu komunitas itu dapat menyarankan perlu adanya sinergisitas antara pemerintah dan masyarakat, *'the group suggested the importance of creating synergy between community and government for sustainable development'*. Komunitas bersifat konsisten dengan model-model pemberdayaan untuk perubahan, karena komunitas menyediakan suatu kerangka bagi masyarakat untuk mengambil keputusan yang efektif. Bell dan Newby (1971, dalam Ife dan Tesoriero, 2008: 191) mengatakan bahwa definisi komunitas sangat problematis, dan dari banyak definisi yang telah dikemukakan hanya sedikit yang memiliki kesamaan. Ife dan Tesoriero (2008: 191) menambahkan bahwa selanjutnya komunitas dimengerti sebagai bentuk organisasi sosial dengan lima ciri terkait berikut ini:

a. Skala manusia

Sebagai lawan dari struktur-struktur yang besar, tidak bersifat pribadi dan terpusat, komunitas melibatkan interaksi-interaksi pada suatu skala yang mudah dikendalikan dan digunakan oleh individu-individu. Jadi, skalanya terbatas pada orang yang akan saling mengenal atau dapat dengan mudah untuk saling berkenalan apabila diperlukan, dan adanya interaksi-interaksi sedemikian rupa sehingga mudah diakses oleh semua.

b. Identitas dan kepemilikan

Komunitas adalah lebih dari sekedar suatu kelompok yang dibentuk untuk kemudahan administratif tetapi memiliki beberapa ciri dari sebuah perkumpulan atau perhimpunan, ke dalam mana orang termasuk sebagai anggota dan di mana perasaan memiliki ini penting dan dengan jelas diakui. Sehingga, masuk ke dalam komunitas itu dapat memberikan rasa identitas kepada seseorang.

c. Kewajiban-kewajiban

Keanggotaan dari suatu komunitas membawa baik hak maupun kewajiban tertentu dari para anggotanya. Terdapat harapan bahwa orang akan berkontribusi kepada 'kehidupan komunitas' dengan berpartisipasi dalam paling sedikit beberapa kegiatan, dan bahwa akan berkontribusi kepada pemeliharaan struktur komunitas.

d. *Gemeinschaft*

Tonnies (1955, dalam Ife dan Tesoriero, 2008:37) menjelaskan bahwa dalam masyarakat *Gemeinschaft* orang berinteraksi dengan relatif sedikit orang yang mereka kenal dengan baik, dalam banyak peran yang berbeda. Sebuah komunitas akan memungkinkan orang berinteraksi dengan sesamanya dalam keragaman peran yang lebih besar, yang peran-peran tersebut kurang dibeda-bedakan dan tidak berdasarkan kontrak.

e. Kebudayaan

Suatu komunitas menyediakan sebuah kesempatan bagi suatu penangkal terhadap fenomena ‘kultur masal’. Suatu komunitas memungkinkan pemberian nilai, produksi dan ekspresi dari suatu kebudayaan lokal atau berbasis-masyarakat, yang akan mempunyai ciri-ciri unik yang berkaitan dengan komunitas yang bersangkutan dan akan mendorong baik keanekaragaman di antara komunitas maupun partisipasi yang lebar.

Komunitas dalam Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana termasuk dalam bagian organisasi kemasyarakatan, dijelaskan bahwa organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Peran-peran organisasi kemasyarakatan dalam Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 8 Tahun 2010 yaitu:

1. Organisasi kemasyarakatan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing organisasi kemasyarakatan.
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik-praktik non proletisi.

3. Organisasi kemasyarakatan berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.
4. Organisasi kemasyarakatan melakukan koordinasi dengan BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Penanggulangan bencana berbasis komunitas membutuhkan langkah terorganisir dan komitmen yang kuat. Persiapan bencana bertujuan mengurangi risiko, meminimalkan korban dan mengurangi penderitaan. Berdasarkan Modul Khusus Komunitas dan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) Penanggulangan Bencana yang dibuat oleh Departemen Pekerjaan Umum, penanggulangan bencana berbasis komunitas merupakan serangkaian aktivitas masyarakat (komunitas) pada saat sebelum, saat dan setelah bencana terjadi untuk mengurangi jumlah korban baik jiwa, kerusakan sarana/prasarana dan terganggunya kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup dengan mengandalkan sumber dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat. Pembangunan kemampuan penanggulangan bencana ditekankan pada peningkatan kemampuan masyarakat khususnya masyarakat pada kawasan rawan bencana, agar secara dini menekan bahaya tersebut.

Penanggulangan bencana berbasis komunitas juga merupakan upaya mengkolaborasikan penanggulangan bencana, sebagai upaya pemberdayaan antara masyarakat, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), swasta dan pemerintah. Pemberdayaan masyarakat dalam melakukan pengurangan risiko bencana juga dapat dilakukan melalui kerjasama pemerintah dengan komunitas

masyarakat, seperti melakukan peningkatan kapasitas masyarakat di kawasan rawan bencana melalui gladi lapang, simulasi, wajib latih, dan sosialisasi penanggulangan bencana. Upaya-upaya pemberdayaan dilakukan untuk membangun kondisi masyarakat yang mandiri terhadap bencana yang merupakan langkah pembangunan manajemen bencana. Subiyantoro (2010, vol.1 no.6: 9-16) menjelaskan bahwa "pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana adalah upaya penanggulangan bencana yang berbasiskan seluruh masyarakat dan bertumpu pada kemampuan sumber daya manusia setempat (*Community Based Disaster Management*)".

Terkait dengan pemberdayaan masyarakat, keberhasilannya dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan jenis politik (Suharto, dalam Mardikanto 2010: 337). Menurut Bartle (2007) dalam Modul Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat (cec.vcn.bc.ca/cmp/), ada 16 (enam belas) elemen atau kriteria kekuatan pemberdayaan masyarakat yang dapat digunakan untuk menilai proses pemberdayaan masyarakat agar suatu masyarakat atau organisasi atau komunitas menjadi lebih berdaya, yaitu:

1. Mendahulukan kepentingan umum: yaitu porsi dari, dan tingkat kemana, kesiapan individu mengorbankan kepentingan mereka sendiri untuk kepentingan seluruh masyarakat (seperti yang dipantulkan dalam tingkat kedermawanan, kemanusiaan individu, pengorbanan personal, kebanggaan masyarakat, saling mendukung, setia, peduli, persahabatan, persaudaraan).

2. Kesamaan nilai: tingkatan dimana anggota masyarakat membagi nilai, khususnya ide yang berasal dari anggota masyarakat yang menggantikan kepentingan anggota dalam masyarakat.
3. Layanan masyarakat: fasilitas dan layanan (seperti jalan, pasar, air minum, jalur pendidikan, layanan kesehatan), mereka memelihara (pemeliharaan dan perbaikan yang dapat dipercaya), kesinambungan, dan tingkat akses semua anggota masyarakat pada semua fasilitas dan layanan.
4. Komunikasi: dalam masyarakat, dan diantara mereka dan lingkungannya, komunikasi termasuk jalan, metode elektronika (seperti telepon, radio, televisi, internet), media cetak (koran, majalah, buku), jaringan kerja, bahasa yang dapat saling dimengerti, kemampuan tulis baca dan keinginan dan kemampuan berkomunikasi (yang dinyatakan secara bijaksana, diplomasi, itikad untuk mendengarkan dan membicarakan) secara umum.
5. Percaya diri: meskipun diekspresikan secara percaya diri dalam individual, seberapa banyak rasa percaya diri itu dibagikan diantara semua masyarakat?
6. Keterkaitan (politis dan administratif): suatu lingkungan yang mendukung perkuatan termasuk bersifat politis (termasuk nilai dan sikap pemimpin nasional, hukum dan legislatif) dan elemen administratif (sikap dari pegawai dan teknisi sipil, sebaik peraturan dan prosedur pemerintah), dan lingkungan hukum.

7. Informasi: Kemampuan untuk mengolah dan menganalisa informasi, tingkat kepedulian, pengetahuan dan kebijaksanaan yang ditemukan diantara individu dan dalam kelompok secara keseluruhan.
8. Rintangan (penyelesaian): pengembangan dan efektifitas pergerakan (perpindahan, pelatihan manajemen, munculnya kepedulian, rangsangan) ditujukan pada perkuatan masyarakat. Apakah sumber peningkatan amal dari dalam dan luar meningkatkan tingkat kebergantungan dan kelemahan masyarakat, atau apakah mereka menantang masyarakat untuk bertindak sehingga menjadi lebih kuat?
9. Kepemimpinan: pemimpin-pemimpin memiliki kekuatan, pengaruh, dan kemampuan untuk memindahkan masyarakat. Pemimpin yang paling efektif dan berkelanjutan adalah salah satu yang mengikuti keputusan dan keinginan masyarakat secara keseluruhan, mengambil peran yang memungkinkan dan memudahkan, pemimpin harus memiliki keahlian, kemauan, kejujuran dan beberapa karisma.
10. Jaringan kerja: ada kegunaan hubungan, potensi dan kebenaran, dalam masyarakat dan dengan yang lainnya di luar masyarakat.
11. Organisasi: tingkatan dimana anggota masyarakat yang berbeda melihat diri mereka sendiri sebagai masing-masing yang memiliki peran dalam mendukung keseluruhan (berbeda hanya menjadi kumpulan individu yang terpisah), termasuk integritas organisasi, struktur, prosedur, pengambilan

keputusan, proses, efektifitas, divisi tenaga kerja dan kelengkapan peran dan fungsi.

12. Kekuatan politik: tingkatan dimana masyarakat dapat berperan dalam pengambilan keputusan daerah dan nasional. Hanya sebagai individu yang memiliki kekuatan yang beragam dalam suatu masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kekuatan dan pengaruh yang beragam dalam daerah dan nasional.
13. Keahlian: kemampuan, wujud dalam individu, yang akan membawa pada organisasi masyarakat dan kemampuan mereka untuk menyelesaikan apa yang mereka ingin selesaikan, kemampuan teknis, kemampuan manajemen, kemampuan berorganisasi, kemampuan mengerahkan.
14. Kepercayaan: tingkat kepercayaan dari masing-masing anggota masyarakat terhadap sesamanya, khususnya pemimpin dan abdi masyarakat, dimana dalam hal ini merupakan pantulan dari tingkat integritas (kejujuran, ketergantungan, keterbukaan, transparansi, asas kepercayaan) dalam masyarakat.
15. Keselarasan: pembagian rasa kepemilikan pada pihak yang diketahui (contohnya kelompok yang menyusun masyarakat), meskipun setiap masyarakat memiliki divisi atau perbedaan (agama, kelas, status, penghasilan, usia, jenis kelamin, adat, suku), tingkat toleransi anggota masyarakat yang berbeda dan bervariasi antara satu dan lainnya dan

keinginan untuk bekerjasama dan bekerja bersama-sama, suatu rasa kesamaan tujuan atau visi, perataan nilai.

16. Kekayaan: tingkat pengendalian masyarakat secara keseluruhan (berbeda pada individu dalam masyarakat) terhadap semua sumber daya potensial dan sumber daya aktual, dan produksi dan penyaluran barang dan jasa yang jarang dan bermanfaat, keuangan dan non keuangan (termasuk sumbangan tenaga kerja, tanah, peralatan, persediaan, pengetahuan, keahlian)

Semakin banyak masyarakat yang memiliki setiap elemen atau kriteria di atas, semakin kuat masyarakat, semakin besar kemampuan yang dimilikinya, dan semakin berdaya mereka. Elemen atau kriteria keberhasilan pemberdayaan tersebut sangatlah penting dalam melihat keberhasilan program suatu pemberdayaan, karena elemen-elemen tersebut merupakan dasar untuk empat kegiatan yang berbeda, yaitu:

- a. Mendorong penguatan (pemberdayaan) masyarakat
- b. Merangsang peningkatan kemampuan organisasi (komunitas)
- c. Mengukur perkuatan masyarakat
- d. Mengukur perubahan kemampuan organisasi (komunitas)

D. Masyarakat Siaga Bencana

Salah satu strategi yang dikembangkan dalam mengurangi risiko bencana dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat adalah mendayagunakan potensi lokal masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mampu mengolah

potensinya sendiri untuk menumbuhkan budaya aman dalam masyarakat mandiri. Masyarakat harus siaga atau siap bertanggung jawab atas keselamatan diri mereka sendiri terhadap ancaman bencana seperti yang dikatakan Nakagawa dan Shaw (2004, vol. 22, no. 1: 5) :

“As a recent argument of the importance of civil society for community development explains, safety of a community should be the issue, which is discussed and determined by the community, since ultimately the community and individuals should be responsible for their own safety.”

Masyarakat yang bertanggung jawab pada keselamatan diri mereka akan menciptakan masyarakat yang tangguh akan bencana. Masyarakat tangguh bencana ini mengacu pada masyarakat yang mampu mengantisipasi dan meminimalisasi kekuatan yang merusak, melalui adaptasi. Mereka juga mampu mengelola dan menjaga struktur dan fungsi dasar tertentu ketika terjadi bencana.

Nakagawa dan Shaw (2004, vol. 22, no. 1: 5) kemudian melihat fakta setelah gempa di Kobe pada tahun 1995 di mana orang-orang dilibatkan ke dalam proses pemulihan bencana dan proses mitigasi bencana:

“Earthquake (popularly known as the Kobe Earthquake) of 1995 has indicated that solutions should be multi-disciplinary, and there should be clear links between technological solutions and social solutions. In this regard, the challenge for the developed and developing countries is shared: how to incorporate people and communities in the process of pre-disaster mitigation and/or post-disaster recovery initiatives.”

Proses pembelajaran dari gempa di Kobe tentu dapat dijadikan bagi seluruh negara di dunia dalam memberdayakan masyarakat pada proses penanggulangan bencana karena dapat menciptakan masyarakat yang siap siaga terhadap bencana.

Masyarakat siaga bencana merupakan suatu kondisi masyarakat yang memiliki kewaspadaan terhadap kejadian bencana alam, mengetahui jenis bencana yang berpotensi pada daerah atau wilayah yang ditempati, serta memiliki pengetahuan yang memadai mengenai bencana yang berpotensi tersebut (Wahyuni, 2012 dalam <http://zlywahyuni.blogspot.com/>).

Berdasarkan Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam Petunjuk Teknis Kampung Siaga Bencana (2011: 6), masyarakat siaga bencana yang tergabung dalam sebuah kampung siaga bencana adalah suatu wadah formal dalam rangka penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dengan menggunakan potensi dan sumber daya yang ada pada masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Kesiapsiagaan sendiri diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian. Pada tinjauan pustaka mengenai manajemen prabencana telah disebutkan oleh Ramli (2010: 31) bahwa kesiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat siaga bencana merupakan kondisi masyarakat yang siap untuk mengantisipasi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu dan keadaan masyarakat tersebut memiliki pengetahuan terhadap upaya penanggulangan bencana. Beberapa alasan pentingnya penanggulangan

bencana berbasis masyarakat,yaitu (Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2011: 8):

1. Penanggulangan bencana adalah tanggung jawab semua pihak, bukan pemerintah saja.
2. Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan, keselamatan dan keamanan dari bencana.
3. Masyarakat adalah sasaran pihak pertama yang langsung berhadapan dengan ancaman dan bencana. Karena itu kesiapan masyarakat menentukan besar kecilnya dampak bencana di masyarakat.
4. Masyarakat yang terkena bencana adalah pelaku aktif untuk membangun kembali kehidupannya.
5. Masyarakat meskipun terkena bencana mempunyai kemampuan yang bisa dipakai dan dibangun untuk pemulihan melalui keterlibatan aktif.
6. Masyarakat adalah pelaku penting untuk mengurangi kerentanan dengan meningkatkan kemampuan diri dalam menangani bencana.
7. Masyarakat yang menghadapi bencana adalah korban yang harus siap menghadapi kondisi akibat bencana.

Berdasarkan Pasal 13 dan 14 Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana, masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam

penyelenggaraan penanggulangan bencana dan masyarakat memiliki kewajiban, yaitu sebagai berikut:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan,
- b. keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. berperan aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. memberikan informasi kepada publik tentang penanggulangan bencana;
- e. memberikan informasi yang benar tentang data diri.

Dalam Modul Khusus Komunitas dan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) Penanggulangan Bencana yang dibuat oleh Departemen Pekerjaan Umum dipaparkan mengenai kelompok masyarakat siaga bencana terdiri dari semua unsur masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki dan dipilih dalam musyawarah. Tugas utama kelompok masyarakat adalah menyusun perencanaan untuk melakukan usaha-usaha pengurangan risiko bencana (prabencana), perencanaan tanggap darurat dan rehabilitasi, strukturnya yaitu:

- a. Koordinator untuk mengoordinasi dan mendukung kerja kelompok, menjadi juru bicara kelompok dan penghubung dengan instansi/organisasi lain.
- b. Kelompok Persiapan Bencana (prabencana), terdiri dari kriteria:
 1. Regu peringatan dini: mengkompilasi data kebencanaan (sejarah bencana, data dari BMG, Pusat Studi Bencana, Kesbanglinmas), bekerjasama dengan instansi deteksi dini dan menginformasikan kepada masyarakat

tanda bahaya atau tanda peringatan dini dari instansi lain, dan mengembangkan peringatan dini berdasarkan pengetahuan lokal.

2. Regu Pemetaan: mengumpulkan data ancaman, demografi untuk digunakan dalam penyusunan peta ancaman bencana, alur evakuasi dan rencana pengungsian.
3. Regu Pelatihan Kesiapsiagaan: melakukan identifikasi pelatihan kesiapsiagaan yang dibutuhkan masyarakat, sesuai dengan data ancaman bencana setempat.

c. Kelompok Tanggap Darurat

1. Regu Pertolongan Pertama, bertugas melakukan pertolongan pertama saat bencana terjadi. Dapat merupakan gabungan anggota masyarakat dan Palang Merah Indonesia.
2. Regu SAR, bertugas melakukan pencarian korban, menolong korban dan pemilahan korban berdasarkan kondisinya.
3. Regu Penilaian Cepat, bertugas mengkaji secara cepat seperti menilai kerugian, mendata jumlah korban (jiwa, luka), akses pasar, air bersih dan ketersediaan pangan.
4. Regu Pengungsian, bertugas mendirikan Posko untuk menampung bantuan kemanusiaan, mempersiapkan fasilitas pengungsian serta perkiraan kebutuhan pengungsian berkaitan dengan jumlah pengungsi dan kerentanan pengungsi.

5. Regu Dapur Umum, bertugas mempersiapkan kebutuhan makan dan minum bagi pengungsi, ketersediaan peralatan dapur dan bahan pangan, memberikan masukan kepada posko tentang kebutuhan makan dan minum pengungsi.
 6. Regu Logistik, bertugas menyimpan, mencatat dan mengeluarkan persediaan logistik pengungsian.
- d. Kelompok Administrasi dan Komunikasi
1. Regu Administrasi, bertugas melaksanakan pencatatan, penyimpanan dokumen, memperbanyak dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.
 2. Regu Hubungan Luar, bertugas melakukan pembaruan data dan diisi di media yang mudah dilihat masyarakat, mengelola komunikasi dengan pihak lain baik pemerintah, swasta, relawan dan donatur.
- e. Kelompok Pemulihan bertugas :
1. Mendata kebutuhan pemulihan dan sumber daya yang ada.
 2. Memfasilitasi musyawarah untuk menentukan prioritas pemulihan berdasarkan sumber daya yang ada.

Adanya pembagian kelompok masyarakat siaga bencana tersebut mempermudah pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan pemberdayaan dalam upaya penanggulangan bencana (manajemen bencana). Masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan sebelum terjadinya bencana (prabencana) merupakan kelompok persiapan bencana, yang terdiri dari regu peringatan dini, regu

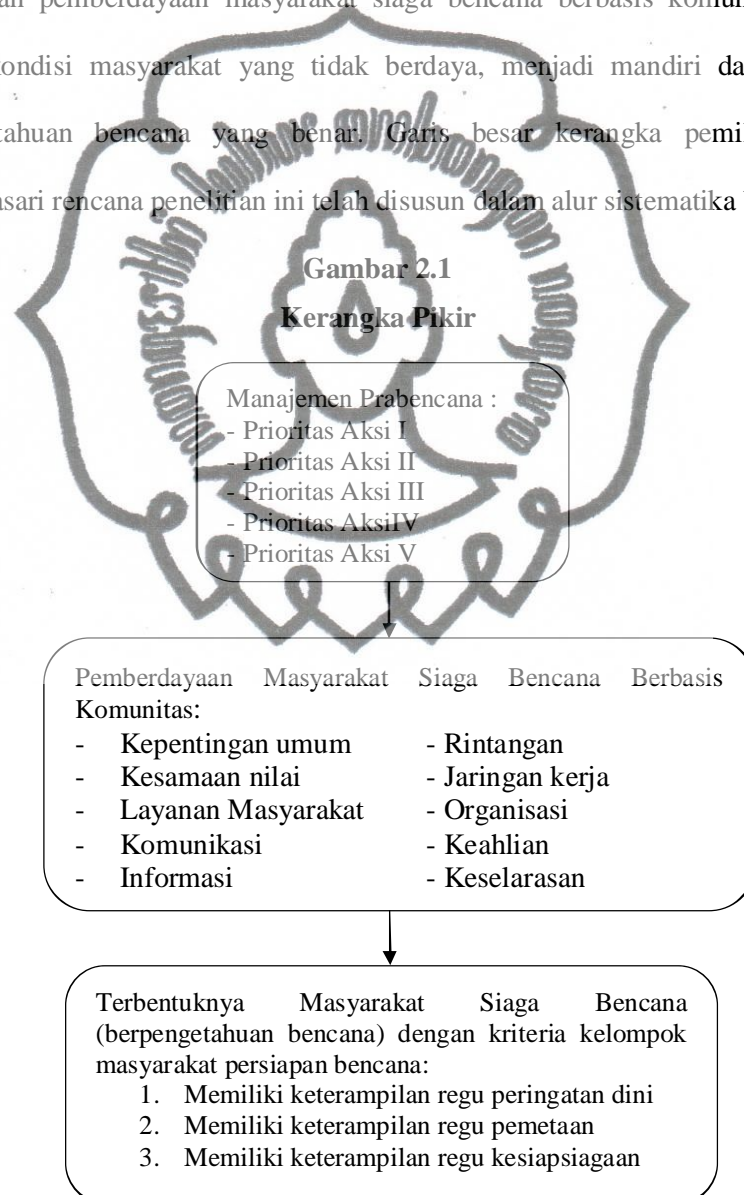
pemetaan, dan regu pelatihan kesiapsiagaan. Pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan pemberdayaan pada kelompok persiapan bencana akan membantu membentuk masyarakat yang siap mengantisipasi dampak bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Masyarakat yang berada pada kelompok persiapan bencana diberdayakan dengan tugas-tugas yang diarahkan pada pelatihan dan penginformasian bencana guna mewujudkan masyarakat siaga bencana.

E. Kerangka Pikir

Prabencana merupakan salah satu tahap dari manajemen bencana yang sering terlupakan oleh masyarakat. Pemahaman masyarakat terhadap kegiatan prabencana (sebelum terjadi bencana) masih sangat kurang. Manajemen prabencana diperlukan sebagai langkah untuk mengantisipasi dan meminimalisir risiko bencana. Manajemen prabencana dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman lima prioritas aksi *Hyogo Framework for Action*. Pemerintah Kabupaten Sleman menyadari bahwa Sleman sebagai daerah rawan bencana Gunung Merapi dan bencana lainnya yang dapat terjadi kapan saja, sehingga pemerintah beranggapan perlu adanya upaya mengefektifkan kegiatan-kegiatan manajemen prabencana.

Pemerintah Kabupaten Sleman berupaya meningkatkan tindakan pencegahan terhadap dampak bencana yang dapat merugikan seluruh sektor kehidupan. Salah satu upaya manajemen prabencana di Sleman dengan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas untuk membentuk

masyarakat siaga bencana. Secara umum pelaksanaan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas dinyatakan berhasil atau tidak dapat dilihat dengan kriteria pemberdayaan yang ada. Proses perubahan yang diharapkan terjadi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat siaga bencana berbasis komunitas adalah dari kondisi masyarakat yang tidak berdaya, menjadi mandiri dan memiliki pengetahuan bencana yang benar. Garis besar kerangka pemikiran yang mendasari rencana penelitian ini telah disusun dalam alur sistematisa berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena sosial mengenai manajemen prabencana yang dilakukan melalui bentuk pemberdayaan berbasis komunitas menuju masyarakat siaga bencana dengan lebih mendalam. Mayer dan Greenwood (Silalahi, 2010: 27) menjelaskan ‘deskripsi kualitatif semata-mata mengacu pada identifikasi sifat-sifat yang membedakan atau karakteristik sekelompok manusia, benda, atau peristiwa’. Penelitian deskriptif itu sendiri bertujuan menggambarkan atau mendeskripsikan secara cermat karakteristik dari suatu gejala Silalahi (2010: 28).

Bagdon dan Taylor (dalam Moleong, 2004: 3) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Sehingga, penelitian ini mendeskripsikan fenomena pemberdayaan masyarakat siaga bencana berbasis komunitas menggunakan data kualitatif berupa kata-kata/lisan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman yang beralamat di Jalan Candi Gebang No. 1, Berani, Tridadi, Sleman.

Lokasi untuk mendapatkan informan pendukung yaitu di Tagana (Taruna Siaga Bencana) Sleman sebagai salah satu komunitas peduli bencana di Sleman dan Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman (desa siaga bencana). Adapun pertimbangan yang melandasi dipilihnya lokasi tersebut, yaitu:

1. Lokasi tersebut merupakan lokasi yang dianggap tepat dan sesuai untuk melakukan penelitian serta mengumpulkan berbagai jenis data yang dibutuhkan oleh peneliti untuk mendapatkan sumber informasi mengenai proses kegiatan manajemen prabencana melalui pemberdayaan masyarakat siaga bencana berbasis komunitas.
2. Tagana Sleman dan Desa Argomulyo dijadikan sebagai lokasi mendapatkan triangulasi data untuk meningkatkan validitas data dari BPBD Sleman.
3. Pemilihan Tagana Sleman dengan alasan bahwa Tagana Sleman merupakan komunitas peduli bencana yang ikut terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan BPBD Sleman dan salah satunya dalam pemberdayaan di Desa Argomulyo pada tanggal 3 Desember 2012. Tagana Sleman juga sebagai komunitas resmi dibawah Dinas Sosial Kabupaten Sleman.
4. Pemilihan Desa Argomulyo dengan alasan bahwa desa ini merupakan salah satu desa siaga bencana yang sudah efektif dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat siaga bencana.

C. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata yang diamati, wawancara atau tindakan, selebihnya adalah sumber data tambahan seperti dokumen, arsip, dan lain-lain. Data utama diperoleh dari para informan yang terlibat secara langsung dalam kegiatan yang menjadi fokus penelitian dan yang mengetahui data tersebut. Sumber data utama dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara secara langsung dari sumber yang dianggap mengetahui informasi mengenai manajemen prabencana melalui pemberdayaan masyarakat siaga bencana berbasis komunitas, yaitu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sleman sebagai informan kunci (*key informant*) dan informan pendukung yaitu Sekertaris Posko Tagana Sleman (Taruna Siaga Bencana) serta perwakilan masyarakat Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman. Sumber data tambahan dalam penelitian ini didapatkan dari buku referensi, literatur, media massa, internet, serta data-data pendukung yang berasal dari Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sleman.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data untuk memperoleh data yang tepat, antara lain:

1. Wawancara

Dalam penelitian ini, telah dilakukan wawancara dengan informan yang telah dipilih. Wawancara pertama dilakukan kepada Kepala Bidang

Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sleman. Wawancara kedua dilakukan kepada Sekertariat Posko Tagana Sleman, Tagana Sleman merupakan salah satu komunitas peduli bencana yang ada pada data BPBD Sleman. Terakhir, wawancara ketiga dilakukan pada perwakilan masyarakat Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman (desa siaga bencana yang dibentuk BPBD Sleman).

Proses wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan terlebih dahulu menyusun kerangka atau pedoman wawancara yang kemudian digunakan peneliti sebagai acuan sehingga memudahkan dalam melakukan kegiatan wawancara. Wawancara dilakukan dengan cara yang tidak terstruktur (tidak formal) untuk menggali data dan informasi sebanyak-banyaknya dan selengkap-lengkapya terkait keterlibatan komunitas peduli bencana dalam kegiatan pemberdayaan menuju masyarakat siaga bencana sebagai wujud dari manajemen prabencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan melalui pengambilan data-data berupa dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan manajemen prabencana melalui pemberdayaan masyarakat siaga bencana berbasis komunitas yang didapatkan dari Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sleman. Selain itu, peneliti juga mengambil dokumentasi dari segi teoritis melalui studi kepustakaan, sumber internet, dan dokumen hasil penelitian terdahulu.

Dokumen-dokumen tersebut digunakan untuk meningkatkan validitas data sehingga penyajian dan pendeskripsian masalah bisa dilakukan secara baik.

E. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan teknik *snowball sampling*. Dalam teknik *purposive sampling*, sampel ditentukan dengan memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang tepat (Susanto, 2006: 120). Teknik *snowball sampling* digunakan jika informan kunci mengidentifikasi informan (sampel) lain sebagai informan yang dianggap dapat memberikan informasi penelitian, karena informasi dari informan sebelumnya dianggap belum lengkap oleh peneliti atau informan sebelumnya dianggap belum mengetahui informasi yang dibutuhkan peneliti. Informan yang dijadikan sebagai sarana pengumpulan data serta informasi dalam penelitian ini adalah:

1. Informan kunci (*key informant*), yaitu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sleman. Hal itu dikarenakan peneliti menganggap Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sleman mengetahui informasi utama terkait dengan manajemen prabencana melalui pemberdayaan berbasis komunitas di Kabupaten Sleman.
2. Sekretaris Posko Tagana Sleman sebagai perwakilan komunitas peduli bencana, menjadi informan pendukung pertama yang terkait dengan fokus

penelitian. Dalam penelitian di Tagana Sleman, teknik *snowball sampling* telah digunakan karena pada awalnya peneliti menunjuk Ketua Forum Tagana Sleman untuk wawancara, namun informan dialihkan kepada Sekretaris Posko Tagana Sleman yang dianggap lebih memahami informasi mengenai pemberdayaan masyarakat siaga bencana berbasis komunitas.

3. Perwakilan masyarakat Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman (desa siaga bencana) sebagai informan pendukung kedua penelitian ini.

F. Validitas Data

Untuk meningkatkan validitas data, maka dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi. Pengertian teknik triangulasi menurut Moleong (2004: 330) adalah 'teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian'. Denzin (dalam Moleong, 2004), membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber data, metode, penyidik, dan teori.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber data. Norman K. Denkin (dalam <http://mudjiarahardjo.com>) mengartikan triangulasi sumber data sebagai suatu teknik menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara, peneliti bisa menggunakan dokumen tertulis, arsip, dokumen

sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.

G. Teknik Analisis Data

Mengacu pada jenis penelitian dalam penelitian ini yang merupakan penelitian deskriptif kualitatif, maka peneliti menggunakan teknik analisis data interaktif menurut Miles & Huberman (Sutopo, 2006: 92). Teknik analisis data tersebut terdiri dari tiga komponen utama, yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi dari semua jenis informasi yang tertulis lengkap dalam catatan lapangan (*fieldnote*). Proses reduksi berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian. Bahkan reduksi data bisa dinyatakan sudah diawali sebelum pengumpulan data di lapangan. Proses reduksi ini berlangsung terus menerus secara berkelanjutan sampai laporan akhir penelitian siap untuk disusun.

2. Sajian data

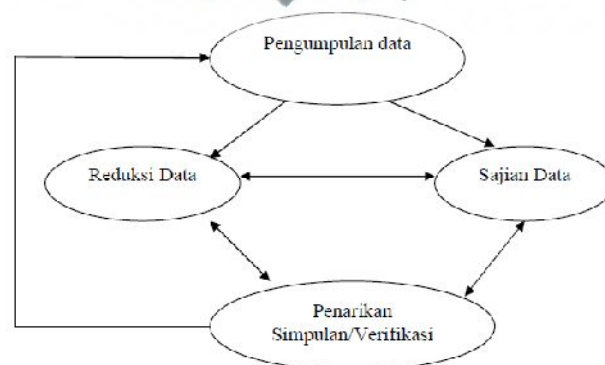
Sajian merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi lengkap yang untuk selanjutnya memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian data ini disusun berdasarkan pokok-pokok yang terdapat dalam reduksi data, dan disajikan dengan menggunakan kalimat dan bahasa peneliti yang merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga akan mudah dipahami.

3. Penarikan simpulan

Tahapan terakhir dalam teknik analisis data interaktif adalah penarikan simpulan. Pada tahap ini peneliti akan melakukan generalisasi dari hasil reduksi data yang kemudian disajikan secara logis dan sistematis.

Gambar 3.1

Skema Model Analisis Interaktif



Sumber : H.B. Sutopo (2006:120).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman

a. Sejarah Singkat Pembentukan BPBD Kabupaten Sleman

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011. Peraturan daerah ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Sleman, tertanggal 22 Desember 2011. Sebelumnya, OPD yang menangani penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana adalah Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana (Bakesbanglinmas dan PB) Kabupaten Sleman.

Secara resmi BPBD Sleman baru efektif berjalan mulai 30 Desember 2011 yang ditandai dengan pelantikan kepala pelaksana BPBD, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang dan para pejabat eselon IV oleh Bupati Sleman, Drs. H. Sri Purnomo, M.Si. Kepala Pelaksana BPBD Sleman yang pertama dijabat oleh Drs. H. Urip Bahagia yang sebelumnya menjabat Kepala Bakesbanglinmas dan PB Sleman. Sesuai dengan terbitnya Peraturan

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, OPD Pemerintah Kabupaten Sleman ditata kembali agar sesuai dengan PP tersebut. Penataan ini dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Sleman tertanggal 4 Agustus 2009. Berdasarkan peraturan daerah tersebut, penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana diemban oleh Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sleman. Selanjutnya, barulah BPBD Sleman berdiri yakni dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 seperti yang telah dijelaskan diawal.

b. Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kabupaten Sleman

BPBD Kabupaten Sleman merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala badan yang dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. BPBD Kabupaten Sleman memiliki tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana. Dalam penyelenggaraan tugas tersebut BPBD Kabupaten Sleman mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana
- 2) Pelaksanaan tugas bidang penanggulangan bencana
- 3) Pembinaan dan pengembangan penanggulangan bencana

4) Pengoordinasian, pengkomandoan, pengendalian, dan fasilitasi penanggulangan bencana

5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

c. Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Sleman

Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Sleman merupakan salah satu bentuk struktur birokrasi yang mempunyai 4 lapis (layer) satuan organisasi, yaitu Kepala Badan (Layer 1); Unsur Pengarah dan Kepala Pelaksana (Layer 2); Sekretariat, Bidang UPT Pemadam Kebakaran dan Kelompok Jabatan Fungsional (Layer 3); serta Sub Bagian dan Seksi (Layer 4). Berikut ini merupakan tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam struktur organisasi BPBD Sleman:

1) Unsur Pengarah

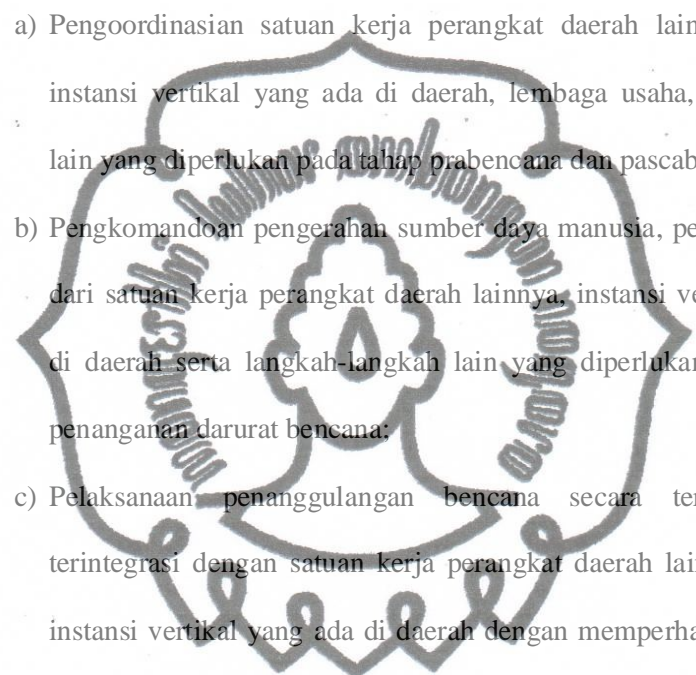
Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penanggulangan bencana. Unsur Pengarah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan penanggulangan bencana;
- b) Pemantauan penanggulangan bencana; dan
- c) Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

2) Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana membantu kepala badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sehari-hari, yang mempunyai tugas melaksanakan

penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana secara terintegrasi. Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 
- a) Pengoordinasian satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pascabencana;
 - b) Pengkomandoan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
 - c) Pelaksanaan penanggulangan bencana secara terkordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unsur pelaksana terdiri dari:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana kerja Sekretariat;

- b) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c) Penyelenggaraan urusan umum BPBD;
- d) Penyelenggaraan urusan kepegawaian BPBD;
- e) Penyelenggaraan urusan keuangan BPBD;
- f) Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi BPBD;
- g) Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah;
- h) Penyelenggaraan pusat data dan informasi kebencanaan;
- i) Pengoordinasian penyusunan laporan penanggulangan bencana;
- j) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi BPBD;
- k) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat.

Sekretariat terbagi menjadi tiga subbagian, yaitu subbagian umum dan kepegawaian; subbagian keuangan; serta subbagian perencanaan dan evaluasi:

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian menjalankan tugas dalam menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian.

2) Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan menyelenggarakan tugas dalam urusan yang berkaitan dengan keuangan.

3) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan dan evaluasi.

2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan memiliki tugas menyelenggarakan, membina, dan mengkoordinasikan mitigasi bencana dan kesiapsiagaan. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan;
- c) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian mitigasi bencana;
- d) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian kesiapsiagaan bencana;
- e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Penanganan Prabencana dan Pascabencana.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu:

1) Seksi Mitigasi Bencana

Seksi Mitigasi Bencana mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengkoordinasikan pencegahan dan mitigasi bencana.

2) Seksi Kesiapsiagaan

Seksi Kesiapsiagaan memiliki tugas menyelenggarakan, membina, mengoordinasikan kesiapsiagaan; peningkatan peran masyarakat.

3. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi dan logistik. Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- b) Penyiapan perumusan kebijakan teknis kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi dan logistik;
- c) Penyelenggaraan dan pengoordinasian kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana;
- d) Penyelenggaraan dan pengoordinasian penanganan pengungsi dan logistik bencana; dan
- e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari dua seksi, yaitu:

1) Seksi Kedaruratan dan Operasional Penanggulangan Bencana

Seksi Kedaruratan dan Operasional Penanggulangan Bencana memiliki tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana.

2) Seksi Penanganan Pengungsi dan Logistik Bencana

Seksi Penanganan Pengungsi dan Logistik Bencana mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan penanganan pengungsi dan penyediaan logistik penanggulangan bencana.

4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan rehabilitasi dan rekonstruksi. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c) Penyelenggaraan dan pengoordinasian rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi terdiri dari:

1) Seksi Rehabilitasi

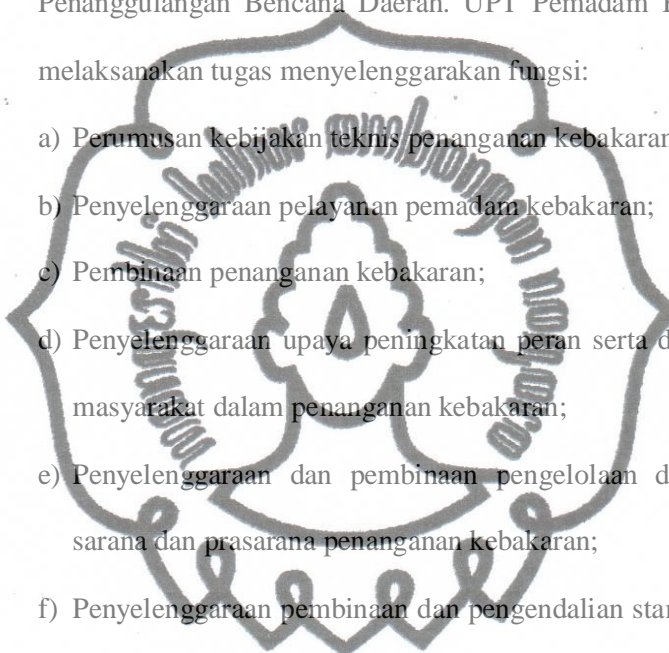
Seksi rehabilitasi memiliki tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan rehabilitasi.

2) Seksi Rekonstruksi

Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan rekonstruksi.

5. Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan Penanggulangan Bencana Daerah. UPT Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 
- a) Perumusan kebijakan teknis penanganan kebakaran;
 - b) Penyelenggaraan pelayanan pemadam kebakaran;
 - c) Pembinaan penanganan kebakaran;
 - d) Penyelenggaraan upaya peningkatan peran serta dan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanganan kebakaran;
 - e) Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan kebakaran;
 - f) Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian standar kelengkapan sarana dan prasarana bangunan gedung dalam penanganan kebakaran; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran memiliki dua subbagian, yaitu:

1) Subbagian Tata Usaha UPT Pemadam Kebakaran

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

2) Kelompok Jabatan Fungsional UPT Pemadam Kebakaran

Kelompok Jabatan Fungsional UPT Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala UPT melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan keahlian, jenis, dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

d. Saran/Prasarana BPBD Kabupaten Sleman

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman memiliki sarana/prasana yang dibutuhkan dalam kegiatan kebencanaan, antara lain:

Tabel 4.1

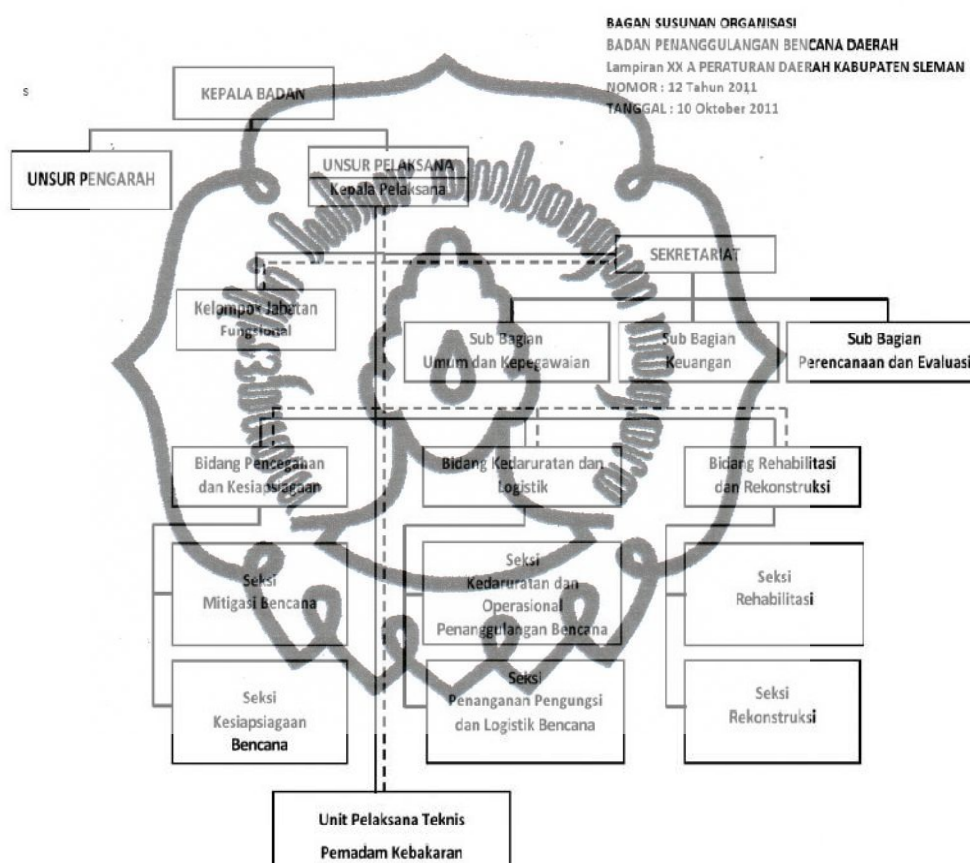
Sarana/Prasana BPBD Sleman dalam Penanggulangan Bencana

No.	Sarana/Prasarana	Jumlah
1.	Mobil	3 unit
2.	Mobil Pemadam Kebakaran	3 unit
3.	Sepeda Motor	10 unit
4.	Repeater	1 unit
5.	Handy Talky	15 unit
6.	Megaphone	5 unit
7.	Senter Besar	4 unit
8.	Papan Data	1 unit
9.	Peta	5 unit
10.	Kamera	2 unit
11.	Telepon-faks (PABX dan PSTN)	9 unit
12.	Computer	8 unit

Sumber: Data BPBD Sleman

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sleman



Keterangan:

——— Garis komando : garis wewenang/perintah yang tanpa putus, yang membentang dari puncak [organisasi](#) ke eselon paling bawah dan menjelaskan siapa bertanggung jawab kepada siapa.

----- Garis koordinasi : garis yang menunjukkan hubungan kerja atau koordinasi antar unit atau sub unit organisasi yang ada.

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011

2. Gambaran Umum Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Sleman

a. Profil Taruna Siaga Bencana Sleman

Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Sleman adalah sebuah komunitas atau organisasi non-formal kepemudaan yang bergerak dalam bidang sosial dan kemanusiaan yang berada dibawah naungan Departemen Sosial. Taruna Siaga Bencana mempunyai peranan penting untuk menangani bencana alam secara cepat dan menyelamatkan korban akibat bencana alam tersebut. Tagana Sleman pada hakekatnya adalah wadah berhimpunnya seluruh kekuatan komponen penanggulangan bencana berbasis masyarakat khususnya dari unsur generasi muda di Sleman. Kata-kata Taruna memiliki arti generasi muda, dan kata Siaga memiliki arti segala upaya kesiapsiagaan dalam kondisi apapun dan kata Bencana adalah tantangan dan masalah yang harus diselesaikan.

Tujuan dari Tagana adalah untuk memproses serta merubah manusia sebagai alat untuk mencapai hasil akhir yang bersifat sosial. Selanjutnya yang menjadi sasaran sekaligus juga sebagai masukan dan keluaran utama organisasi/komunitas peduli bencana ini adalah manusia. Mengingat tujuannya yang beraneka ragam, maka komunitas pelayanan sosial sering kali harus menentukan prioritas diantara tujuan-tujuan ini, yang diantaranya dapat saling kontradiksi, misalnya pencegahan, pemberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi. Komunitas ini banyak sekali menangani peristiwa-peristiwa yang sifatnya tidak rutin, terutama karena sasaran yang

dihadapinya merupakan sasaran reasosial yang aktif dengan perilaku yang kadangkala sulit diprakirakan.

b. Struktur Organisasi Tagana

Dalam rangka tertib administrasi, organisasi dan operasional pelaksanaan kegiatan Tagana di Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota Departemen Sosial Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 147/BJS.BS.08.04/IX/2008 Tentang Struktur Tim Koordinasi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Wilayah Provinsi dan Kabupaten Se-Indonesia. SK tersebut dijelaskan juga Tugas Tim Koordinasi Tagana Provinsi dan Kabupaten:

- a) Koordinator, memiliki tugas menyusun dan mengkoordinir program dan kegiatan Tagana baik rutin maupun insidental serta laporan kegiatan Tagana kepada Kepala Dinas/Institusi Sosial/Kesejahteraan Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota,
- b) Sekretaris, bertugas membantu Koordinator dalam hal kesekretariatan;
- c) Bidang Data dan Informasi, memiliki tugas membantu Koordinator dalam menghimpun data dan informasi berkaitan dengan personil dan kegiatan Tagana.
- d) Bidang Pendidikan dan Pengembangan, memiliki tugas membantu Koordinator dalam menyusun program dan kegiatan pendidikan dan

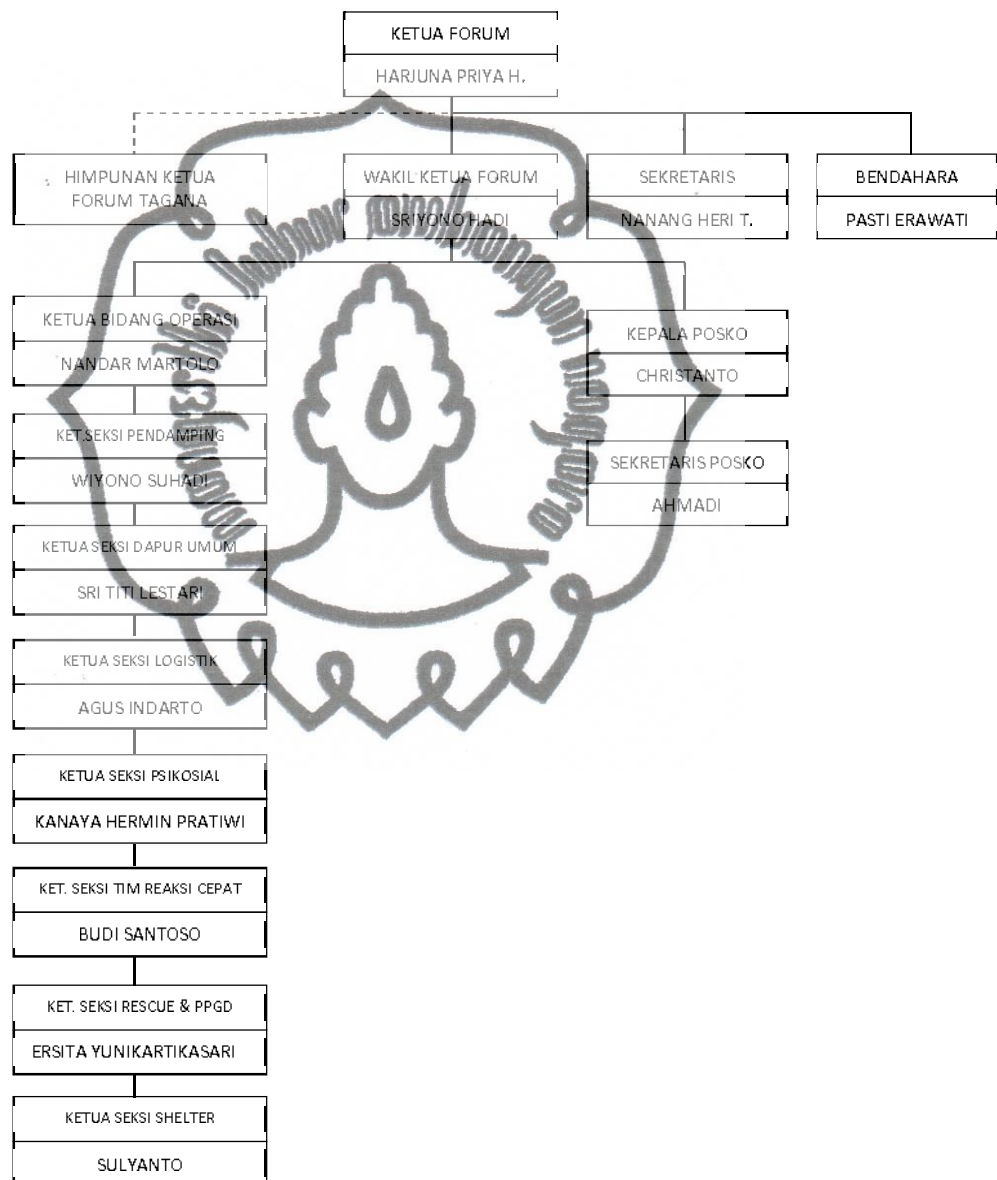
pelatihan Tagana serta pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia, program organisasi Tagana;

- e) Bidang Kerjasama, memiliki tugas membantu Koordinator dalam mengembangkan jaringan kerjasama pihak-pihak terkait di wilayahnya;
- f) Bidang Operasional, memiliki tugas membantu Koordinator dalam kegiatan pengerahan dan penggerakan Tagana dalam penanggulangan bencana;

Tagana Kabupaten Sleman memiliki anggota sebanyak 85 orang, yang terdiri dari 15 warga Kecamatan Cangkringan, 15 warga Kecamatan Turi, 13 warga Kecamatan Pakem, 4 warga Kecamatan Ngemplak, 2 warga Kecamatan Tempel, 2 warga Kecamatan Sleman, 6 warga Kecamatan Mlati, 1 warga Kecamatan Ngaglik, 2 warga Kecamatan Depok, 2 warga Kecamatan Berbah, 9 warga Kecamatan Prambanan, 2 warga Kecamatan Kalasan, 3 warga Kecamatan Godean, 3 warga Kecamatan Moyudan, 2 warga Kecamatan Gamping, 4 warga Kecamatan Minggir. Tagana Sleman sendiri memiliki struktur sendiri dimana ada penambahan beberapa bidang untuk menunjang kegiatannya, yaitu:

Gambar 4.2

Struktur Organisasi Tagana Sleman



Sumber: Dokumentasi Tagana Sleman Berdasar Rapat Koordinasi Awal Tahun 2012

3. Gambaran Umum Desa Argomulyo

a. Keadaan Geografis

Desa Argomulyo merupakan salah satu desa dari lima desa di wilayah Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dilihat dari topografi, ketinggian wilayah Argomulyo berada pada ± 400 m ketinggian dari permukaan air laut dengan curah hujan rata-rata 208,33 mm/bulan, serta suhu rata-rata $23-24^{\circ}$ C. Desa Argomulyo yang berada di pusat Kecamatan Cangkringan dan 17 Km arah timur laut Ibu Kota Sleman memiliki aksesibilitas baik, mudah dijangkau dan terhubung dengan daerah-daerah lain di sekitarnya oleh jalur transportasi jalan raya. Secara administrasi Desa Argomulyo terletak di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a) sebelah utara :Desa Glagaharjo, Cangkringan, Sleman.
- b) sebelah selatan :Desa Sindumartani dan Bimomartani, Ngemplak,
Sleman
- c) sebelah barat :Desa Wukirsari, Cangkringan, Sleman.
- d) sebelah timur :Desa Kepurun Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Wilayah Desa Argomulyo terdiri dari 22 padukuhan yang dapat dikelompokkan ke dalam 3 wilayah.

Potensi wilayah Desa Argomulyo dengan; luas lahan seluas 847,00 Ha terbagi dalam beberapa peruntukan seperti; pemukiman, bangunan, pertanian/sawah, fasilitas umum dan tegalan. Luas lahan yang diperuntukkan

Pemukiman seluas 182,30 Ha, pertanian/sawah dan ladang seluas 581,90 Ha, tegalan seluas 9,60 Ha dan sisanya di peruntukkan untuk fasilitas umum; sekolah, perkantoran, jalan dan lapangan olahraga. Desa Argomulyo dilalui Sungai Gendol di sebelah timur dan Sungai Opak di sebelah barat, setiap datang musim penghujan pemerintah Desa Argomulyo bekerja sama dengan instansi terkait dan beberapa relawan di Argomulyo dan sekitarnya antara lain AMC (Argo Merapi Community), Tagana, dan SAR (*Search and Rescue*) Sleman berusaha semaksimal mungkin memberikan peringatan sedini mungkin akan datangnya banjir. Keberadaan sungai dengan air yang mengalir sepanjang tahun di Desa Argomulyo tersebut juga membantu dalam menjaga kondisi permukaan air tanah.

b. Keadaan Demografis

1) Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman pada tahun 2012 adalah sebanyak 7.736 jiwa yang terdiri dari 3.483 orang penduduk laki-laki dan 4.253 orang penduduk perempuan yang terbagi dalam 1.892 kepala keluarga.

2) Mata Pencaharian

Desa Argomulyo mempunyai beragam potensi perekonomian mulai dari pertanian, perikanan, kehutanan dan peternakan, tambang serta potensi desa wisata. Sektor pertanian berperan cukup besar dalam pembangunan daerah Desa Argomulyo, baik peran langsung terhadap pembentukan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sleman, penyediaan lapangan kerja, sumber pendapatan masyarakat, dan penciptaan ketahanan pangan, maupun peran tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan subsektor dan sektor lain. Penduduk Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman mempunyai mata pencarian beragam, seperti petani, peternak pedagang, dan PNS.

Tabel 4.2

Tabel Mata pencarian Penduduk Desa Argomulyo

No	Mata pencarian	Jumlah Penduduk
1	PNS	439
2	ABRI/POLRI	147
3	Pegawai Swasta	986
4	Wiraswasta/Pedagang	557
5	Petani	2693
6	Pertukangan	375
7	Pensiunan/Purnawirawan	287
8	Jasa	226
9	Peternak	915
10	Penambang	236
11	Belum/ tidak bekerja	875
Jumlah		7736

Sumber: Data Statistik Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman

B. Manajemen Prabencana Melalui Pemberdayaan Masyarakat Siaga Bencana Berbasis Komunitas di Kabupaten Sleman

Dalam subbab ini dibahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan manajemen prabencana melalui pemberdayaan masyarakat siaga bencana berbasis komunitas di Kabupaten Sleman dengan arti bahwa kegiatan pemberdayaan ini tidak hanya dilakukan pemerintah saja, tetapi dengan bantuan komunitas setempat. Kegiatan manajemen prabencana melalui pemberdayaan masyarakat siaga bencana berbasis komunitas ini menjadi bagian tugas dan tanggung jawab dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman yang tidak terlepas dari bantuan dari lembaga lain. Kegiatan-kegiatan pada tahap manajemen prabencana di Kabupaten Sleman termasuk pemberdayaan masyarakat tersebut merupakan langkah untuk mengantisipasi bencana.

Pembahasan mengenai pelaksanaan manajemen prabencana melalui pemberdayaan masyarakat siaga bencana berbasis komunitas ini dibagi menjadi tiga bagian pembahasan:

Pertama, pembahasan mengenai pelaksanaan manajemen prabencana di Kabupaten Sleman.

Kedua, pembahasan pemberdayaan masyarakat siaga bencana berbasis komunitas di Kabupaten Sleman.

Ketiga, pembahasan terbentuknya masyarakat siaga bencana di Kabupaten Sleman.

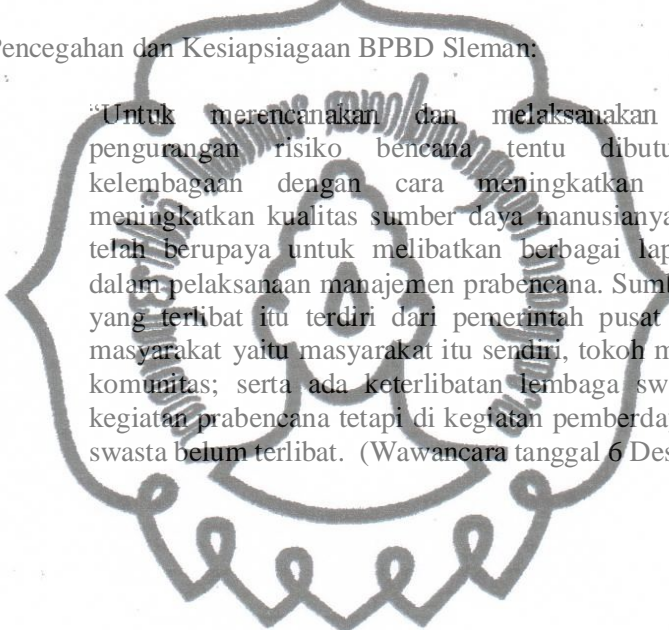
1. Manajemen Prabencana di Kabupaten Sleman

Manajemen prabencana di Kabupaten Sleman yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman merupakan langkah meningkatkan ketahanan daerah dan upaya pengurangan risiko bencana. Dalam manajemen prabencana akan terlihat bagaimana perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dari kegiatan-kegiatan sebelum terjadinya bencana di Kabupaten Sleman. Kegiatan manajemen prabencana di Kabupaten Sleman memiliki prioritas sebagai prinsip praktis manajemen bencana seperti yang tertulis dalam penjelasan pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Prioritas tersebut berarti apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia. Manajemen prabencana di Kabupaten Sleman sendiri telah menyesuaikan pada lima prioritas *Hyogo Framework for Action* (HFA) dilakukan dengan langkah:

a. PRIORITAS AKSI I

Prioritas ini dengan memastikan bahwa pengurangan risiko bencana (PRB) sebagai wujud manajemen prabencana merupakan sebuah prioritas nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat. Kelembagaan yang kuat dalam upaya pengurangan risiko bencana didapatkan dengan adanya kerjasama yang baik antar lembaga, yaitu baik pemerintah maupun non-pemerintah dengan memperhatikan kualitas sumber daya manusia dalam suatu lembaga. Manajemen prabencana

dengan langkah pengurangan risiko bencana di Kabupaten Sleman pada tahun 2012 telah melibatkan berbagai sumber daya manusia dalam penyusunan dan pelaksanaan program-program pengurangan risiko bencana. Berikut ini pernyataan Makwan, S.TP, MT selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sleman:



“Untuk merencanakan dan melaksanakan program dari pengurangan risiko bencana tentu dibutuhkan kekuatan kelembagaan dengan cara meningkatkan kerjasama dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. BPBD Sleman telah berupaya untuk melibatkan berbagai lapisan masyarakat dalam pelaksanaan manajemen prabencana. Sumber daya manusia yang terlibat itu terdiri dari pemerintah pusat maupun daerah; masyarakat yaitu masyarakat itu sendiri, tokoh masyarakat, LSM, komunitas; serta ada keterlibatan lembaga swasta di sebagian kegiatan prabencana tetapi di kegiatan pemberdayaan masyarakat, swasta belum terlibat. (Wawancara tanggal 6 Desember 2012)

Tabel 4.3

Kelembagaan Manajemen Prabencana di Kabupaten Sleman

No	Lembaga	Peran Lembaga	Jumlah
1.	BNPB dan BPBD Sleman	Menjadi komando dan mengkoordinasikan semua tindakan dan kegiatan dalam semua fase siklus penanggulangan bencana.	1 BNPB dan 1 BPBD Sleman
2.	Pemerintah Kabupaten Sleman (Instansi Pemerintahan Lain)	Membantu dalam membuat kebijakan dan perencanaan pengurangan risiko bencana. Dan membantu menyediakan kebutuhan/fasilitas penanggulangan bencana.	Seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Sleman
3.	Tokoh Masyarakat	Membantu pemerintah dalam merencanakan kegiatan pembangunan yang berorientasi kepada pengurangan risiko bencana. Memberikan informasi dan sosialisai kepada masyarakat mengenai peran dan tindakan yang harus diambil oleh masyarakat dalam usaha untuk mengurangi kerentanan masyarakat terhadap risiko di desanya masing-masing	86 tokoh (setiap desa satu perwakilan)
4.	Komunitas	Memiliki peran sebagai relawan, fasilitator dan komunikator dalam kegiatan pemberdayaan, penyedia dapur umum, serta peran yang sangat vital didalam melakukan evakuasi ketika ada tanda bahaya bencana.	37 komunitas peduli bencana
5.	LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)	Menjadi fasilitator, komunikator, dan motivator masyarakat agar masyarakat turut berpartisipasi dalam agenda pembangunan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. Kemudian memberikan advokasi dan membantu pemerintah dalam merencanakan kegiatan pembangunan yang berorientasi kepada pengurangan risiko bencana.	-
6.	Swasta	Sebagai charity (badan amal) atau untuk dana darurat dan sponsor dalam pengadaan kebutuhan sarana/prasarana penanggulangan bencana	-

Sumber: Data BPBD Sleman

Data di atas membuktikan telah terbentuknya kelembagaan manajemen prabencana di Kabupaten Sleman, untuk mengetahui data komunitas dan data LSM dapat melihat lampiran 2. Adanya keterlibatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah membuktikan bahwa masalah bencana di daerah Sleman bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi telah menjadi prioritas nasional yang juga tanggung jawab pemerintah pusat dan seluruh masyarakat. Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah membantu merumuskan perencanaan program-program pengurangan risiko bencana seperti pelaksanaan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas untuk menciptakan masyarakat siaga bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sleman memiliki berbagai langkah/upaya untuk meningkatkan kekuatan kelembagaan dalam manajemen prabencana agar seluruh sumber daya manusia ikut terlibat. Langkah pertama yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sleman agar sumber daya manusia yang ada bersedia menyusun kebutuhan-kebutuhan risiko bencana yaitu dengan memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan kebutuhan risiko bencana. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Makwan, S.TP, MT (Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sleman):

“Kami memiliki upaya atau langkah yang perlu dilakukan seluruh sumber daya manusia di Kabupaten Sleman untuk ikut terlibat dalam pengurangan risiko bencana dan salah satu caranya dengan

memfasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan kebutuhan risiko bencana. Penilaian kebutuhan tersebut disesuaikan dengan beberapa sektor, seperti dalam sektor kesehatan ada obat-obatan dan alat-alat medis; sektor keselamatan berupa rambu-rambu keselamatan (sirine); sektor pendidikan berupa materi kebencanaan; dan sektor lainnya. Langkah penguatan kelembagaan lainnya itu dengan mengoordinasi seluruh sumber daya manusia dengan mengadakan Foklar (Forum Komunikasi Lintas Relawan).” (Wawancara tanggal 6 Desember 2012)

Forum Komunikasi Lintas Relawan dibentuk pemerintah Sleman untuk menghubungkan komunikasi antar relawan dalam menangani bencana Gunung Merapi khususnya dan masalah bencana-bencana lain pada umumnya. Dalam Foklar, BPBD Sleman berperan menyampaikan informasi-informasi di lapangan secara rinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kebencanaan.

Dalam manajemen prabencana dengan prioritas penguatan kelembagaan, keterlibatan masyarakat termasuk komunitas banyak terlihat. Berikut ini pernyataan Makwan, S.TP, MT (Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sleman) terkait bentuk partisipasi masyarakat dan komunitas:

“Ada banyak mba bentuk partisipasi yang kami lakukan. Bentuknya partisipasinya dengan memberdayakan masyarakat dan komunitas dalam musyawarah perencanaan pengurangan risiko bencana dan rencana pemantauan kebencanaan, di sini kami akan mendengarkan masyarakat mulai dari menampung aspirasinya dalam pengambilan suatu keputusan; kemudian saat pelaksanaan manajemen prabencana, masyarakat dan komunitas terlibat dalam berbagai pelatihan, simulasi serta bakti sosial. Komunitas yang ikut sesuai bidangnya masing-masing: ada komunitas yang hanya

membantu sebagai fasilitator dalam pelatihan-pelatihan karena kemampuannya di bidang komunikasi, ada komunitas yang nantinya membantu dalam bidang evakuasi pada saat terjadi bencana, dan ada komunitas yang hanya spesial membantu di bagian penyediaan dapur umum, dan lainnya.” (Wawancara tanggal 6 Desember 2012)

Partisipasi masyarakat dan komunitas dalam manajemen prabencana di Sleman merupakan wujud dari pengurangan risiko bencana dengan peningkatan kelembagaan daerah. Pemerintah Kabupaten Sleman telah membuktikan bahwa upaya pengurangan risiko bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah saja, melainkan semua lembaga atau pihak perlu terlibat dalam manajemen prabencana.

b. PRIORITAS AKSI II

Prioritas aksi yang kedua dalam manajemen prabencana ini meliputi kegiatan mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana serta menerapkan sistem peringatan dini. Kabupaten Sleman sudah menyediakan sistem-sistem untuk mengembangkan, memperbarui dan menyebarluaskan peta risiko beserta informasi bencana (bahaya dan kerentanan). Berdasarkan pernyataan Makwan, S.TP, MT (Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sleman), dalam menganalisis informasi bencana, BPBD Sleman selalu memperbarui dan menyebarluaskan sistem informasi:

“Ya, BPBD Sleman sudah memiliki sistem informasi risiko bencana dimana setiap ada perkembangan selalu kami perbarui dan disebarluaskan kepada masyarakat. Sistem informasi yang akan disebarluaskan kepada masyarakat itu berasal dari peta ancaman

yang berlanjut pada peta kerentanan kemudian peta kapasitas dan berakhir pada peta risiko bencana. Tingkat kerentanan dan ketahanannya disesuaikan berdasarkan beberapa parameternya, seperti parameter *hazard*, parameter geografis, maupun parameter sosial budayanya.” (Wawancara tanggal 6 Desember 2012)

Peta ancaman, peta kerentanan, peta kapasitas, dan peta risiko bencana tersebut kemudian dikembangkan dalam sebuah sistem informasi yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui komunitas, kepala desa atau kepala dukuh/dusun, dan tokoh masyarakat setempat. Kriteria penilaian risiko bencana dan ketahanan yang dimiliki BPBD Sleman terdiri dari yang tinggi, sedang, rendah. Dimana tingkat ketahanan tersebut disesuaikan tergantung parameternya. Setiap parameter memiliki kriteria yang berbeda, Makwan, S.TP, MT mengatakan bahwa:

“Karakter atau kriteria suatu parameter itu memang berbeda-beda, misalnya saja ada masyarakat yang berdasarkan kriteria daerah kerentanan bencana berada di kawasan II yang berada pada aliran lahar Merapi (berdasarkan parameter geografis) tetapi masyarakatnya terlatih dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat siaga bencana (berdasarkan parameter kapasitas) maka hal ini bisa untuk mendukung, jadi daerah tersebut akan memiliki tingkat ketahanan sedang bukan rendah.” (Wawancara tanggal 6 Desember 2012)

Ada keterkaitan hubungan antara kriteria bencana dengan pengkajian dampak bencana. Kriteria-kriteria yang ada dalam sebuah parameter dapat membantu para pengambil keputusan perencanaan dalam mengkaji dampak yang terjadi dari suatu bencana. Makwan, S.TP, MT memberikan pernyataan keterkaitan kriteria dengan pengurangan dampak bencana:

“Iya mba, jadi dari kriteria penilaian risiko bencana dan ketahanan daerah yang saya jelaskan tadi akan memperlihatkan daerah-daerah mana yang akan memiliki dampak bencana yang tertinggi hingga terendah. Dari prakiraan dampak bencana tersebut akan ada upaya-upaya yang dilakukan untuk pengurangan dampak bencana tersebut.” (Wawancara tanggal 6 Desember 2012)

Penerapan sistem peringatan dini yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2012 sudah berjalan baik..Sistem peringatan dini merupakan sebuah konsep yang tergabung dari beberapa institusi yang artinya dalam pembuatan sistem peringatan dini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman tidak hanya sendiri melainkan dengan bantuan beberapa institusi, seperti BPPT ([Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi](#)), BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika), PVMBG ([Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi](#)), dan Badan Pusat Statistik. Pemahaman sistem peringatan dini berasal dari informasi pemantauan visual (secara langsung dari posko) dan pemantauan instrumental (data). Khusus menangani masalah Gunung Merapi, BPBD Sleman bekerjasama dengan BPPTK (Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian) dalam pemantauan instrumental dengan adanya alat yang bisa diakses langsung dan dianalisis untuk sebuah rekomendasi dari status aktivitas Merapi). Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Makwan, S.TP, MT (Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sleman) terkait pelaksanaan sistem peringatan dini bahwa:

“Dalam menangani data kebencanaan untuk pembuatan sistem peringatan dini kami tidak sendiri mba, melainkan dengan kerjasama institusi yang menangani pemantauan bencana untuk menentukan standar data bencana. Untuk menangani Gunung Merapi, BPBD Sleman bekerjasama dengan BPPTK untuk melakukan pemantauan instrumental agar mengetahui aktivitas Gunung Merapi. Kami akan mengetahui status Merapi yaitu apakah normal, waspada, siaga atau awas dari pemantauan instrumental tersebut. Sama dengan merapi, standar skala gempa atau curah hujan juga kami dapatkan melalui kerjasama dengan BMKG.” (Wawancara tanggal 6 Desember 2012)

Sistem peringatan dini disebarluaskan ke masyarakat dalam bentuk aktivitas-aktivitas (informasi) dan masyarakat sendiri yang nantinya membuat SOP (Standar Operasional Prosedur) mengenai sistem peringatan dini di daerahnya dengan panduan dari BPBD Sleman dan komunitas bidang komunikasi informasi sebagai fasilitator. Makwan, S.TP, MT menambahkan penjelasan bahwa sistem peringatan dini menggunakan alat-alat yang dapat diakses:

“Sistem peringatan dini yang dibuat BPBD Sleman sebisa mungkin harus dapat diakses langsung oleh masyarakat Kabupaten Sleman agar masyarakat mengetahui informasi bencana di daerah tempat tinggalnya masing-masing. Sistem peringatan dini digunakan dengan alat-alat yaitu yang pertama sirine, tetapi sirine hanya digunakan saat ada kondisi kritis dengan kecepatan ancaman primer, maksudnya yaitu sirine akan berbunyi jika kondisi benar-benar sudah dalam keadaan darurat dengan ancaman langsung; kedua ada CCTV (*Closed Circuit Television*) dimana sudah berada di semua titik daerah rawan bencana yang tersebar di beberapa desa kurang lebih ada 16 CCTV yang sudah tersebar; ketiga sensor hujan yang digunakan untuk mengatasi banjir karena hujan ataupun banjir lahar Merapi.” (Wawancara tanggal 6 Desember 2012)

Data tambahan untuk mendukung pernyataan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sleman dapat dilihat pada lampiran 3 mengenai data CCTV(*Closed Circuit Television*). Lebih lanjut lagi Makwan, S.TP, MT menjelaskan mengenai mekanisme penyebarluasan sistem peringatan dini yang didapatkan masyarakat. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sleman itu mengatakan bahwa:

“Penyebarluasan peringatan dini ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti melalui dokumen tertulis (berupa surat peringatan); melalui faksimile di masing-masing desa yang biasanya terdapat di kantor kepala desa; *sms gateway*, namun terkadang penggunaan *sms gateway* ini terkendala di operator yang tidak ada sinyal jika mengalami gangguan cuaca; sistem kesiapsiagaan desa, dimana setiap desa memiliki perangkat desa yang siap siaga terhadap informasi sistem peringatan dini; HT (*Handy Talky*) yang merupakan penyebarluasan sistem informasi yang paling cepat dan setiap dusun sudah memiliki HT; keterlibatan komunitas.” (wawancara tanggal 6 Desember 2012)

Sistem peringatan dini di Sleman dapat terlaksana dengan bantuan masyarakat dan komunitas, Makwan, S.TP, MT mengatakan bahwa:

“Komunitas itu berperan dalam peringatan dini mba, yaitu membantu masyarakat sebagai fasilitator dan membantu sosialisasi untuk menyampaikan informasi hasil pemantauan bencana yang selalu diperbarui. Sementara masyarakat juga membantu menyebarkan ke masyarakat lain yang belum tahu di sekitar tempat tinggalnya.” (Wawancara tanggal 6 Desember 2012)

Keterlibatan beberapa unsur masyarakat disini membuat Kabupaten Sleman mampu memenuhi prioritas kedua dalam manajemen bencana sebagai langkah pengurangan risiko bencana.

Kabupaten Sleman telah mampu mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana serta menerapkan sistem peringatan dini dengan baik. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sleman menyatakan bahwa mekanisme penyebarluasan sistem peringatan dini di Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan.

Tabel 4.4
Mekanisme Penyebarluasan Sistem Peringatan Dini

No.	Mekanisme Sistem Peringatan Dini	Tahun		
		2010	2011	2012
1.	Dokumen tertulis	√	√	√
2.	Mesin faks masing-masing desa	√	√	√
3.	Sms gateway	—	√	√
4.	Sistem kesiapsiagaan masing-masing desa	√	√	√
5.	HT setiap dukuh/dusun	—	—	√
6.	Informasi dalam pelatihan	√	√	√

Sumber: Data Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sleman

Berdasarkan tabel tersebut terlihat jelas bahwa pada tahun 2010 pada saatnya terjadinya erupsi Merapi bahwa *sms gateway* belum dijalankan sedangkan sistem kesiapsiagaan walaupun sudah mulai diterapkan dengan adanya perwakilan komunitas di setiap desa, namun saat itu belum seluruh desa di Kabupaten Sleman memiliki sistem kesiapsiagaan yang baik dan ada juga beberapa desa yang tidak berpotensi bencana belum memiliki sistem kesiapsiagaan. Sementara pada tahun 2011, *Handy Talky* sebagai sarana penyebarluasan tercepat belum dimiliki tiap

pendukuhan walaupun memang sudah dimiliki setiap desa. Pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Sleman mulai melakukan perbaikan diberbagai aspek dengan meningkatkan sistem peringatan dini dan seluruh mekanisme penyebarluasannya.

Hasil pengkajian dan pemantauan sistem peringatan dini yang akurat dapat dijadikan bahan pembelajaran seperti dalam pelatihan informasi sistem peringatan dini kepada masyarakat. Masyarakat awam sekalipun juga perlu mengetahui potensi bencana di daerahnya masing-masing melalui sistem peringatan dini yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sleman.

c. PRIORITAS AKSI III

Manajemen prabencana juga perlu dilakukan dengan memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana pada semua tingkatan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka memenuhi prioritas aksi ketiga melakukan upaya agar masyarakat Sleman yang memiliki risiko tinggi bencana dapat memahami informasi mengenai risiko bencana secara relevan yaitu dengan pemanfaatan pengetahuan dan pendidikan kebencanaan. Kegiatan pelatihan dan pendidikan dengan memberdayakan masyarakat ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 2008 yang dapat dilihat pada rencana kontingensi saat itu.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman telah melakukan pelatihan PRB (Pengurangan Risiko Bencana) berbasis masyarakat di 32 dukuh pada tahun 2012, dengan asumsi setelah pasca erupsi Gunung Merapi 2010 maka ancaman Merapi selanjutnya akan berbeda dengan erupsi 2010. Penjelasan tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Makwan, S.TP, MT (Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sleman) terkait pemberian informasi bencana secara relevan:

“Kami telah melaksanakan pemberdayaan masyarakat salah satunya pelatihan yang tidak hanya sebatas ke desa-desa melainkan sudah lingkup pendukuhan yaitu sebanyak 32 dukuh dengan menggunakan asumsi bahwa bencana yang bisa saja akan terjadi lagi, akan berbeda dengan erupsi Merapi 2010. Ancaman Merapi selanjutnya bisa saja lebih buruk karena itu masyarakat diberikan pelatihan mengenai pemahaman kebencanaan. Pelatihan yang kami lakukan ke desa-desa itu untuk memberikan pengetahuan ke masyarakat agar masyarakat dapat informasi bencana yang akurat dari sumbernya.” (Wawancara tanggal 6 Desember 2012)

Pengembangan program pelatihan pengurangan risiko bencana dan pembelajaran pengurangan risiko bencana menjadi bagian dari perencanaan pembangunan di Kabupaten Sleman. Berikut ini pernyataan Makwan, S.TP, MT mengenai pengembangan program pelatihan :

“Kegiatan pengembangan pelatihan yang telah kami lakukan di Sleman dengan bantuan relawan (komunitas) untuk mengurangi risiko bencana itu ada banyak mba, misalnya saja seperti pelatihan pengurangan risiko bencana untuk sekolah, desa/dukuh, tokoh masyarakat, dan antar komunitas; gladi lapangan atau simulasi; serta sosialisasi.” (Wawancara tanggal 6 Desember 2012)

Data tambahan untuk mendukung validitas dari hasil wawancara Makwan, S.TP, MT mengenai program pelatihan dan jadwalnya dapat dilihat pada lampiran 4 serta lampiran 5 (untuk mengetahui desa rintisan siaga bencana yang akan melakukan pelatihan).

Untuk membangun kesadaran keselamatan diri memerlukan budaya kesiapsiagaan. Strategi yang dilakukan oleh BPBD Sleman untuk membangun budaya kesiapsiagaan bencana menggunakan pendekatan kekeluargaan. Pernyataan tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Makwan, S.TP, MT bahwa:

“Ada strategi atau cara sendiri yang kami lakukan agar masyarakat ikut terlibat dalam semua bentuk pelatihan kesiapsiagaan, caranya dengan mengajak masyarakat secara kekeluargaan. Pendekatan kekeluargaan ini dilakukan agar kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana berjalan dengan baik. Cara lainnya itu melibatkan tokoh-tokoh masyarakat desa terlebih dahulu dalam pembuatan kebijakan pengurangan risiko bendanya mba, dengan seperti itu para tokoh masyarakat dapat mensosialisasikan dan mengajak masyarakat sekitar tempat tinggalnya untuk terlibat dalam membangun budaya kesiapsiagaan bencana. Masyarakat diajak mengenal dari dasarnya apa itu bencana hingga bagaimana cara mengurangi dampak.” (Wawancara tanggal 6 Desember 2012)

Selain strategi-strategi tersebut, masyarakat yang diwakili oleh tokoh masyarakat dan komunitas dapat melakukan pengawasan terhadap rangkaian kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas, sehingga tidak hanya Pemerintah Kabupaten Sleman atau BPBD Sleman saja yang bertindak sebagai pengawas pelaksanaan. Dipercayakannya masyarakat untuk ikut mengawasi kegiatan pemberdayaan, akan

memunculkan sikap positif masyarakat karena mereka dapat melihat apakah pemerintah sudah berhasil atau belum sebagai penyelenggara pelatihan. Masyarakat juga merasa dihargai karena pendapatnya telah didengarkan. Hal tersebut sesuai pendapat Makwan, S.TP, MT (Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sleman):

“Penyelenggara pemberdayaan tersebut memang BPBD Sleman tetapi bukan berarti semua pihak BPBD Sleman yang menjadi pengawas, selain ada pengawasan dari pemerintah daerah disini pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat itu sendiri walaupun mereka sebagai sasaran kegiatan. Komunitas yang bertindak sebagai pelaksana juga ikut disertakan dalam sistem pengawasan. Semua itu dilakukan agar semua pihak mendapat introspeksi terhadap masing-masing tugas jadi ada umpan balik.” (Wawancara tanggal 6 Desember 2012).

Sistem pengawasan dalam setiap bentuk kegiatan manajemen prabencana dilakukan secara transparan oleh semua pihak yang terlibat dan tidak ada pengawasan yang kaku. Transparansi pengawasan dalam manajemen prabencana di Sleman sesuai dengan prinsip praktis manajemen bencana, meskipun pengawasan secara terbuka tetapi pertanggungjawaban dari seluruh pihak harus ada.

d. PRIORITAS AKSI IV

Salah satu bagian penting dari manajemen prabencana adalah mengurangi faktor-faktor penyebab risiko bencana. Penyebab-penyebab suatu daerah berisiko bencana banyak disebabkan oleh faktor alam, maka dibutuhkan pendekatan lingkungan untuk menjaga kelestarian dan ketahanan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat siaga bencana dengan

pendekatan manajemen sumber daya alam dan lingkungan di Kabupaten Sleman, antara lain dengan mengadakan pelatihan tentang pelestarian alam sebagai upaya untuk menjaga lahan ketika terjadi longsor dan ketika banjir lahar. Berikut ini hasil wawancara dengan Makwan, S.TP, MT:

“Salah satu upaya pemberdayaan yang kami lakukan dengan pendekatan lingkungan itu seperti mengajak masyarakat untuk menjaga alam agar tidak terjadi penggundulan lahan. Selain menyiapkan sumber daya manusianya, kami juga harus memperhatikan faktor alam dalam mengurangi risiko bencana. Dengan demikian masyarakat dapat lebih sadar akan dampak-dampak dari perubahan iklim yang mengancam dengan melakukan berbagai upaya pencegahan dan adaptasi, salah satunya dengan cara menanam tanaman pepohonan lebih banyak. Disini aksi penghijauan dan anti penggundulan lahan juga dilakukan.”
(Wawancara tanggal 6 Desember 2012)

Pendekatan lingkungan lainnya berdasarkan wawancara dengan BPBD Sleman adalah dengan pengelolaan hewan ternak dengan baik, karena ternak ketika terjadi bencana erupsi Merapi merupakan salah satu kendala. Pada saat bencana erupsi Merapi banyak ternak yang akhirnya tidak sempat dievakuasi dengan cepat dan aman, sehingga hewan-hewan ternak mati terkena awan panas. Pengurangan risiko bencana dilakukan kepada peternak dengan mempersiapkan jaminan hewan ternak. Penyusunan pedoman pengurang risiko bencana berbasis manajemen sumber daya alam lainnya dapat dilakukan strategi pemanfaatan lahan. Namun, strategi pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh BPBD Sleman belum sepenuhnya berjalan. Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan Makwan, S.TP, MT bahwa:

“BPBD Sleman sudah berusaha melakukan penyusunan pedoman pengurangan risiko bencana melalui strategi pemanfaatan lahan, tetapi belum optimal berjalan semua. Karena tugas ini sebenarnya berkaitan dengan tugas Dinas Pertanian, jadi yang berperan besar ya dinas tersebut. Namun, kami ikut membantunya karena pemanfaat lahan yang baik akan menjaga kondisi lingkungan dari bencana. Jadi strategi pemanfaatan lahan yang kami lakukan dengan memperhatikan keadaan lahan dan kondisi alam.”
(Wawancara tanggal 6 Desember 2012)

Upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman untuk mengurangi faktor-faktor penyebab risiko bencana yaitu dengan memperbaiki dan memperkuat fasilitas publik. Hal ini sesuai dengan pernyataan Makwan, S.TP, MT (Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sleman):

“Fasilitas publik merupakan fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum, sehingga pemerintah juga memperhatikan ini mba. Pemerintah mendapat bantuan dari masyarakat dan komunitas peduli bencana untuk memperkuat fasilitas publik di Sleman agar tidak rentan bencana, yang dilakukan seperti memperbaiki sarana dan prasarana publik misalnya perbaikan jalan. Pemerintah juga bekerjasama dengan dinas lain.”
(Wawancara tanggal 6 Desember 2012)

BPBD Sleman bertindak sebagai koordinator dalam pengadaan fasilitas publik agar tidak rentan bencana. BPBD Sleman berkoordinasi dengan berbagai institusi lainnya untuk menyiapkan fasilitas publik. Berikut ini data tambahan untuk mendukung informasi dari Makwan, S.TP, MT:

Tabel 4.5
Data Kerjasama Pengadaan Fasilitas Publik
Terkait Ketahanan Menghadapi Bencana

No.	Fasilitas	Kerjasama Institusi
1.	Perbaikan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum
2.	Penyediaan Talud	Dinas Pekerjaan Umum
3.	Biaya Operasional Proyek	Pemerintah Kabupaten Sleman
4.	Rambu-rambu Peringatan Bencana dan Rambu Jalan	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo)
5.	Penyiapan Teknologi Sistem Informasi Kebencanaan	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo)
6.	Penyediaan Alat-alat Medis dan Obat-obatan	Dinas Kesehatan
7.	Tandu dan Barak Pengungsian	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
8.	Penyediaan Dapur Umum	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

Manajemen prabencana bertujuan menjadikan masyarakat memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengantisipasi bencana atau dengan kata lain menciptakan masyarakat siaga bencana. Upaya mengurangi faktor penyebab risiko bencana dengan pendekatan alam dan perbaikan fasilitas publik merupakan langkah manajemen prabencana yang menjadi strategi untuk meningkatkan kondisi ketahanan wilayah Kabupaten Sleman terhadap bencana.

e. PRIORITAS AKSI V

Kesiapsiagaan merupakan tahapan yang paling strategis, karena menentukan ketahanan anggota masyarakat dalam menghadapi datangnya suatu bencana. Salah satu upaya manajemen prabencana dengan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas adalah memperkuat

kesiapsiagaan masyarakat untuk menciptakan masyarakat siaga bencana. Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki strategi pendekatan seluruh elemen masyarakat dalam Foklar (Forum Komunikasi Lintas Relawan) untuk terlibat dalam kesiapsiagaan terhadap bencana. Pernyataan itu sesuai dengan yang dikatakan oleh Makwan, S.TP, MT terkait strategi penguatan kemampuan teknis dan kelembagaan:

“Sama halnya dengan sistem peringatan dini, kesiapsiagaan juga perlu dilakukan dengan memperkuat seluruh masyarakat dengan memunculkan ide-ide kreatif sebagai respon yang positif. Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah agar masyarakat banyak terlibat dalam kesiapsiagaan yaitu dengan mengikutkannya ke dalam Foklar (Forum Komunikasi Lintas Relawan) dan forum koordinasi kebencanaan lainnya). Strategi lain yang dilakukan pemerintah dengan meningkatkan kemampuan teknis melalui pemanfaatan teknologi, membuat jaringan informasi antar masyarakat, dan penyesuaian kebutuhan tiap daerah rawan bencana.” (Wawancara tanggal 6 Desember 2012)

Forum Komunikasi Lintas Relawan sebagai bagian dari manajemen prabencana, yang dilakukan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam memberikan pendapat. Usaha tersebut dinilai cukup efektif dengan menghadirkan para relawan dan tokoh masyarakat dari berbagai komunitas peduli bencana, LSM atau lembaga non-formal lainnya. Hal ini terbukti efektif dengan sudah bergabungnya 37 komunitas dalam kegiatan tersebut. Mekanisme yang dilakukan BPBD Sleman agar seluruh relawan dan masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam kesiapsiagaan yaitu dengan memberikan undangan terbuka kepada masyarakat dan dalam setiap

kegiatan masyarakat dilibatkan secara penuh untuk berpartisipasi. Ide-ide masyarakat dalam kegiatan akan dipertimbangkan dengan adanya diskusi.

Penguatan informasi kebencanaan di masyarakat dapat dilakukan dengan cara pertukaran informasi. Pertukaran informasi dapat mempermudah penyebaran semua informasi yang berhubungan dengan bencana. Hasil wawancara dengan Makwan, S.TP, MT (Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sleman) mengenai peran BPBD Sleman dalam pertukaran informasi yaitu:

“Peran BPBD Sleman dalam memperkuat bidang informasi, yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam dialog-dialog pertukaran informasi kebencanaan. Pemanfaatan teknologi dan informasi juga dilakukan dengan penggunaan radio di Kabupaten Sleman untuk menginformasikan setiap perkembangan kebencanaan di Sleman dan penggunaan internet, seperti dalam *website* BPBD Sleman sendiri sudah tersedia mengenai peta daerah rawan bencana gunung berapi, banjir, maupun longsor.” (Wawancara tanggal 6 Desember 2012)

Data tambahan untuk mendukung pernyataan di atas mengenai ketersediaan peta rawan bencana di kabupaten Sleman, dapat dilihat pada lampiran 6. BPBD Sleman bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memperluas pertukaran informasi dalam menangani bencana, berikut ini pernyataan Makwan, S.TP, MT:

“Kami sudah melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait mba untuk melakukan pertukaran informasi dalam menangani bencana, seperti pertukaran informasi mengenai Merapi dilakukan dengan BPPTK, Badan Pusat Statistik, dan [Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi](#). Kemudian untuk Informasi mengenai gempa, dan banjir kami kerjasama

dengan BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika).”
(Wawancara tanggal 6 Desember 2012)

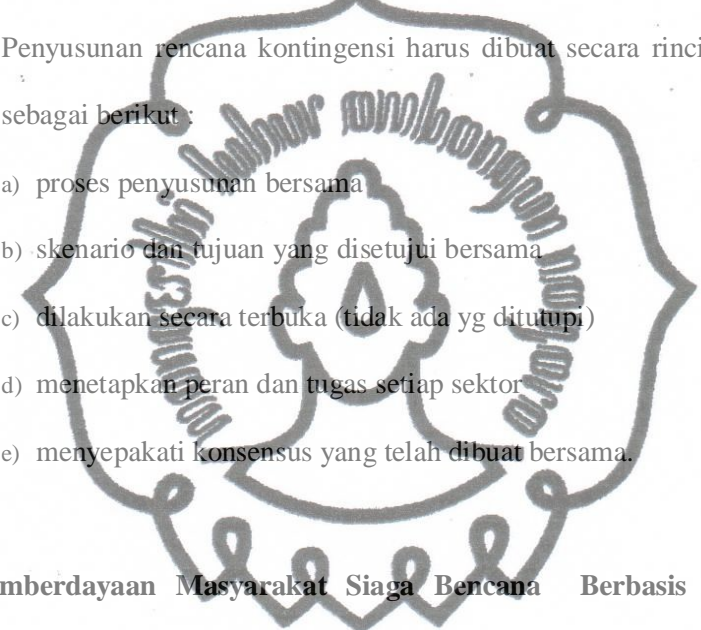
Penguatan kesiapan dalam menghadapi bencana juga dibutuhkan dokumen tertulis berupa rencana kontingensi, di mana tiap daerah harus memilikinya. Rencana kontingensi adalah proses mempersiapkan organisasi untuk merespon peristiwa yang tidak direncanakan. Tujuan dari perencanaan kontingensi untuk meminimalkan dampak dari sebuah peristiwa merugikan yang mungkin terjadi pada masa mendatang. Kabupaten Sleman sendiri sudah melakukan pembuatan rencana kontingensi yang terbukti dengan adanya rencana kontingensi tahun 2009. Sementara rencana kontingensi terbaru yang disusun awal 2012 masih dalam proses pembuatan, pernyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Makwan, S.TP, MT :

“Rencana kesiapsiagaan bencana itu memang semestinya terdapat dalam dokumen tertulis yaitu yang dikenal sebagai rencana kontingensi. Rencana kontingensi memerlukan ketelitian dalam pembuatannya, untuk yang terbaru di Kabupaten Sleman itu masih dalam proses pembuatan agar hasilnya sempurna dan mudah dipahami masyarakat.” (Wawancara tanggal 6 Desember 2012)

Pembuatan rencana kontingensi tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan dengan bantuan berbagai pihak. Keterlibatan beberapa *stakeholders* diperlukan untuk memberikan saran. Penyusunan rencana kontingensi Sleman juga melibatkan banyak pihak, berikut penjelasan Makwan, S.TP, MT:

“Begini mba, jadi pembuatan rencana kontingensi bukan hanya tugas pemerintah daerah saja tetapi harus dibuat bersama-sama oleh semua pihak atau *stakeholders* dan multisektor yang terlibat dan berperan dalam penanganan bencana, termasuk diantaranya dari pemerintah (sektor-sektor yang terkait), perusahaan negara, swasta, organisasi non-pemerintah, lembaga internasional dan masyarakat.” (Wawancara tanggal 6 Desember 2012)

Penyusunan rencana kontingensi harus dibuat secara rinci dengan urutan sebagai berikut :

- 
- a) proses penyusunan bersama
 - b) skenario dan tujuan yang disetujui bersama
 - c) dilakukan secara terbuka (tidak ada yg ditutupi)
 - d) menetapkan peran dan tugas setiap sektor
 - e) menyepakati konsensus yang telah dibuat bersama.

2. Pemberdayaan Masyarakat Siaga Bencana Berbasis Komunitas di Kabupaten Sleman

Program pemberdayaan masyarakat siaga bencana berbasis komunitas sebagai wujud dari suatu manajemen prabencana, yaitu proses yang dilakukan oleh BPBD Sleman sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian masyarakat dan komunitas itu sendiri dalam menghadapi ancaman bencana sebelum bencana terjadi. Kegiatan pengurangan risiko bencana sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana harus terintegrasi ke dalam program pembangunan, termasuk dalam sektor pendidikan bencana.

Pada hasil dan pembahasan manajemen prabencana yang terdapat dalam prioritas aksi I sampai dengan prioritas aksi V telah tergambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman yang bertanggung jawab sebagai pihak penyelenggara telah menggunakan strategi pendidikan dan pelatihan dengan memberdayakan masyarakat sebagai langkah untuk meningkatkan kegiatan prabencana di seluruh lapisan masyarakat. Dalam prioritas aksi, manajemen prabencana Sleman membutuhkan unsur kelembagaan selain pemerintah yaitu salah satunya komunitas untuk pencapaian kegiatan pemberdayaan masyarakat. Penanggulangan bencana berbasis komunitas tersebut tentu membutuhkan langkah terorganisir dan komitmen yang kuat.

Pencapaian manajemen prabencana melalui pemberdayaan masyarakat siaga bencana berbasis komunitas dapat dilihat dari sepuluh kriteria pemberdayaan menurut Bartle (ada pada tinjauan pustaka dan kerangka pikir). Hasil pencapaian pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas di Sleman yang dinilai dengan menggunakan kriteria dari Bartle menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat siaga bencana berbasis komunitas di Sleman secara tidak langsung juga telah memenuhi kriteria prioritas aksi manajemen prabencana, yaitu dengan terlaksananya upaya penguatan kelembagaan, penyebaran sistem peringatan dini, peningkatan kemampuan dalam pelatihan, dan lain sebagainya yang dijelaskan secara lebih rinci dalam pembahasan ini. Adapun kegiatan pemberdayaan masyarakat siaga bencana berbasis komunitas yang telah dilakukan antara lain:

Tabel 4.6**Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Siaga Bencana Kabupaten Sleman**

No.	Kegiatan Pemberdayaan	Lokasi	Hasil
1.	Pelatihan Pengurangan Risiko Bencana	<ul style="list-style-type: none"> Desa dan dukuh/dusun kawasan rawan bencana Sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan sikap masyarakat yang antisipasi terhadap risiko bencana Pengetahuan masyarakat tentang bencana semakin berkembang
2.	Pelatihan Manajemen Barak dan Logistik	Menyesuaikan	Meningkatkan pengetahuan peserta dalam penyediaan barak dan logistik
3.	Simulasi atau gladi lapang	<ul style="list-style-type: none"> Desa dan dukuh/dusun kawasan rawan bencana Sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan Pengetahuan masyarakat tentang bencana semakin berkembang
4.	Bakti Sosial	Seluruh desa dan dukuh/dusun di Sleman	Perbaikan lingkungan dan fasilitas publik
5.	Pelatihan SAR	Desa kawasan rawan bencana	Meningkatkan kemampuan evakuator dalam menolong masyarakat rawan bencana
6.	Penyusunan Rencana Kontingensi	BPBD Sleman	Rencana Kontingensi

Sumber: Data Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sleman

Untuk mengetahui jadwal kegiatan/waktu pelatihan secara lebih rinci dapat melihat pada lampiran 5.

Kabupaten Sleman telah menjalankan pemberdayaan masyarakat siaga bencana berbasis komunitas dengan baik di beberapa desa siaga bencana dan salah satunya adalah Desa Argomulyo. Kriteria keberhasilan yang dapat

dilihat dari pemberdayaan masyarakat siaga bencana berbasis komunitas di Sleman, diantaranya:

a. Mendahulukan kepentingan umum

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, BPBD Sleman memiliki kesiapan yang matang dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat siaga bencana berbasis komunitas agar masing-masing individu dalam masyarakat mampu menjalin kerjasama dengan baik dan dapat mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi masing-masing individu. Pernyataan Makwan, S.TP, MT (Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sleman) tentang kepentingan umum dalam pemberdayaan bahwa:

“Dalam pemberdayaan ini kami harus mengajak seluruh masyarakat untuk ikut andil dalam tiap kegiatan. Langkah yang BPBD Sleman lakukan agar masyarakat bersedia kerjasama dalam menciptakan kepentingan umum dengan membantu memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat. Kami juga selalu mendukung kegiatan pemberdayaan yang dilakukan komunitas untuk menjalin kekeluargaan, kebersamaan, dan saling mendukung antar masyarakat. Jadi, BPBD Sleman maupun komunitas membuat komunikasi yang baik untuk memberikan kesadaran masyarakat bahwa masalah bencana itu suatu kepentingan bersama yang harus didahulukan.” (Wawancara tanggal 6 Desember 2012)

Pernyataan tersebut didukung Ahmadi selaku Sekretaris Posko Tagana:

“Biasanya komunitas peduli bencana seperti kami ini Tagana lebih memperhatikan kesiapan pada faktor komunikasi karena dalam pemberdayaan masyarakat siaga bencana ini, komunitas lebih berperan besar sebagai fasilitator (menyampaikan materi). Komunitas membantu masing-masing individu dalam masyarakat untuk dapat berkomunikasi dengan baik dengan pendekatan

kekeluargaan agar terjalin keakraban dan rasa persaudaraan. Namun, ketika pemberdayaan fisik seperti dalam bakti sosial tentu membantu tenaga. Semua yang kami lakukan tentunya dengan bantuan penyediaan kebutuhan oleh pemerintah daerah.” (Wawancara tanggal 27 Desember 2012)

Bantuan komunitas membuat masyarakat dapat mengutamakan kepentingan bersama dalam pelatihan pengurangan risiko bencana. Kegiatan pemberdayaan masyarakat siaga bencana berbasis komunitas ini secara tidak langsung melatih masyarakat untuk tidak bersikap egois (mementingkan kepentingan pribadi) ketika terjadi bencana. Pelatihan pengurangan risiko bencana, simulasi atau gladi lapangan, atau kegiatan pemberdayaan lainnya telah membuat masyarakat dapat menjalin kerjasama yang baik. Seperti pada simulasi, setiap peserta semua terlibat di lapangan, ada yang berperan sebagai korban dan ada yang berperan untuk membantu korban. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Marji (warga Desa Argomulyo) yang telah mengikuti kegiatan pemberdayaan, untuk memperjelas pendapat Makwan, S.TP, MT dan Ahmadi:

“Ada pelatihan itu membuat kami semua menjadi memiliki solidaritas dengan warga lainnya mba. Dalam pelatihan itu, kami diajarkan oleh fasilitator dari komunitas untuk bekerjasama dengan masyarakat lainnya. Apalagi dalam simulasi semua warga itu membentuk sebuah tim yang baik agar tercipta kepentingan bersama, karena waktu simulasi kami benar-benar dihadapkan pada situasi seperti saat terjadi sebenarnya.” (Wawancara tanggal 27 Desember 2012)

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas ini membuat seluruh pihak yang terlibat didalamnya memiliki sikap untuk mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan masing-masing individu. Keberhasilan BPBD Sleman yang tidak terlepas dari bantuan komunitas telah meningkatkan mental kepedulian masyarakat terhadap sesamanya.

b. Kesamaan nilai

Dalam menciptakan kesamaan nilai, kunci pertama telah didapat dari adanya sikap mendahulukan kepentingan umum. Kesamaan nilai dalam pemberdayaan masyarakat siaga bencana berbasis komunitas dilakukan dengan menyamakan tujuan dari kegiatan tersebut. Kesamaan tujuan akan didiskusikan diawal penyelenggaran kegiatan, ini seperti yang dikatakan oleh Makwan, S.TP, MT (Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sleman):

“Untuk menciptakan kesamaan nilai ini diperlukan kesamaan tujuan terlebih dahulu sebelum dimulai kegiatan di masing-masing desa. Tidak lupa kami meminta pendapat peserta bahwa apa tujuan sebenarnya dilakukan kegiatan pemberdayaan tersebut. Secara umum, pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas dilakukan untuk membangun kondisi masyarakat yang mandiri terhadap bencana. Dengan adanya kesamaan tujuan tersebut akan memunculkan nilai-nilai kebersamaan pada diri masing-masing individu. Kesamaan nilai juga kami diskusikan dengan masyarakat mba, yaitu BPBD Sleman dibantu komunitas berusaha untuk memunculkan ide kreatif masyarakat.” (Wawancara tanggal 6 Desember 2012)

Berdasarkan penelitian pada BPBD Sleman, secara lebih rinci tujuan pemberdayaan masyarakat siaga bencana berbasis komunitas adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan pengetahuan kepada peserta tentang adanya risiko bencana yang ada di lingkungannya, berbagai macam jenis bencana, dan cara-cara mengantisipasi/mengurangi risiko yang ditimbulkannya.
- 2) Memberikan keterampilan agar peserta mampu berperan aktif dalam pengurangan risiko bencana baik pada diri sendiri dan lingkungannya
- 3) Memberikan sikap mental yang positif tentang potensi bencana dan risiko yang mungkin ditimbulkan.
- 4) Memberikan pemahaman kepada peserta tentang bencana, dampak bencana, penyelamatan diri bila terjadi bencana.
- 5) Memberikan keterampilan kepada peserta dalam menyusun perencanaan, melaksanakan dan melakukan pendidikan bencana kepada masyarakat lain yang belum mengetahui.
- 6) Melakukan perbaikan dan meningkatkan ketahanan fasilitas publik agar tidak rentan bencana.

Tagana sebagai salah satu komunitas peduli bencana memiliki beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membentuk kesamaan nilai yaitu dengan memunculkan ide-ide kreatif masyarakat. Ahmadi sebagai Sekretaris Posko Tagana mengatakan agar ide-ide kreatif

masyarakat dapat tumbuh dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang siaga bencana, yaitu:

“Agar ide kreatif masyarakat itu muncul kami melakukan berbagai upaya seperti, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengemukakan pendapatnya didepan umum dengan menggali pemahaman peserta mengenai definisi bencana dan cara penanggulangan bencana; mengajak masyarakat untuk berdiskusi dalam menentukan peta ancaman bencana di tempat tinggalnya; mengajak peserta (masyarakat) untuk menentukan juga jalur evakuasi dan lokasi pengungsian, dan juga melibatkan masyarakat dalam diskusi seperti membuat kelompok-kelompok, dimana dalam setiap kelompok masing-masing individu dimintai pendapat mengenai pengalamannya ketika terjadi bencana.” (Wawancara tanggal 27 Desember 2012)

Pendapat BPBD Sleman dan Tagana Sleman diperkuat oleh Marji (warga Desa Argomulyo) yang mengatakan:

“Dari kegiatan pemberdayaan yang telah dilakukan di desa kami akan menciptakan kesamaan nilai karena adanya kesamaan tujuan kami untuk dapat membuat desa kami jadi desa tangguh bencana. Kami juga tidak segan untuk berpendapat tentang yang kami pikirkan.” (Wawancara tanggal 27 Desember 2012)

Kesamaan nilai dalam pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas dalam penelitian ini telah tercipta di masyarakat Kabupaten Sleman dengan penyatuan kesamaan tujuan dan khususnya pada ide-ide yang didapatkan dari masing-masing peserta untuk menghilangkan kepentingan individu.

c. Layanan masyarakat

Layanan berupa fasilitas yang diberikan oleh BPBD Sleman tentunya disesuaikan pada kebutuhan di lapangan. BPBD Sleman berusaha memberikan layanan sebaik mungkin agar masyarakat dapat merespon

positif seluruh rangkaian kegiatan pemberdayaan masyarakat siaga bencana. Makwan, S.TP, MT menjelaskan layanan dalam kegiatan pemberdayaan:

“Jadi pada kegiatan ini, layanan yang dibutuhkan lebih kepada penyediaan fasilitas untuk kegiatan ini. Layanan fasilitas tentunya disesuaikan dengan kebencanaan yaitu kami berikan fasilitas pendidikan kebencanaan, perbaikan lingkungan, penyediaan dapur umum, layanan konsultasi soal bencana. Semua layanan tidak dilakukan BPBD sendiri, melainkan dengan kerjasama berbagai lembaga.” (Wawancara tanggal 6 Desember 2012)

Sedangkan fasilitas yang diberikan komunitas dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat siaga bencana disesuaikan dengan fungsi dan tugas masing-masing komunitas, karena komunitas satu dengan lainnya memiliki keahlian yang berbeda-beda. Suatu komunitas biasanya terbentuk atas kesamaan hobi. Sebagai Sekertaris Posko komunitas Tagana (Taruna Siaga Bencana) Sleman, Ahmadi mengatakan:

“Tagana itu berusaha semaksimal mungkin mba untuk memberikan fasilitas dan layanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang kemampuan yang dimiliki Tagana. Layanan Tagana kepada masyarakat berupa pemberian-pemberian pengetahuan kebencanaan dalam pelatihan, sedangkan fasilitas berupa materi yang dapat diberikan Tagana untuk membantu masyarakat yaitu seperti mobil angkut untuk pengungsian dan penyediaan dapur umum.” (Wawancara tanggal 27 Desember 2012)

Fasilitas dan layanan yang diberikan oleh pemerintah dan komunitas tentu akan memberikan akses kemudahan bagi masyarakat. Fasilitas dan layanan yang sudah ada dalam pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas ini ditingkatkan lagi ketahanannya dengan adanya perbaikan. Desa Argomulyo

sebagai desa tempat penelitian sudah mendapatkan beberapa bantuan perbaikan fasilitas untuk meningkatkan ketahanan dari ancaman bencana. Berikut ini pernyataan dari Sutrisno Hadi (Kepala Desa Argomulyo) mengenai perbaikan fasilitas di Desa Argomulyo yang memperkuat pernyataan Makwan, S.TP, MT terkait pengadaan layanan:

“Setelah erupsi Merapi kemarin, desa kami mendapatkan banyak bantuan fasilitas dari pemerintah untuk perbaikan. Harapannya fasilitas tersebut tidak rentan bencana lagi sewaktu-waktu nanti erupsi terjadi lagi atau bencana lain terjadi. Fasilitas yang diberikan itu ada yang berupa bantuan biaya operasional proyek dimana yang menjalankan proyek nanti masyarakat desa kami sendiri dan dibantu relawan komunitas, ada bantuan perbaikan jalan, perbaikan sekolah, dan yang lainnya. Kami juga dapat pemfasilitasan ilmu pengetahuan bencana tentunya.”
(Wawancara tanggal 27 Desember 2012)

Tabel ini sebagai contoh fasilitas perbaikan lingkungan di desa Argomulyo:

Tabel 4.7
Informasi Bantuan Lingkungan Desa Argomulyo

Jenis	Lokasi
1. BOP (Biaya Operasional Proyek)	Dukuh Randusari
2. BOP	Dukuh Kuwang
3. BOP	Dukuh Kuwang
Tahap 1	
4. BOP	Desa Argomulyo
5. Talud	Dk.Karanglo, Teplok, Kuwang
Tahap 10	
6. BOP	Dukuh Randusari
Tahap 2	
7. BOP	Desa Argomulyo
8. Jalan – Cor Beton/ blok	Dk.Karanglo, Teplok, Kuwang
Tahap 20	
9. BOP	Dukuh Randusari

Sumber: Data Olahan dari Data Statistik Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman

Masyarakat Kabupaten Sleman, seperti masyarakat Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan merasakan manfaat dari perbaikan fasilitas publik. Meskipun masyarakat ikut juga berpartisipasi langsung untuk perbaikan fasilitas dalam pemberdayaan tersebut, masyarakat tidak merasa diberatkan untuk menyumbang tenaga. Berikut pendapat Marji (warga Desa Argomulyo) menambahkan pendapat Sutrisno Hadi:

“Saya sendiri tidak merasa diberatkan dengan adanya bakti sosial dengan memberdayakan warga karena kegiatan tersebut juga kami rasakan manfaatnya dan ada kemudahan akses dari fasilitas tersebut. Fasilitas umum yang ada di desa itu tentu kami juga yang menggunakan, jadi sangat beruntung dengan adanya perbaikan tersebut walaupun kita dilibatkan untuk bekerja bakti. Apalagi kami juga mendapat bantuan dana berupa Biaya Operasional Proyek.” (Wawancara tanggal 27 Desember 2012)

Layanan masyarakat yang diberikan Pemerintah Kabupaten Sleman dan komunitas dalam pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas telah menciptakan kesinambungan fasilitas publik. Fasilitas yang ada di desa-desa ditingkatkan dengan perbaikan untuk menciptakan fasilitas publik yang tidak rentan terhadap ancaman bencana. Keterlibatan masyarakat dalam perbaikan fasilitas publik telah menjadikan masyarakat Kabupaten Sleman siap menghadapi risiko bencana yang terjadi dengan tindakan antisipasi.

d. Komunikasi

Kemampuan masyarakat untuk berkomunikasi dalam forum musyawarah rencana kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Sleman sudah

baik. Kemampuan masyarakat dalam berkomunikasi terlihat dari banyaknya peserta pelatihan dalam pemberdayaan masyarakat siaga bencana yang memiliki kemampuan berpendapat dengan memberikan saran dan usulan yang pada saat diskusi. Masyarakat Kabupaten Sleman yang terdiri dari berbagai golongan pendidikan atau pekerjaan semua dijadikan rata untuk dilatih dalam berkomunikasi dengan baik di depan umum. Komunitas Tagana Sleman sendiri memiliki strategi untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat siaga bencana berbasis komunitas. Ahmadi (Sekretaris Posko Tagana) mengatakan:

“Setiap pertemuan pelatihan pengurangan risiko bencana, agar peserta yang hadir terlibat aktif untuk mengemukakan pendapat kami memiliki cara sendiri mba. Cara tersebut dengan membentuk suatu kelompok diskusi, misalnya saja dalam suatu kelompok terdiri dari 10 orang. Ketika kelompok sudah terbentuk, kami meminta setiap kelompok untuk berdiskusi membahas materi pelatihan seperti langkah yang harus dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, pembuatan peta rawan bencana, mendiskusikan sistem peringatan diri yang terdapat di masing-masing desa. Hasil diskusi tersebut, biasanya akan dibahas dengan diskusi panel dengan panelis dari perwakilan tiap anggota kelompok dan dari pembicara lain. Jadi ada pertukaran informasi.” (Wawancara tanggal 27 Desember 2012)

Kemampuan masyarakat berkomunikasi ini tidak hanya sebatas bicara saja. Komunitas sebagai fasilitator berusaha agar masyarakat juga memiliki pengetahuan terhadap apa yang dikomunikasikan.

Kemampuan berkomunikasi masyarakat Sleman terkait informasi bencana sudah cukup baik. Hal tersebut sesuai pernyataan dari Makwan, S.TP, MT:

“BPBD Sleman melihat kemampuan masyarakat berkomunikasi mengenai materi kebencanaan semakin lama semakin membaik. Pelatihan pengurangan risiko bencana yang dilakukan pada umumnya dua atau sampai tiga hari memperlihatkan bahwa pada hari pertama peserta masih belum terlalu aktif untuk mengemukakan aspirasinya. Kami menilai pada hari kedua biasanya kemampuan masyarakat untuk berkomunikasi dan terlibat aktif mengalami peningkatan sekitar 50%-60%, itu semua juga berkat bantuan para komunitas disini. Masyarakat juga kami libatkan dalam pembuatan sistem peringatan dini dan peta ancaman bencana.” (Wawancara tanggal 6 Desember 2012)

Pernyataan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sleman didukung oleh Sutrisno Hadi (Kepala Desa Argomulyo):

“Tentu kemampuan komunikasi masyarakat desa Argomulyo mengenai masalah bencana dan pencegahannya ini mengalami peningkatan dengan adanya pelatihan dari pemerintah. Masyarakat tidak malu-malu lagi untuk mengutarakan maksudnya dengan memberikan pendapat dalam forum mba, sekarang masyarakatnya lebih pintar lagi mba karena ilmunya tambah. Tetapi untuk memberikan informasi secara *online* mengenai kondisi wilayah desa kami ini belum ada.” (Wawancara tanggal 27 Desember 2012)

Peningkatan kemampuan masyarakat dalam berkomunikasi seputar pengetahuan bencana membuat masyarakat lebih siap dalam menghadapi risiko bencana dan mengantisipasi dampak yang terjadi. Komunikasi antar masyarakat Kabupaten Sleman dipererat dengan adanya radio lokal setempat yang bergabung untuk memberikan informasi bencana terkini.

e. Informasi

Ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dan komunitas untuk menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan kebencanaan. Pemberdayaan masyarakat siaga bencana komunitas sendiri merupakan salah satu cara tepat untuk menginformasikan kebencanaan. Kegiatan pelatihan pengurangan risiko bencana, simulasi atau gladi lapang, ataupun sosialisasi merupakan salah satu strategi untuk mentransfer informasi dengan bantuan komunitas. Makwan, S.TP, MT (Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sleman) sebagai penyelenggara mengatakan mengenai informasi bencana dalam pemberdayaan, sebagai berikut:

“BPBD Sleman menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat siaga bencana, salah satu tujuannya untuk memberikan informasi-informasi penting seputar kebencanaan agar masyarakat mengerti dan dapat melakukan antisipasi. Informasi merupakan hal penting, jadi kami tidak dapat asal bicara saja tetapi kami bekerjasama dengan berbagai institusi untuk memberikan materi yang baik. Informasi tersebut juga bisa disampaikan melalui dokumen tertulis atau edaran kepada masing-masing kepala desa atau bahkan kepala dukuh.” (Wawancara tanggal 6 Desember 2012)

Ahmadi (Sekretaris Posko Tagana) menambahkan pernyataan dari Makwan, S.TP, MT di atas:

“Biasanya informasi yang diberikan, baik dari pemerintah daerah atau komunitas akan didiskusikan dalam musyawarah desa selain melalui sosialisasi, pelatihan atau simulasi. Masyarakat Kabupaten Sleman yang telah memahami pengetahuan bencana diajak menjadi pembicara atau panelis untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang belum mengetahui kebencanaan.” (Wawancara tanggal 27 Desember 2012)

Cara yang telah dilakukan BPBD Sleman dan komunitas dalam memberikan informasi kebencanaan, seperti melalui dokumen tertulis (surat edaran), penyampaian informasi kepada tokoh masyarakat, mengadakan pertemuan atau dialog informasi, seminar ataupun melalui faksimile.

Inisiatif masyarakat dalam mengembangkan informasi kebencanaan kepada masyarakat lainnya dilakukan dengan berbagai informasi. Foklar (Forum Komunikasi Lintas Relawan) yang diadakan oleh BPBD Sleman, melibatkan beberapa tokoh masyarakat sehingga tokoh masyarakat yang sudah mengetahui informasi kebencanaan dapat menyebarluaskan. Hal tersebut sesuai dhasi wawancara dengan Sutrisno Hadi (Kepala Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan):

“Sistem informasi yang kami dapatkan bersumber dari berbagai pihak, ada yang didapatkan dari pemerintah daerah, komunitas, dan kami memiliki sistem kesiapsiagaan desa sendiri. Kami juga telah membuat peta ancaman bencana Desa Argomulyo yang dibuat melalui pelatihan. Informasi kebencanaan yang kami miliki disebarluaskan pada masyarakat melalui pengumuman tertulis yang kami bagikan pada setiap ketua RT (Rukun Tetangga) dan juga melalui papan pengumuman di kantor kepala desa, jadi sebelumnya ada pembentukan Sistem Informasi Kebencanaan Desa. Namun, saat ada ancaman mendesak seperti saat Merapi akan meletus itu sistem peringatan seperti sirine di desa kami akan berbunyi tentu masyarakat sudah mengetahui informasi ini dengan sendirinya.” (Wawancara 27 Desember 2012)

Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menyebarkan informasi kebencanaan yang dibentuk dalam kegiatan pengurangan risiko bencana.

Namun, berdasarkan hasil dokumentasi penelitian pada *website* BPBD Sleman mengenai informasi kebencanaannya jarang diperbarui. Informasi yang terkait sistem peringatan dini yang ada di Kabupaten Sleman belum diunggah di *website* BPBD Sleman.

f. Rintangan

Rintangan-rintangan yang terjadi dalam proses pemberdayaan masyarakat siaga bencana ini biasanya berupa kendala masalah teknis pada saat pelaksanaan ataupun masalah yang bukan menjadi kehendak penyelenggara yaitu iklim/cuaca. Rintangan atau kendala yang dihadapi oleh BPBD Sleman dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat biasanya memang masalah kondisi cuaca yang dapat menunda kegiatan, berikut ini hasil wawancara dengan Makwan, S.TP, MT:

“Saat pelaksanaan pemberdayaan dilakukan biasanya kami terkendala pada kondisi cuaca yang tidak menentu. Karena cuaca sedang tidak mendukung seperti turun hujan, kami terkendala untuk menuju lokasi desa yang kadang berada pada kawasan bencana longsor dan hujan kadang membuat masyarakat memiliki rasa malas untuk datang. Apalagi untuk kegiatan simulasi atau gladi lapang yang dilakukan tempat terbuka tentu harus kami tunda jika hujan turun. Kendala teknis yang menghambat itu biasanya seperti hambatan dari peralatan teknologi yang akan kami gunakan dalam pelatihan atau simulasi mengalami masalah.”
(Wawancara tanggal 6 Desember 2012)

Rintangan pada pemberdayaan masyarakat siaga bencana berbasis komunitas merupakan sesuatu yang terjadi diluar kehendak penyelenggara ataupun peserta. Kendala dapat dijadikan pembuktian atau pengujian suatu organisasi, komunitas atau masyarakat sejauh mana berdaya untuk

mengatasi kendala tersebut. BPBD Sleman sendiri memiliki langkah dalam mengatasi kendala atau rintangan, berikut pernyataan Makwan, S.TP, MT (Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan):

“Untuk meminimalkan kendala di bidang teknis, kami melakukan pengecekan semua peralatan yang akan digunakan dan menjadikan semua penyelenggara termasuk komunitas untuk memiliki keahlian dalam penggunaan peralatan. Menghadapi kondisi simulasi (kegiatan lapangan) saat kondisi cuaca tidak mendukung, BPBD Sleman dan komunitas membuat rencana lain atau *plan B* yang dibuat sebelum pelaksanaan simulasi. *Plan B* saat cuaca tidak mendukung dilakukan dengan menyiapkan tempat dan peralatan di dalam ruangan untuk pelaksanaan simulasi.” (Wawancara tanggal 6 Desember 2012)

Masalah lain yang dihadapi ketika pelaksanaan pemberdayaan masyarakat siaga bencana berbasis komunitas, yaitu seperti kendala dari masyarakat awam yang sulit memahami istilah-istilah dalam informasi kebencanaan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Ahmadi (Sekretaris Posko Tagana Sleman):

“Kendala sebagai fasilitator dari komunitas seperti kami ini mengalami kesulitan ketika menghadapi masyarakat desa yang benar-benar awam terhadap istilah-istilah informasi kebencanaan. Tentu sebagai fasilitator, kami harus benar-benar menjelaskan secara rinci materi pelatihan yang kami berikan. Kami tidak keberatan mengulangi penjelasan yang kami ucapkan, karena tujuan pemberdayaan ini sendiri untuk membuat masyarakat menjadi mandiri dalam mengantisipasi bencana. Menjadikan masyarakat siaga bencana memang membutuhkan proses. Masalah lain biasanya berkaitan dengan alat transportasi menuju lokasi, karena kami belum mendapat bantuan dari pemerintah daerah.” (Wawancara tanggal 27 Desember 2012).

Pernyataan Ahmadi tersebut diperkuat Marji (warga Desa Argomulyo) menjelaskan bahwa:

“Kendala yang dihadapi itu kadang masih ada masyarakat yang belum mengerti mba, tapi itu jadi tantangan tersendiri dalam memahami materi pelatihan pengurangan risiko bencana. Tantangan itu sekaligus dapat menjadi kekuatan untuk bertindak bukan dijadikan kelemahan karena masyarakat didorong dan dibantu agar benar-benar mengerti jadi bisa berbagi informasi. Kondisi masyarakat yang telah memiliki kemampuan memahami materi pelatihan dengan baik dapat menjadikan masyarakat untuk tidak bergantung kepada komunitas.” (Wawancara tanggal 27 Desember 2012)

Masyarakat Kabupaten Sleman telah berusaha menjadi masyarakat mandiri yang memiliki kemampuan bencana. Masyarakat belajar untuk tidak mengeluh terhadap rintangan yang terjadi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas, karena rintangan tersebut diluar dari rencana yang diharapkan.

g. Jaringan Kerja

Jaringan kerja terbentuk dengan adanya kegunaan hubungan atau manfaat dari setiap pihak. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas untuk menciptakan masyarakat siaga bencana di Kabupaten Sleman, dilakukan dengan membentuk jaringan kerja yang baik antara pemerintah (pusat dan daerah) dan masyarakat. Pernyataan tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Makwan, S.TP, MT bahwa:

“Ada jaringan kerja dalam pemberdayaan ini yang terdiri dari pemerintah pusat maupun daerah dan masyarakat, baik tokoh masyarakat, komunitas, maupun warga desa. Pemerintah pusat dalam kegiatan ini yang bertanggung jawab adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) senantiasa memberikan petunjuk materi dan membuat kebijakan untuk dilaksanakan di daerah oleh BPBD. Kami dalam membentuk jaringan kerja tidak akan menutup kerjasama dengan berbagai

komunitas yang ada di Sleman, sebaliknya kami selalu meningkatkan jaringan dengan saling menghubungkan antar komunitas. Kami membuka kesempatan kerjasama kepada seluruh komunitas di Sleman untuk menjadi fasilitator.” (Wawancara tanggal 6 Desember 2012)

Kerjasama yang diciptakan BPBD Sleman dengan masyarakat membuat seluruh peserta ikut terlibat dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan pengurangan risiko bencana, simulasi, maupun bakti sosial dengan sukarela. Masyarakat juga diberi kesempatan oleh BPBD Sleman untuk menjadi sukarelawan pembicara di desa lain yang belum melaksanakan pelatihan dengan menceritakan pengalamannya selama pelatihan di desanya.

Tagana sebagai fasilitator juga mampu menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat sehingga menghasilkan jaringan kerja yang saling berhubungan. Sebagai fasilitator, Tagana mampu menciptakan suasana kekeluargaan yang membuat masyarakat bersedia bekerja sama sebagai peserta. Semua pihak dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat siaga bencana berbasis komunitas, memiliki manfaat yang didapatkan dari kegiatan tersebut. BPBD Sleman sebagai penyelenggara mendapatkan manfaat keberhasilan program yang dibuat dan mampu menciptakan masyarakat yang lebih berpengetahuan terhadap bencana, sehingga memajukan masyarakat Kabupaten Sleman. Sementara itu, Ahmadi (Sekretaris Posko Tagana) menjelaskan manfaat yang didapatkan oleh Tagana yaitu:

“Sebagai komunitas yang peduli pada bencana, Tagana juga mendapatkan manfaat dari kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu dapat menyalurkan hobi menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain yang membutuhkan dan juga meningkatkan eksistensi komunitas kami.” (Wawancara tanggal 27 Desember 2012)

Sedangkan manfaat yang didapat masyarakat Desa Argomulyo menurut Marji (warga Desa Argomulyo), yaitu:

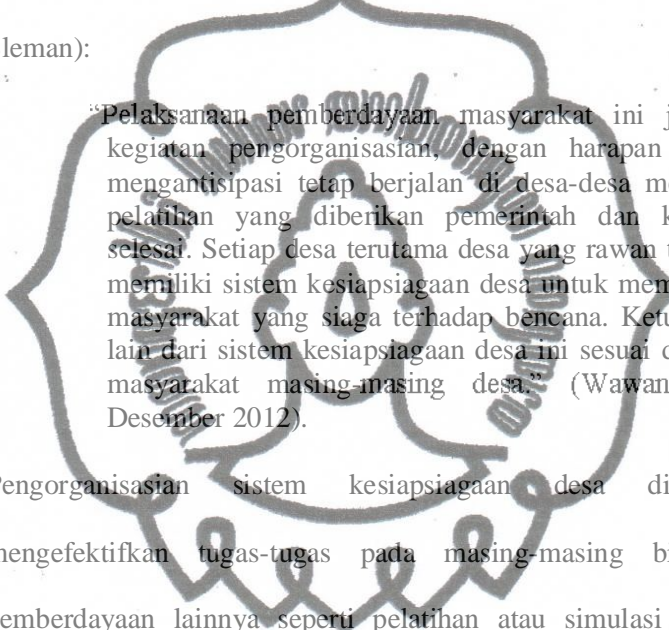
“Pengetahuan masyarakat terhadap informasi bencana meningkat dan masyarakat Desa Argomulyo menjadi masyarakat yang lebih siap dalam menghadapi bencana. Manfaat lain yaitu masyarakat menjadi mengerti apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir dampak bencana.” (Wawancara tanggal 27 Desember 2012)

Manfaat yang didapatkan komunitas dan masyarakat merupakan suatu bukti bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat siaga bencana berbasis komunitas itu sangat berguna. Adanya manfaat yang didapatkan pihak-pihak terkait akan menarik pihak lain yang belum bergabung dalam kegiatan ini untuk ikut bergabung.

h. Organisasi

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat siaga bencana berbasis komunitas, BPBD Sleman dan komunitas peduli bencana mengoordinasikan masyarakat untuk membentuk sistem kesiapsiagaan di desa-desa. BPBD Sleman dan komunitas membantu masyarakat melakukan musyawarah untuk menentukan perangkat kerja dari sistem kesiapsiagaan desa. Sistem kesiapsiagaan desa ini secara garis besar terdiri dari ketua umum, sekretaris, bendahara, kepala bidang operasional, kepala bidang

sistem peringatan dini, dan kepala bidang kesiapsiagaan. Sistem kesiapsiagaan desa ini biasanya dipimpin oleh kepala desa atau tokoh masyarakat yang ditunjuk. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Makwan, S.TP, MT (Kepala Badan Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sleman):



“Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat ini juga terdiri dari kegiatan pengorganisasian, dengan harapan kegiatan untuk mengantisipasi tetap berjalan di desa-desa meskipun kegiatan pelatihan yang diberikan pemerintah dan komunitas sudah selesai. Setiap desa terutama desa yang rawan terhadap bencana memiliki sistem kesiapsiagaan desa untuk membantu terjaganya masyarakat yang siaga terhadap bencana. Ketua dan perangkat lain dari sistem kesiapsiagaan desa ini sesuai dengan pemilihan masyarakat masing-masing desa.” (Wawancara tanggal 6 Desember 2012).

Pengorganisasian sistem kesiapsiagaan desa dilakukan untuk mengefektifkan tugas-tugas pada masing-masing bidang. Kegiatan pemberdayaan lainnya seperti pelatihan atau simulasi perlu dilakukan koordinasi yang baik antara pihak penyelenggara, pelaksana, dan peserta. Setiap pihak harus memahami peran masing-masing dalam tiap kegiatan. Komunitas mengarahkan peran-peran dari tiap peserta. Berikut ini kutipan wawancara dengan Ahmadi (Sekretaris Posko Tagana) peran komunitas dalam pengorganisasian:

“Pengorganisasian ada ketika simulasi lapangan, kami membuat suatu skenario seperti menjalankan suatu drama. Skenario terlebih dahulu kami buat dengan pihak BPBD Sleman. Skenario tersebut mengibaratkan ketika kami dihadapi suatu bencana, akan ada korban; masyarakat yang menolong, relawan dari berbagai komunitas. Masyarakat harus mampu menjalankan perannya

masing-masing, oleh karena itu dibutuhkan koordinasi yang baik.”
(Wawancara tanggal 27 Desember 2012)

Gambar 4.3
Simulasi/Gladi Lapang Merapi



Sumber: Dokumentasi Tagana Sleman

Pada pelaksanaan gladi lapang bencana, setiap peserta harus mengerti sebagai siapa mereka berperan dan seperti apa tugas mereka dalam kegiatan simulasi tersebut. Kerjasama yang baik antar anggota masyarakat akan mensukseskan gladi lapang, masyarakat mempelajari cara berorganisasi dan mengambil keputusan ketika terjadi bencana. Pernyataan dari Makwan, S.TP, MT dan Ahmadi dibenarkan oleh Marji:

“Dalam kegiatan-kegiatan yang ada itu mba, kami ya dibantu sama pemerintah dan komunitas untuk membuat sistem kesiapsiagaan desa juga kalau ada simulasi bencana seperti simulasi Merapi. Jadi, katanya disini kami belajar tentang pengorganisasian. Kata fasilitator tujuannya itu untuk melatih kami berorganisasi. Tetapi mba, kalau sistem kesiapsiagaan itu kadang rapatnya tidak tentu karena belum dijadwal.” (Wawancara tanggal 27 Desember 2012)

i. Keahlian atau Kemampuan

Kemampuan ini terdiri dari kemampuan berkomunikasi dan kemampuan pembuatan peta atau gambar kebencanaan. Kemampuan komunikasi telah dijelaskan sebelumnya pada bagian komunikasi. Kemampuan-kemampuan yang tercapai tersebut akan memperlihatkan masyarakat Sleman sudah menguasai atau belum mengenai pengetahuan bencana. Secara keseluruhan kemampuan komunitas dan masyarakat Kabupaten Sleman sudah baik, berikut informasi dari Makwan, S.TP, MT:

“Kemampuan komunitas peduli bencana dalam membantu penyelenggaraan segala kegiatan pengurangan risiko bencana di masyarakat sudah sangat baik. Komunitas sudah sangat membantu sebagai fasilitator dengan kemampuan komunikasi yang sangat baik dan memiliki pengetahuan bencana yang sangat baik mengenai apa itu bencana, sistem peringatan dini, cara mengantisipasi bencana, dan sebagainya. Sementara kemampuan masyarakat juga sudah baik karena masyarakat yang tadinya awam sekarang sudah ada yang bisa menganalisis peta ancaman bencana di desanya.” (Wawancara tanggal 6 Desember 2012)

Tagana memperjelas bahwa kemampuan masyarakat dalam menyusun perencanaan pengurangan resiko bencana juga sudah meningkat lebih baik dibandingkan sebelum erupsi Merapi tahun 2010 lalu. Berikut ini Ahmadi sebagai Sekertaris Posko Tagana mengatakan:

“Peningkatan masyarakat desa di Kabupaten Sleman sudah sangat baik dibandingkan sebelum bencana meletusnya Merapi 2010 lalu, peningkatnya sudah sekitar 80%. Dahulu sebelum adanya kegiatan pemberdayaan ini, masyarakat banyak yang tidak mengerti apa itu sistem peringatan dini sekarang mereka sudah mengerti alat sistem peringatan dini apa saja yang ada di desanya. Hal ini merupakan suatu kemajuan bagi Kabupaten Sleman.” (Wawancara tanggal 27 Desember 2012)

Masyarakat Kabupaten Sleman dilatih untuk memiliki kemampuan teknis dalam merancang gambar peta ancaman bencana dan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP). Sebelum masyarakat membuat peta ancaman bencana, komunitas terlebih dahulu memberikan contoh gambaran peta ancaman bencana dan mengarahkan bagaimana membuat peta ancaman bencana. Pada kegiatan bakti sosial, masyarakat diharapkan mampu menciptakan fasilitas publik yang tidak rentan bencana. Desa Argomulyo sebagai salah satu desa siaga bencana, telah memulai membuat peta ancaman bencana dengan bantuan BPBD Sleman dan komunitas. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan Marji (warga Desa Argomulyo):

“Komunitas dan orang BPBD Sleman sangat membantu kami dalam pembuatan peta ancaman bencana, kami diarahkan dari awal sampai akhir bagaimana cara menggambar peta ancaman bencana maupun Standar Operasional Prosedur. Kami melihat contoh peta ancaman bencana se-Sleman nanti dari sana kami bisa tahu wilayah mana saja yang rawan di Desa Argomulyo. Peta ancaman bencana itu nanti disebarkan kepada semua warga Desa Argomulyo melalui kepala dukuh atau bisa juga lewat RT (Rukun Tetangga). Kegiatan tersebut tentu meningkatkan kemampuan teknis dari masyarakat Desa Argomulyo.” (Wawancara tanggal 27 Desember 2012)

Berdasarkan penelitian, kemampuan yang belum dimiliki oleh sebagian besar masyarakat adalah manajemen barak dan logistik. Pelatihan manajemen barak dan logistik di Sleman baru dilakukan pada relawan dan

tokoh masyarakat, belum ada pelatihan di desa-desa. Walaupun sudah ada desa yang menganalisis sendiri kebutuhan logistik bencana.

Keahlian yang didapatkan dari pelaksanaan pemberdayaan masyarakat siaga bencana berbasis komunitas sebagai wujud manajemen prabencana Kabupaten Sleman, diharapkan meningkatkan kecerdasan masyarakat Kabupaten Sleman untuk mengantisipasi bencana. Pemerintah Kabupaten Sleman mengharapkan masyarakatnya memiliki wawasan dan pengetahuan kebencanaan, mengingat Sleman sebagai salah satu daerah rawan bencana.

j. Keselarasan

Kesamaan tujuan dan kesamaan nilai dalam pemberdayaan masyarakat siaga bencana berbasis komunitas yang dimiliki masyarakat desa Kabupaten Sleman telah menciptakan keselarasan. Keselarasan yang terjalin di masyarakat terlihat dari kesepakatan masyarakat dalam melakukan pengembangan informasi kebencanaan dan pemanfaatan teknologi yang tepat guna dalam kegiatan pelatihan pengurangan risiko bencana. Penjelasan di atas sesuai dengan pendapat Makwan, S.TP, MT :

“Keselarasan dalam kegiatan pemberdayaan ini dimulai dengan adanya kesepakatan atau persetujuan dari masyarakat. Kebetulan masyarakat Sleman mudah untuk rembukan membahas soal bencana, pendapat dari masyarakat kami ambil suara terbanyak agar selaras.” (Wawancara tanggal 6 Desember 2012)

Ahmadi (Sekretaris Posko Tagana) membenarkan pendapat Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan tersebut:

“Membentuk keharmonisan dengan masyarakat disini itu mudah mba, yang penting antara komunitas dan masyarakat kalau ada apa-apa dalam kegiatan pelatihan atau musyawarah dibicarakan dan disepakati bersama.” (Wawancara tanggal 27 Desember 2012)

Pendapat Makwan, S.TP, MT dan Ahmadi didukung dengan pernyataan

Marji (warga desa Argomulyo):

“Warga desa sini itu kalau diajak kerjasama sangat mudah mba, dalam kegiatan seperti pelatihan-pelatihan dari pemerintah itu masyarakatnya mau cepat kumpul. Kalau kumpul dalam pelatihan nanti kami membicarakan tentang bagaimana meningkatkan informasi kebencanaan di desa kami. Lalu membuat sistem peringatan dini dari alat komunikasi dan teknologi yang ada disini, tentu kami masih mengikuti arahan dari pemerintah. Acara kumpulnya akan selesai kalau semua warga sudah sepakat mba agar tidak ada ribut-ribut sehingga menciptakan keselarasan.” (Wawancara tanggal 27 Desember 2012)

Keselerasan antara komunitas dan masyarakat menandakan suatu masyarakat mampu mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas, karena pemerintah telah berhasil mengkolaborasikan kegiatan pemberdayaan dengan bantuan komunitas. Selama ini, masyarakat Desa Argomulyo dapat bekerja sama baik dengan komunitas maupun pihak BPBD Sleman yang berarti masyarakat menjadi lebih berdaya dalam menambah pengetahuan. Komunitas dapat menjalankan peran sesuai Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 8 Tahun 2010 yaitu penyelenggaraan penanggulangan bencana mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial. Kemampuan menciptakan keselarasan di masyarakat yang dilakukan Tagana Sleman dengan cara menjalin kerjasama yang baik dan menjalin sistem kekeluargaan, sehingga masyarakat tidak hanya jadi

pendengar tetapi masyarakat ikut aktif. Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.



Tabel 4.8

Matriks

**Pemberdayaan Masyarakat Siaga Bencana Berbasis Komunitas
di Kabupaten Sleman**

No.	Kriteria Pemberdayaan	Kegiatan yang sudah dilakukan	Kegiatan yang belum dilakukan
1.	Mendahulukan kepentingan umum	<ul style="list-style-type: none"> - Pembelajaran komunikasi dan kerjasama dalam pelatihan pengurangan risiko bencana, simulasi/gladi lapang, sosialisasi, dan bakti sosial - Menerapkan sistem kekeluargaan dalam semua kegiatan pemberdayaan - Penyediaan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelatihan dan simulasi. 	Tidak ada
2.	Kesamaan nilai	<ul style="list-style-type: none"> - Menyatukan kesamaan tujuan kegiatan pemberdayaan masyarakat siaga bencana. - Membuat ide kreatif masyarakat dengan mendiskusikan pengetahuan kebencanaan (membentuk kelompok diskusi) 	Tidak ada
3.	Layanan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Memfasilitasi pendidikan bencana di sekolah (pelatihan pengurangan risiko bencana dan simulasi) - Penyediaan dapur umum - Memberikan Bantuan Operasional Proyek - Perbaikan jalan dan talud 	- Membuat Pos Kesehatan Desa Siaga Bencana (belum semua desa)

No.	Kriteria Pemberdayaan	Kegiatan yang sudah dilakukan	Kegiatan yang belum dilakukan
4.	Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat diskusi panel dengan melibatkan peserta sebagai pembicara - Menampung aspirasi dari masyarakat dalam menentukan sistem peringatan dini dan peta ancaman bencana - Menjalin komunikasi kebencanaan dengan masyarakat melalui radio lokal 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum setiap desa memiliki <i>website</i> untuk menjalin komunikasi kebencanaan diantara masyarakat
5.	Informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian informasi melalui sosialisasi bencana - Mengikutsertakan tokoh masyarakat dalam Forum Komunikasi Lintas Relawan Informasi melalui dokumen tertulis (surat edaran) - Membentuk Sistem Informasi Kebencanaan Desa (SIKAD) - Membuat radio komunikasi kebencanaan dan <i>sms gateway</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi tentang kebencanaan kurang diperbarui <i>website</i> BPBD Sleman dan komunitas. Belum terselesaikannya rencana kontingensi terbaru (masih dalam tahap pembuatan)
6.	Rintangan (Penyelesaian)	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengecekan peralatan dan teknologi yang akan digunakan dalam pelatihan ataupun simulasi - Pemahaman materi pelatihan secara rinci dan dilakukan pengulangan jika diperlukan 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya bantuan transportasi bagi komunitas untuk menuju lokasi pemberdayaan masyarakat

No.	Kriteria Pemberdayaan	Kegiatan yang sudah dilakukan	Kegiatan yang belum dilakukan
7.	Jaringan kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Membuka kesempatan kerja dengan semua komunitas peduli bencana di Sleman - Mengajak peserta dari desa yang sudah melakukan pemberdayaan menjadi pembicara di desa lain yang belum melakukan pemberdayaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum banyak jaringan kerja dari pihak swasta untuk terlibat dalam pelatihan pengurangan risiko bencana
8.	Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk sistem kesiapsiagaan desa - Menentukan tugas masing-masing perangkat sistem kesiapsiagaan desa - Membentuk skenario peran dan fungsi masyarakat dalam simulasi atau gladi lapang 	<ul style="list-style-type: none"> - Jadwal pertemuan sistem kesiapsiagaan desa belum terstruktur
9.	Keahlian/kemampuan	<ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan berkomunikasi masyarakat dalam diskusi panel pelatihan pengurangan risiko bencana yang baik (masyarakat mampu memberikan aspirasi sebagai bahan masukan manajemen prabencana) - Kemampuan bidang teknis dalam pembuatan peta ancaman dan peta jalur evakuasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada pelatihan manajemen barak dan logistik ke desa-desa, jadi belum semua masyarakat memiliki kemampuan manajemen barak (terbatas hanya pada tokoh masyarakat)
10.	Keselarasan	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah terwujudnya kesamaan tujuan - Kesepakatan dalam pemanfaatan teknologi dalam sistem peringatan dini. - Keterlibatan masyarakat dalam sistem pengawasan kegiatan pemberdayaan masyarakat siaga bencana berbasis komunitas 	Tidak ada

3. Terbentuknya Masyarakat Siaga Bencana

Manajemen prabencana melalui terselenggaranya pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas dilakukan guna membentuk masyarakat menjadi masyarakat yang siaga bencana. Terbentuknya masyarakat siaga bencana merupakan tujuan akhir dari manajemen prabencana di Kabupaten Sleman, yang pelaksanaannya dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas di Kabupaten Sleman. Pelatihan dan pendidikan yang merupakan salah satu program dalam prioritas aksi manajemen prabencana di Sleman dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang memiliki pengetahuan terhadap sistem peringatan dini dan berpartisipasi dalam pelatihan kesiapsiagaan serta mitigasi bencana. Upaya pelatihan dan pendidikan bencana dilakukan dengan memberdayakan masyarakat di Sleman, agar masyarakat berpartisipasi aktif dan memiliki sikap yang siaga. Masyarakat di Sleman juga sebagai salah satu lapisan yang memperkuat kelembagaan dalam prioritas aksi I manajemen prabencana. Masyarakat adalah sasaran pihak pertama yang langsung berhadapan dengan ancaman dan bencana, oleh karena itu kesiapan masyarakat menentukan besar kecilnya dampak bencana di masyarakat. Pada akhirnya keberhasilan manajemen prabencana dapat dilihat dari masyarakat Kabupaten Sleman yang telah memiliki peningkatan pengetahuan bencana, dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki keterampilan regu peringatan dini

Pengetahuan regu peringatan dini merupakan pengetahuan yang berkaitan dengan sistem peringatan dini. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sleman menjelaskan bahwa peringatan dini haruslah tanda yang dipahami semua masyarakat, bersifat segera dan bersifat resmi. Peringatan dini dapat bersumber dari pemerintah, dapat pula berdasarkan pengetahuan lokal tentang tanda-tanda bencana, serta menggunakan sumber daya lokal (apalagi jika bencana bersifat lokal). Pemerintah Sleman bekerja sama dengan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian (BPPTK) untuk membangun sistem informasi kebencanaan di bidang pemberdayaan dan informasi. Sistem informasi tersebut akan memberitahukan semua perkembangan aktivitas kekinian Gunung Merapi.

Desa Argomulyo yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat siaga bencana berbasis komunitas merupakan salah satu desa yang berhasil menjadikan masyarakatnya menjadi masyarakat siaga bencana di Kabupaten Sleman. Masyarakat Desa Argomulyo sudah mampu mengembangkan peringatan dini dengan potensi pengetahuan lokal di daerahnya. Dari pengetahuan yang didapatkan dalam pelatihan pengurangan risiko bencana, masyarakat Desa Argomulyo menjadi mengerti bahwa peringatan dini bukanlah sesuatu yang baru di daerahnya. Masyarakat Desa Argomulyo menjadi mengerti bahwa kentongan sebuah benda sederhana telah menjadi alat peringatan dini bagi banyak hal seperti

bencana, gerhana, kemalingan, dan sebagainya. Menurut masyarakat Desa Argomulyo bahwa sekarang ini fungsi kentongan dalam bencana masih digunakan walaupun sudah ada sirine yang lebih canggih dan dapat menjangkau banyak dukuh. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Sutrisno Hadi (Kepala Desa Argomulyo) terkait kemampuan masyarakat dalam sistem peringatan dini:

“Iya mba, jadi masyarakat Desa Argomulyo ini sekarang lebih maju sudah mengerti dan mampu mengembangkan sistem peringatan dini di desa kami. Ini merupakan salah satu manfaat dari adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat, melalui pelatihan yang diarahkan para relawan menjadikan masyarakat memiliki pengetahuan dan wawasan kebencanaan. Sistem peringatan dini di desa kami ini banyak sekarang, selain kentongan dan sirine, kami juga memanfaatkan radio dan sms melalui simpul warga. Jadi simpul warga ini dibentuk di masyarakat Desa Argomulyo terdiri dari perangkat desa, dusun, RT (Rukun Tetangga) dan tokoh masyarakat yang nantinya informasi sms dari SIKAD (Sistem Informasi Kebencanaan Desa) kami sebarakan ke masyarakat jika ada peringatan bahaya. Bahkan kami juga mulai memanfaatkan teknologi pengukur curah hujan dan sudah ada CCTV di beberapa titik rawan bencana disini.” (Wawancara tanggal 27 Desember 2012)

Hal yang penting adalah, masyarakat Desa Argomulyo telah membuat adanya kesepakatan dan pemahaman semua anggota masyarakat tentang sistem peringatan dini. Jadi, masyarakat Desa Argomulyo sudah memiliki pengetahuan banyak untuk meminimalisir risiko bencana sedini mungkin dimulai dengan mengetahui tanda-tanda bahaya yang dimiliki desa tempat tinggalnya. Desa Argomulyo merupakan desa yang berlokasi di kaki Gunung Merapi, menurut Marji (warga Desa Argomulyo)

masyarakat desanya sudah memiliki pengetahuan dalam menganalisis gejala-gejala atau tanda akan terjadi letusan Gunung Merapi. Berikut ini hasil wawancara dengan Marji (salah satu warga Desa Argomulyo):

“Kami ini ya sudah mengerti tanda-tanda kalau akan terjadi bencana. Seperti tanda letusan Gunung Merapi, semua informasi itu didapat dari Bapak Kepala Desa. Misalnya saja, kalau Merapi akan letusan itu ya sapi, kambing, dan hewan-hewan yang berada di dalam hutan keluar dan turun ke bawah sana, lalu udara itu rasanya sangat panas di malam hari dibanding hari-hari biasa.”
(Wawancara tanggal 27 Desember 2012)

Berdasarkan perkembangan sistem peringatan dini, sudah seharusnya tahun 2012 ini tidak ada lagi masyarakat desa Kabupaten Sleman yang tidak memiliki pengetahuan kebencanaan. Pada tahun 2012, rata-rata hampir semua desa di Kabupaten Sleman sudah memiliki kentongan, sirine, faksimile, *Handy Talky* (HT), sistem kesiapsiagaan desa atau simpul warga, CCTV, dan beberapa desa sudah ada yang memanfaatkan sistem internet *online*.

b. Memiliki keterampilan regu pemetaan

Masyarakat daerah Kabupaten Sleman telah mampu mengumpulkan data ancaman yang didapat dari peta rawan bencana. Pemerintah Kabupaten Sleman menyediakan peta ancaman bencana untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat yang berada di daerah rawan bencana. Pemetaan daerah berpotensi bencana bertujuan agar masyarakat dapat menganalisis daerah tempat tinggalnya berpotensi pada bencana apa.

Peta ancaman bencana berguna untuk mengetahui daerah mana saja di Kabupaten Sleman yang berpotensi bencana dan dari sana masyarakat diharapkan melakukan upaya untuk meminimalkan risiko bencana di daerahnya masing-masing. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat Kabupaten Sleman terhadap ancaman bencana, BPBD Sleman telah menyediakan peta rawan bencana gunung api, angin, kekeringan, dan longsor; peta jalur evakuasi Merapi; dan peta kerentanan penduduk yang dimiliki beberapa kecamatan seperti Kecamatan Prambanan dan Kecamatan Kalasan. Salah satu untuk menginformasikan peta tersebut kepada seluruh masyarakat dengan cara melakukan pelatihan pengurangan risiko bencana.

Dalam pemberdayaan masyarakat siaga bencana berbasis komunitas di Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman, masyarakat Desa Argomulyo mendapatkan informasi peta ancaman bencana Kabupaten Sleman. Masyarakat Desa Argomulyo dibantu komunitas untuk menganalisis dan merancang dusun mana saja yang berpotensi bencana. Berikut ini pernyataan Sutrisno Hadi (Kepala Desa Argomulyo) mengenai analisis kawasan rawan bencana di desa:

“Iya, sudah mba, buktinya sekarang ini masyarakat sudah memiliki banyak pengetahuan mengenai potensi bencana di daerah kami, pengetahuan ini kami dapat dari pelatihan-pelatihan yang diadakan pemerintah. Kami diajarkan untuk menganalisis data-data yang diperoleh dari lembaga-lembaga yang menangani bencana. Masyarakat Desa Argomulyo ini berada pada kawasan rawan bencana sedang (KRB I Merapi), dimana dusun yang termasuk pada kawasan tersebut diantaranya ada Bakalan, Jetis, Suruh, Panggung, Kliwang, Banaran, Gadingan, dan Teplok.

Lokasi dusun-dusun tersebut terlanda lahar hujan dan kemungkinan terlanda lahar letusannya. Sementara dusun Randusari, Kebur Lor, Kebur Kidul, Sewon itu termasuk dusun yang berpotensi hujan abu lebat, lumpur (panas), lontaran batu (pijar).” (Wawancara tanggal 27 Desember 2012)

Selain berada di daerah rawan bencana gunung api, Desa Argomulyo juga memiliki peta ancaman bencana kekeringan dan hampir seluruh dusun di Desa Argomulyo berada di kawasan rawan bencana kekeringan dengan potensi tinggi (KRB III kekeringan). Pernyataan Sutrisno Hadi didukung dengan pendapat Marji (warga Desa Argomulyo):

“Iya mba, warga disini sudah belajar itu dari pelatihan yang ada. Kami membuat peta ancaman bencana kemudian jalur evakuasi. Walaupun untuk gambarnya belum jadi, tapi kami sudah tahu daerah mana di desa ini yang rawan dan jalur mana yang digunakan ketika ada bencana. Disini jalur evakuasi turun dimulai dari dusun Mudal hingga dusun Delimasari, sedangkan jalur alternatifnya berada di sekitar dusun Randusari hingga dusun Sewon, disana juga terdapat salah satu posko petugas evakuasi.” (Wawancara tanggal 27 desember 2012)

Informasi pemetaan bencana yang diberikan oleh BPBD Sleman, menambah pengetahuan dan kemampuan masyarakat untuk menganalisis risiko bencana di sekitar Kabupaten Sleman. Masyarakat di beberapa daerah Sleman sudah ada yang bekerja sama dengan pemerintah untuk membuat peta ancaman se-kecamatan. Data pendukung mengenai contoh peta rawan bencana dapat dilihat pada lampiran 7, lampiran 8 untuk melihat peta jalur evakuasi, dan lampiran 9 untuk peta kerentanan penduduk.

c. Memiliki keterampilan regu pelatihan kesiapsiagaan

Pemerintah Kabupaten Sleman telah melaksanakan peninjauan materi-materi pelatihan yang dibutuhkan pada masing-masing desa di Kabupaten Sleman. Setelah masyarakat mengetahui dan menganalisis peta ancaman bencana di daerah tempat tinggalnya masing-masing, masyarakat diajak untuk memikirkan materi apa saja yang dibutuhkan dalam pelatihan pengurangan risiko bencana. Setiap desa di Kabupaten Sleman memiliki ancaman bencana yang berbeda-beda, maka materi pelatihan dan simulasi juga disesuaikan dengan kebutuhan. Masyarakat Sleman yang berada pada daerah rawan gunung api tentu membutuhkan pelatihan dan simulasi yang berkaitan dengan upaya untuk meminimalkan risiko bencana tersebut. Berhubung setiap daerah di Sleman memiliki potensi bencana yang berbeda-beda maka pelatihan dan simulasi juga beda, misalnya saja untuk daerah sekitar Kecamatan Cangkringan itu masyarakatnya membutuhkan pelatihan dan simulasi gunung api sedangkan sekitar Kecamatan Kalasan dan Kecamatan Prambanan membutuhkan pelatihan dan simulasi bencana gempa maupun longsor.

Sementara itu, Desa Argomulyo berdasarkan peta ancaman bencana Kabupaten Sleman berada di kawasan rawan Gunung Merapi dan kekeringan, maka masyarakatnya membuat rincian kebutuhan pelatihan risiko bencana erupsi Gunung Merapi dan kekeringan. Berikut ini

pernyataan Sutrisno Hadi (Kepala Desa Argomulyo) tentang pelatihan kesiapsiagaan didesanya:

“Dari peta ancaman bencana yang kami dapat dari lembaga terkait, desa kami ini sangat rawan terkena dampak merapi dan kekeringan, maka pelatihan kesiapsiagaan di desa kami menyesuaikan kebutuhan kalau terjadi bencana-bencana tersebut. Masyarakat Desa Argomulyo mengikuti pelatihan kesiapsiagaan yang disediakan pemerintah terjadi bencana, dan masyarakat Desa Argomulyo sendiri membuat penyiapan logistik sebagai bahan kesiapsiagaan seperti obat-obatan, pangan, tenda darurat, tandu, dan masker. Serta masyarakat memiliki kemampuan menentukan lokasi evakuasi jika terjadi bencana untuk dijadikan barak pengungsian. Sejah ini pengetahuan dan kemampuan masyarakat disini cukup baik untuk kesiagaan.” (Wawancara tanggal 27 Desember 2012)

Selain itu, masyarakat Desa Argomulyo telah melakukan simulasi gunung api sebagai upaya kesiapsiagaan, berikut pernyataan Marji (warga Desa Argomulyo):

“Daerah kami ini sangat dekat Gunung Merapi, jadi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa kami dilakukan pelatihan simulasi jika terjadi gunung api. Pada simulasi kemarin itu simulasinya dibagi 4 tahap, yaitu tahap simulasi status merapi aktif normal; tahap simulasi waspada; tahap simulasi merapi siaga dan tahap simulasi status merapi awas. Kami membentuk kelompok dan masing-masing kelompok menempati rumah warga yang letaknya terpencar dan telah berisi warga sekitar. Rumah-rumah tersebut dianggap kawasan-kawasan rawan bencana. Pada tahap simulasi aktif normal sampai dengan waspada, dilakukan sosialisasi. Pada tahap siaga, mulai dilakukan pengungsian mandiri menuju rumah kepala dusun yang dianggap sebagai barak pengungsian. Pada tahap awas semua rumah tersebut sudah dilakukan pengosongan wilayah, dan semua berkumpul di rumah kepala dusun yang dianggap barak pengungsian.” (Wawancara tanggal 27 Desember 2012)

Pelatihan pengurangan risiko bencana dan simulasi sebagai bagian dari pelatihan kesiapsiagaan yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Sleman telah meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengantisipasi risiko bencana dan menambah pengetahuan yang berkaitan dengan bencana.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian dan kajian pada bab hasil dan pembahasan mengenai manajemen prabencana melalui pemberdayaan masyarakat siaga bencana berbasis komunitas di Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Sleman (BPBD Sleman) telah bekerja sama dengan komunitas peduli bencana (salah satunya Taruna Siaga Bencana) Sleman dalam melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan untuk melatih dan mendidik masyarakat menjadi masyarakat yang berpengetahuan bencana dan bersikap antisipasi terhadap bencana. Adapun pelaksanaan prioritas pengurangan risiko bencana, sebagai berikut:

a. PRIORITAS AKSI I

Sumber daya manusia yang terlibat terdiri dari, pemerintah pusat maupun daerah; masyarakat yaitu masyarakat itu sendiri, tokoh masyarakat, LSM, komunitas; serta ada keterlibatan lembaga swasta, namun pada kegiatan pemberdayaan belum terlibat. Penguatan kelembagaan lokal dengan memberdayakan masyarakat dan komunitas dalam musyawarah perencanaan pengurangan risiko bencana, rencana pemantauan kebencanaan, dan pelatihan.

b. PRIORITAS AKSI II

Kabupaten Sleman sudah menyediakan sistem-sistem untuk mengembangkan, memperbarui dan menyebarluaskan peta risiko beserta

informasi bencana (bahaya dan kerentanan). Sistem peringatan dini disebarluaskan ke masyarakat dalam berbagai aktivitas informasi dan masyarakat sendiri yang akan membuat SOP (Standar Operasional Prosedur) mengenai sistem peringatan dini di daerahnya masing-masing.

c. PRIORITAS AKSI III

Pengembangan program pelatihan pengurangan risiko bencana dan pembelajaran pengurangan risiko bencana menjadi bagian dari perencanaan pembangunan di Kabupaten Sleman. Pelatihan yang telah dilakukan antara lain: pelatihan pengurangan risiko bencana untuk sekolah, desa/dukuh, tokoh masyarakat, dan antar komunitas; gladi lapangan atau simulasi; serta sosialisasi.

d. PRIORITAS AKSI IV

Pemberdayaan masyarakat siaga bencana dengan pendekatan manajemen sumber daya alam dan lingkungan di Kabupaten Sleman, antara lain dengan mengadakan pelatihan tentang pelestarian alam dan aksi anti penggundulan lahan. Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sleman untuk mengurangi faktor-faktor penyebab risiko bencana yaitu dengan memperbaiki dan memperkuat fasilitas publik, misalnya perbaikan jalan dan penyediaan rambu-rambu kebencanaan.

e. PRIORITAS AKSI V

Strategi kesiapsiagaan dengan penguatan kemampuan teknis dan kelembagaan yaitu dengan mengikutsertakan masyarakat ke dalam Foklar

(Forum Komunikasi Lintas Relawan) dan dialog-dialog pertukaran informasi kebencanaan. Sementara sistem kesiapan tertulis tertuang dalam rencana kontingensi, namun rencana kontingensi terbaru Kabupaten Sleman yang disusun awal 2012 masih dalam proses pembuatan.

Pemerintah Kabupaten Sleman dalam kegiatan pemberdayaan ini berperan sebagai penyelenggara yang memfasilitasi seluruh kebutuhan, sedangkan komunitas peduli bencana sebagai pelaksana kegiatan di lapangan. Pencapaian kegiatan pemberdayaan masyarakat siaga bencana berbasis komunitas sebagai bentuk dari manajemen bencana yang telah dilakukan di Sleman berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas di Kabupaten Sleman telah memenuhi kriteria keberhasilan pemberdayaan:

- 1) Kepentingan umum: pembelajaran komunikasi dan kerjasama dalam pelatihan pengurangan risiko bencana, simulasi/gladi lapang, sosialisasi, dan bakti sosial.
- 2) Kesamaan nilai: terciptanya kesamaan tujuan kegiatan pemberdayaan dan terciptanya ide kreatif masyarakat dalam mendiskusikan pengetahuan kebencanaan.
- 3) Layanan masyarakat: tersedianya fasilitas pendidikan bencana di sekolah dan desa, penyediaan dapur umum, dan Bantuan Operasional Proyek.

- 4) Komunikasi: terbentuknya kelompok diskusi dalam pelatihan untuk menampung aspirasi dari masyarakat dalam menentukan sistem peringatan dini dan peta ancaman bencana.
- 5) Informasi: pengikutsertaan masyarakat dalam Forum Komunikasi Lintas Relawan dan membentuk Sistem Informasi Kebencanaan Desa.
- 6) Rintangan (penyelesaian): pengecekan peralatan dan teknologi yang akan digunakan dalam pelatihan ataupun simulasi, serta mengulang kembali materi pelatihan jika belum dimengerti masyarakat.
- 7) Jaringan kerja: pemberdayaan peserta dari desa yang sudah melakukan pelatihan menjadi pembicara di desa lain yang belum melakukan pelatihan.
- 8) Organisasi: terbentuknya sistem kesiapsiagaan desa dan adanya penjelasan tugas masing-masing perangkat sistem kesiapsiagaan desa.
- 9) Kemampuan: masyarakat berkemampuan membuat sistem peringatan dini dan peta ancaman bencana desa sebagai peningkatan kemampuan bidang teknis.
- 10) Keselarasan: terciptanya kesepakatan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi dalam sistem peringatan dini dan keterlibatan masyarakat dalam sistem pengawasan pemberdayaan.

Manajemen prabencana melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas telah membentuk masyarakat Sleman menjadi masyarakat siaga bencana, yang memiliki pengetahuan dalam menganalisis sistem peringatan dini dan tanda-tanda bencana, memiliki kemampuan membuat peta ancaman bencana, dan berketerampilan dalam pelatihan kesiapsiagaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran-saran untuk meningkatkan pelaksanaan manajemen prabencana melalui pemberdayaan masyarakat siaga bencana berbasis komunitas di Kabupaten Sleman:

1. Belum banyak terlibatnya pihak swasta dalam kegiatan pemberdayaan seperti yang terdapat dalam prioritas aksi I, disarankan pemerintah dapat membuat penawaran kerjasama pihak swasta dalam kegiatan pemberdayaan dengan terlibat dalam jaringan Forum Komunikasi Lintas Relawan (Foklar).
2. Strategi pemanfaatan lahan yang belum optimal dalam pengurangan risiko bencana di Sleman seperti yang terdapat pada hasil penelitian prioritas aksi IV, diharapkan BPBD Sleman mengoptimalkan dengan meningkatkan kerjasama dengan Kantor Lingkungan Hidup Sleman dan Dinas Pertanian dalam strategi tersebut, mengingat dinas-dinas tersebut berpengalaman pada bidang pemanfaatan lahan.
3. Untuk mengatasi masalah belum terselesaikannya Rencana Kontingensi Sleman yang terbaru, diharapkan Pemerintah Kabupaten Sleman dapat segera menyempurnakan rencana kontingensi terbaru dengan cara BPBD Sleman sebagai pihak yang paling bertanggungjawab perlu membuat rapat koordinasi agar prioritas aksi ke V tersebut terpenuhi. Rencana kontingensi tersebut juga harus dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bahan kesiapsiagaan tertulis dalam penanggulangan bencana di Sleman.

4. Menghadapi masalah belum tersedianya *website* informasi bencana masing-masing desa sebagai jaringan kriteria komunikasi dalam kegiatan pemberdayaan, Pemerintah Kabupaten Sleman, komunitas dan masyarakat diharapkan bekerjasama untuk membuat *website* kebencanaan berbasis desa di Sleman dan pemerintah disarankan menyelenggarakan pelatihan teknologi dan informasi pada masyarakat desa.
5. Mengatasi kurangnya transportasi komunitas menuju desa sebagai aspek rintangan dalam kegiatan pemberdayaan, diharapkan pemerintah daerah dapat menyediakan pinjaman alat transportasi kepada komunitas-komunitas yang akan menjadi fasilitator dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat siaga bencana.
6. Dalam mengatasi kriteria kemampuan manajemen barak dan logistik yang belum dimiliki oleh seluruh masyarakat, disarankan agar BPBD Sleman dan komunitas bekerjasama dalam mengadakan pelatihan manajemen barak dan logistik ke desa-desa.